**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Surat kabar atau koran merupakan salah satu sumber informasi yang sangat dekat dan dikenal luas oleh masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai masyarakat awam lebih-lebih masyarakat melek informasi menganggap media koran bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan tidak sedikit orang menjadikan media koran sebagai salah satu kebutuhan (pokok)-nya dalam mendapatkan informasi sehingga mereka terkadang melakukan kontrak/ berlangganan, baik secara periodik maupun permanen. Dapat dikatakan bahawa hidup-matinya sebuah media cetak (koran) sangat bergantung pada seberapa besar animo masyarakat pembaca terhadap media koran tersebut. Kenyataan ini hendaknya dapat diakomodir oleh insan pers sehingga dapat menghadirkan berita menggunakan kata-kata sesuai dengan harapan pembaca. Berita hendaknya ditulis dengan bahasa yang lugas, santun, dan bermakna denotasi. Bila berita yang disajikan mengandung kata yang bersifat multi tafsir (ambigu), besar kemuungkinan akan menimbulkan kesalahan pemahaman di kalangan para pembaca.

Namun demikian, yang terjadi justru sesuatu yang berbeda dengan apa yang diharapkan pembaca. Pembaca berita sering menemukan kata-kata atau istilah yang maknanya tidak langsung mengacu pada permasalahan pokok isi berita. Bahkan terkadang kalimat-kalimat dalam teks berita masih menggunakan kata-kata, istilah sebagai simbol atau tanda (diksi) berupa *majas eufemisme* **(**istilah ini akan digunakan selanjutnya**)**. Majas eufemisme merupakan majas yang menggunakan kata atau gabungan kata dengan arti atau maksud yang baik (lebih halus) yang tidak menyinggung perasaan orang lain dalam sebuah teks berita.

Eufemisme ini sengaja digunakan oleh penulis berita untuk membentuk sebuah opini di kalangan pembaca berita. Senada dengan pendapat Wazis (2012:125) yang perlu dipahami, produk yang dihasilkan oleh media massa, tidaklah mengandung kebenaran mutlak. Realitas yang disajikan media massa adalah hasil rekonstruksi fakta yang ditangkap oleh wartawan dalambentuk angle (sudut lain) tentang sisi menarik peristiwa itu.

Eufemisme tersebut dapat ditemukan antara lain pada sebuah judul sebagai kepala tulisan (berita) atau pada paragraf teks. Hal itu dimanfaatkan oleh penulis berita untuk mempengaruhi pembaca. Setiap upaya mendeskripsikan sebuah peristiwa, keadaan, kejadian atau benda merupakan usaha yang dilakukan untuk merangkai realita. Tampilan seperti itu opini publik akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga hal yang diharapkan oleh penulis berita tercapai.

Penggunaan eufemisme seperti itu justru memunculkan sikap skeptis di kalangan pembaca kritis (berpendidikan tinggi). Mereka terkadang sudah tidak lagi percaya pada berita-berita yang disamapaikan pada sebuah media cetak tertentu. Bahkan mungkin juga pada seluruh media koran tanpa kecuali, yang dipersepsikan sama. Sikap skeptis yang berlebihan pada diri pembaca lama- kelamaan akan melahirkan sikap apriori**.** Hal ini tentunya sangat disayangkan karena akan merugikan pihak penerbit media koran. Di kalangan pembaca awam, penggunaan eufemisme pada penulisan berita dapat memunculkan kesalahpahaman mengenai isi berita. Hal itu terjadi karena ketidakpahaman pembaca awam terhadap makna dari kata-kata yang terdapat dalam teks berita tersebut. Bila hal itu terjadi, maka peran dan fungsi dari keberadaan media koran sebagai penyampai informasi menjadi lemah atau bahkan hilang. Apa lagi di era online seperti saat ini, masyarakat dapat dengan cepat dan berbiaya murah mengakses berbagai informasi secara langsung. Peristiwa-peristiwa faktual yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah diakses dan dicermati oleh masyarakat.

Lemahnya peran media sebagai alat penyampai informasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni: Media sebagai alat propaganda oleh kalangann tertentu sudah demikian maraknya; Media sebagai corong penyebar informasi sudah tidak lagi berposisi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai media yang independen dan objektif.

Pendapat Wardhaugh (1972), yang membahas bahasa sebagai simbol vokal yang arbitrer (mana suka) yang dipakai dalam komunikasi manusia, kini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang bebas makna sebagaimana yang sebenarnya. Saussure, (dalam Thomas dan Waering, 2007:34) mengistilahkan fenomena ini sebagai “kesewenang-wenangan/ arbitrariness dari tanda. Keberpihakannya pada salah satu kelompok demikian jelas terlihat pada berita-berita yang dibaca. Kecenderungannya, bahasa yang digunakan merupakan hasil pilihan dan pertimbangan yang matang dari penulis berita untuk tujuan tertentu. Bahkan mungkin juga merupakan pesanan dari pihak-pihak tertentu pula.

Burke (dalam Aris Badara, 2012:57), menyatakan bahwa kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu tetapi juga membatasi persepsi kita dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan tertentu. Dengan kata lain, kata-kata yang digunakan dapat membatasi seseorang melihat perspektif lain, menyediakan aspek tertentu dari suatu peristiwa dan mengarahkannya untuk memahami suatu peristiwa.

Sebagai contoh, wacana berita yang lain dan menjadi kajian dalam peneliti ini terlihat pada judul berita Harian *Lombok Post* (selanjutnya disingkat HLP) Rabu, 26 -12-2012 pada Rubrik Ekonomi Bisnis “*Ekonomi Tumbuh, Perbankan Positif, NTP Belum Menjanjikan”.* Kata–kata yang digunakan pada judul di atas menunjukkan bahawa penggunaan bahasa pada media HLP tersebut jelas terlihat tidak bebas. Pembaca awam atau siswa sekolah menengah pertama tidak dapat memahami maksud dalam judul berita dengan cepat. Hal tersebut terjadi karena adanya maksud lain di balik kata-kata yang digunakan pada judul berita di atas. Kata *menjanjikan,* pada judul berita di atastidak dapat dipahami dengan cepat oleh para pembaca. Menurut arti denotasinya, kata *menjanjikan* yang kata dasarnya *jannji* bermakna ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.

Sepintas, penggunaan kata *menjanjikan*pada judul di atas tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan dari para pembaca. Akan tetapi, bila frase *belum menjanjikan* diganti dengan frase *belum tercapai*  atau *masih rendah*digunakan pada judul di atas, tentunya akan sangat mudah dipahami oleh pembaca berita. Pembaca dapat mengetahui isi berita yang menjelaskan tentang ketidakmampuan petani dalam membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Hal tersebut dikhawatirkan akan memunculkan respon yang berlebihan dari masyarakat. Tentunya, hal itu yang ingin dihindari oleh penulis dalam menulis sebuah teks berita. Adapun cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan kata-kata yang memperhalus makna ( eufemisme).

Penggunaan kata-kata yang bermakna eufemisme tersebut dapat saja merupakan sebuah permintaan atau pesanan dari kelompok tertentu. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang tidak menginginkan terjadinya gejolak di masyarakat seperti demonstrasi, kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Di samping itu, penggunaan eufemisme oleh penulis berita bisa saja merupakan upaya untuk melindungi diri dan lembaganya dari tekanan pihak lain yang menjadi objek dalam pemberitaan. Dengan demikian, penggunaan eufemisme oleh penulis berita dalam sebuah teks berita sudah memalui proses dan pertimbangan yang cukup matang.

Mencermati permasalahan di atas, penelitian ini memerlukan satu teori yang dapat membedah penggunaan kata atau frase yang mengandung makna diperhalus atau eufemisme. Teori yang paling representatif dan tepat dalam peneliti ini adalah teori analisis wacana kritis model Teun van Dijk. Teori analisis wacana kritis (selanjutnya disingkat AWK) medel van Dijk disebut sebagai “kognisi sosial”. Hal itu didasarkan pada upaya van Dijk dalam membuat satu jembatan yang menghubungkan elemen besar berupa struktur sosial dengan elemen wacana yang bersifat mikkro. Kognisi sosial meiliki dua arti. Pertama, bagaimana proses teks itu diproduksi oleh wartawan. Kedua, menggambarkan bagaimana nilai-nilai masyarakat yang patriarkal itu menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakan untuk membuat sebuah teks berita.

Proposal yang berjudul “*Eufemisme pada Media HLP: Tinjauan Analisis Wacana Kritis dan Relevansinya dengan Pembelajaran Wacana di SMP”,*akan mengkaji penggunaan kata-kata dalam penulisan sebuah berita dalam surat kabar dan menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian teks sebuah berita, bukan pada unsur kognisi sosial dan konteks sosial.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dipersoalkan dalam penelitian ini adalah penggunaan eufemisme pada media HLP ditinjau dari sebuah kajian analisis wacana kritis dan penerapannya dalam pembelajaran wacana. Rumusan masalah di atas, dapat diperinci sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk penggunaan eufemisme pada media Harian *Lombok Post*?
2. Bagaimanakah makna eufemisme yang terdapat dalam rubrik-rubrik teks berita pada media Harian *Lombok Post*?
3. Bagaimanakah pengintegrasian teks harian *Lombk Post* dengan pengajaran wacana di SMP? 
   1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. mengetahui bentuk penggunaan eufemisme dalam media Harian *Lombok Post*;
2. mengetahui makna eufemisme yang terdapat pada rubrik-rubrik teks berita pada media Harian *Lombok Post*;
3. mendeskripsikan pengintegrasian teks berita harian *Lombok Post* dengan pengajaran wacana di SMP.
   1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut dapat diperinci sebagai berikut.

* + 1. **Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis penelitian penggunaan eufemisme dalam penulisan berita pada media cetak harian *Lombok Post* dengan pengkajian *Analisis Wacana Kritis* meliputi beberapa hal. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. memberikan kontribusi untuk pengembangan teori Kajian Wacana Kritis dalam teks media;

2. sebagai bahan rujukan untuk kajian analisis teks media yang relevan pada penelitian-penelitian berikutnya.

**1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam pengkajian teks medi;
2. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan sikap media cetak dalam memberitakan sebuah peristiwa faktual yang terjadi dalam masyarakat lokal dan global;
3. hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi di NTB, khususnya Dinas Dikpora sebagai langkah awal pengembangan pembelajaran wacana berbasis teks.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

* 1. **Penelitian Relevan**

Beberapa penelitian kebahasaan terdahulu yang objek kajiannya teks dan dianggap memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah:

* + 1. Peneliitian yang dilakukan oleh Noor Irfan tahun 2011 dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Harian *Kompas* Atas RUU-DIY”

Penelitian dilakukan oleh Noor Irfan yang menggunakan media harian *Kompas* sebagai sumber data kajian. Penelitian yang akan dilakukan berikut ini menggunakan media koran harial *Lombok Post* sebagai sumber data. Hal itulah yang membedakan kedua penelitian tersebut. Dalam penelitiannya, Noor Irfan menemukan adanya keberpihakan Harian Umum *Kompas* pada penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi dan intensitas Harian Umum *Kompas* melakukan pemberitaan tentang pernyataan SBY yang menyamakan pemerintahan DIY dengan sistem monarki yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Noor Irfan terhadap Harian Kompas tersebut hanya melihat teks dari sisi keberpihakan penulis berita harian umum *Kompas*, tidak pada unsur yang lain. Keberpihakan media harian umum *Kompas* dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Harian *Kompas* berupaya memberitakan tentang sikap SBY yang membenturkan istilah “monarki” dengan “demokrasi”.Hal ini menyulut emosi masyarakat Yogyakarta yang sedang berbenah setelah mengalami bencana Merapi; (2) Sultan dilakukan berbeda karena keberanian Sultan mengeritik SBY secara terbuka. Sikap itu tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur lain; (3) Harian umum *Kompas* yang tidak pernah memberitakan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Sultan selama menjabat menjadi Gubernur DIY; dan (4) Pemberitaan *Kompas* atas polemik yang dilontarkan oleh kubu Istana dengan kubu Yogya yang sangat menarik perhatian.

Kelebihan peneliti ini dapat dilihat dari sudut politik, peneliti mampu dalam menganalisis setiap kalimat berita dalam *Kompas* yang mengandung pertentangan antara SBY vs Sultan Yogya. Harian umum *Kompas* mengemas beritanya seolah-olah persetruan yang terjadi adalah persetruan antara SBY melawan rakyat Yogyakarta. Sultan digambarkan sebagai seorang raja yang nyaris sempurna di mata rakyatnya. Walau kita ketahui melalui media tentang beberapa kepala daerah di tanah air yang tersangkut kasus hukum, tetapi hal itu tidak terjadi pada Sultan Yogya.

Beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian Irfan (dikodekan L) dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya (dikodekan B). Persamaannya hanya pada objek kajian berupa analisis wacana kritis teks media. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut: (1) sumber data objek kajian penelitian L bersumber dari harian *Kompas* sedangkan penelitian B bersumber dari harian *Lombok Post*; (2) teori yang digunakan penelitian L adalah eori Anaisis Framing, sedangkan penelitian B menggunakan teori AWK Teun van Dijk; dan (3) penelitian L difokuskan pada analisis terhadap keberpihakan media *Kompas* pada RUUK-DIY, sedangkan penelitian B difokuskan analisis makna yang terdapat pada eufemisme dalam judul sebuah berita. Perbedaan-perbedaan tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan kajian terhadap media HLP dengan menggunakan AWK teori Teun van Dijk..

* + 1. Artikel yang ditulis oleh Anang Santoso tahun 2008 berjudul “Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis”.

Artikel tersebut berisi harapan agar pemikiran Halliday mendapatkan tempat yang layak dalam dunia linguistik Indoesia, sekaligus diaplikasikan sebagai tata bahasa pendidikan. Kelebihan dalam artikel ini adalah diuraikannya secara rinci dan jelas berbagai konsep pemikiran dan pandangan Halliday dalam bidang linguistik. Dua pandangan Halliday yang dimaksud adalah “bahasa sebagai semiotika sosial dan linguistik sebagai tindakan”. Pandangan Halliday tentang kajian bahasa sebagai semiotika disebutkan begitu rinci dan jelas. Hal tersebut meliputi: (1) teks, (2) trilogi konteks situasi (medan wacana, pelibat wacana dan modus wacana), (3) register, (4) kode, (5) sistem lingual, yang mencakup komponen ideasional, dan tekstual, serta (6) struktur sosial. Dan pandangan Halliday tentang ‘linguistik sebagai tindakan.

Selanjutnya, Santoso menyebutkan bagaimana jejak Halliday dalam analisis wacana kritis. Pandangan Halliday tersebut dapat ditemukan pada kajian beberapa pakar AWK yang mengacu pada pandangan Halliday. Pakar AWK seperti van Dijk dan Fairclough. Jadi artikel ini sangat cocok dibaca oleh para pemerhati bahasa dan mahasiswa jurusan bahasa.

Adapun kekurangan dari artikel yang ditulis oleh Santoso ini adalah penjelasan pandangan Halliday ini tidak dilengkapi dengan contoh konkrit mengenai bentuk-bentuk pandangan Halliday tersebut. Para pemerhati bahasa yang masih awam akan merasa hampa dan mempertanyakan tentang konsep tersebut. Setidak-tidaknya ditampilkan satu atau dua baris kalimat yang menjadi contoh pada setiap pembahasan.

Penelitian kali ini akan menghadirkan secara lebih rinci dan jelas diserta dengan contoh konkrit mengenai analisis wacana kritis. Salah satu pandangan Halliday mengenai AWK yang dikembangkan oleh van Dijk akan dijadikan sebagai teori analisis. Pada penelitian ini akan menganalisis penggunaan *eufemisme* pada media harian *Lombok Post*.

* + 1. Penelitian yang dilakukan oleh Windaningsih tahun 2009 berjudul ” Marginalisasi Perempuan dalam Pemberitaan Harian *Jawa Post* Tentang Pekerja Migran Perempuan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Pemberitaan Harian *Jawa Post* tentang Pekerja Migran Perempuan Indonesia Tahun 2009)”

Penelitian difokuskan pada berita-berita harian *Jawa Pos* yang memarginalkan perempuan. Empat hal yang menjadi fokus penelitian, yaitu penggunaan kata dan bentuk kata, sistem produksi berita yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya masyarakat, dan ideologi patriarki dan feodalisme.

Analisis secara kritis wacana pada pemberitaan Harian *Jawa Pos* tentang Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PMPI) oleh Windaningsih tersebut menggunakan teori Norman Fairclough, disimpulkan bahwa (1) Perempuan direalisasikan tidak setara dengan laki-laki serta dikonstruksikan tergantung pada laki-laki sehingga kehidupan perempuan didominasi oleh laki-laki.(2) Sistem produksi berita dilakukan dalam lingkungan kerja yang didominasi laki-laki dan perempuan dilihat sebagai lahan garapan yang terbentang luas untuk dieksplorasi dalam pemberitaan. (3) Budaya patriarki cukup kental dalam masyarakat Jawa Timur, dominasi laki-laki sebagai sesuatu yang wajar karena sebagai kepala keluarga. (4) Ideologi feodalisme terlihat dari penggambaran bahwa orang dari tingkat sosial ekonomi tinggi selalu digambarkan mendominasi dan memiliki kuasa terhadap kelompok yang lebih rendah.

Penelitian terhadap marginalisasi Pekerja Migran hanya dilihat pada pengunaan beberapa kata yang diindikasikan terjadi pemarjinalan terhadap para pekerja perempuan Indonesia. Kata–akata yang dimaksud adalah kata *dihajar*, penulisan *status janda,* dan penggunaan *kalimat pasif* yang menunjukkan PMPI cendrung pasif menerima penyiksaan dari majikan. Penggunaan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan marginalisasi pekerja migran dalam penelitian Windaningsih tersebut tidak semuanya benar terutama pada frasa *status janda*. Status janda tidak selamanya diakibatkan oleh sikap pasif perempuan dalam menerima keputusan talak dari laki-laki. Sekarang ini tidak sedikit wanita lebih aktif meminta untuk diceraikan oleh suaminya. Bahkan beberapa kasus di pengadilan pihak wanita melakukan gugatan cerai pada suaminya.

Akan tetapi, pemarjinalan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia (PMPI) dapat juga ditentukan dengan melihat penggunaan majas atau pun diksi yang mengarah pada hal-hal pemarjinalan. Hal ini yang dirasakan masih kurang pada penelitian terhadap harian *Jawa Pos* yang dilakukan oleh Windaningsih. Dengann demikian, sangat tepat dilakukan penelitian terhadap penggunaan eufemisme pada media HLP dalam sebuah tinjauan analisis wacana kritis dan relevansinya dengan pembelajaran wacana.

* + 1. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Rubby dan Dardanila tahun 2008 dengan judul “ Eufemisme pada Harian *Seputar Indonesia”*

Hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk artikel yang termuat dalam Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume IV No.1 April Tahun 2008. Dalam artikel tersebut, Tia dan Dardanila menganalisis peggunaan eufemisme pada Harian *Seputar Indonesia* dengan menggunakan konsep Allan dan Burridge. Menurut Allan dan Burridge ada enam belas bentuk eufemisme.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan eufemisme oleh harian *Seputar Indonesia* ada tujuh bentuk. Data ketujuh bentuk peggunaan eufemisme tersebut telah dirinci dengan cukup jelas beserta persentase pemakaian. Bentuk eufemisme yang paling dominan digunakan oleh harian *Seputar Indonesia* adalah eufemisme berbentuk satu kata menggantikan kata yang lain sebanyak 10 data atau 40%. Sedangkan bentuk eufemisme yang paling sedikit digunakan harian *Seputar Indonesia* adalah eufemisme yang berbentuk singkatan sebanyak 1 data atau 4 %.

Penelitian terhadap penggunaan eufemisme pada harian *Seputar Indonesia* tersebut cukup jelas acuannya yaitu pandangan Allan dan Burridge sehingga tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam hasil penelitian. Namun sayang sekali, peneliti tidak menampilkan data-data pendukung yang cukup refresentatif untuk membuat sebuah simpulan sebagai hasil penelitian. Bila dibandingkan dengan jumlah bentuk eufemisme yang dikemukakan oleh Allan dan Burridge sebanyak 16 bentuk, sedangkan hasil temuan peneliti terhadap penggunaan eufemisme pada harian *Seputar Indonesia* hanya 7 bentuk. Hasil penelitian ini tentunya perlu dipertanyakan dan dapat dilakukan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Persamaan yang ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Rubby dan Dardanila dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji masalah penggunaan eufemisme pada teks berita. Sedangkan perbedaannnya, Rubby dan Dardanila hanya menganalisis bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan dalam harian *Seputar Indonesia*. Bentuk-bentuk eufemisme tersebut dijumlahkan dan persentasekan penggunaannya, tidak dilanjutkann dengan pengkajian makna yang terkanndung di dalamnya.

Sedangkan kajian terhadap penggunaan eufemisme yang terdapat pada teks berita HLP adalah untuk melihat dan mengkaji penggunaan eufemisme yang berbentuk kata atau frasa pada teks media HLP tersebut. Selanjutnya, kata atau frasa berbentuk eufemisme tersebut akan dianalisis untuk ditemukan makna atau maksud yang tersirat di dalamnya. Hal inilah yang dipandang perlu untuk dilakukan penelitian pada media HLP tentang penggunaan eufemisme yang akan difokuskan pada analisis teksnya.

* + 1. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto pada tahun 2009 berjudul “Gender dalam Kontruksi Media”

Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk artikel yang dimuat dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2009 pp.167-183. Diungkapkan bahwa media adalah salah satu instrumen utama dalam membentuk konstruksi gender pada masyarakat. Menurutnya, pengertian gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab, baik lelaki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Dicontohkan, keyakinan bahwa lelaki itu kuat, kasar, dan rasional, sedangkan perempuan lemah, lembut, dan emosional.

Selanjutnya, Haryanto menjelaskan dalam artikelnya, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh para pelaku media dalam menghasilkan jurnalisme berperspektif gender: 1) Masih rendahnya kemampuan profesional, etika, dan perspektif pelaku media massa terhadap permasalahan gender. Hal itu mengakibatkan belum mampu mmengangkat permasalahan perempuan, rasa empati terhadap ketidakadilan pada perempuan. 2) Belum mampu mandiri, terlepas dari kepentingan penguasa (pemerintah, organisasi, atau pun pemilik modal). 3) Kurangnya keterlibatan perempuan secara aktif dalam media massa sehingga perempuan sulit keluar dari posisi keterpurukannya. 4) Perlunya pengubahan paradigma pada media massa tentang pencitraan yang selama ini dipakai, cendrung seksis, objek iklan, objek pelecehan, ratu dll.

Hal yang dikemukakan oleh Haryanto dalam artikelnya mengenai prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh para pelaku media massa sudah cukup jelas. Namun masalah gender dalam konstruksi media dapat juga dilihat dari perspektif yang lain yaitu perspektif majas. Sebetulnya, penggunaan majas sudah banyak digunakan orang dalam menggambarkan sosok perempuan dalam posisi yang lemah. Hal ini rupanya yang belum diungkap oleh Hariyanto dalam artikelnya. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian yang akan dilakukan berikut ini, akan mengamati penggunaan majas eufemisme pada penulisan wacana pada media HLP. Penelitian kali ini akan menganalisis secara kritis struktur mikro pada teks wacana yang terdapat pada rubrik politik dan hukum.

* + 1. Penelitian yang dilakukan oleh Gustianingsih tahun 2006 berjudul “Analisis Wacana Pada Media Cetak Perspektif LFS dan Representasi Semiotik”

Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk artikel yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume II No. 2 Oktober Tahun 2006. Penelitia tersebut mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sistem arti dan sistem ekspresi. Sistem arti dan sistem ekspresi didasarkan pada dua konsep, yaitu: 1) bahasa merupakan fenomena sosial yang wujudnya sebagai semiotik sosial, dan 2) bahasa merupakan teks yang berkonstrual dengan konteks sosial.

Analisis terhadap wacana berita media cetak *Kompas*yang bertajuk “Presiden Pertimbangkan Saran Kenaikan Gaji PNS. Analisis wacana berita dipokuskan pada penganalisisan klausa dan membagi wacana ke dalam 42 klausa. Sebagi sampel, diambil sebanyak 30% atau 14 klausa. Tiap-tiap klausa dianalisis dengan konsep konteks situasi yang meliputi isi (field), pelibat (tenor), cara (mode), hubungan logis.

. Penelitian yang telah dilakukan oleh Gustianingsih dalam artikel tersebut sangat jelas dan rinci. Hasil penelitiannya terhadap masing-masing unsur dalam klausa tersebut dapat dirinci. Unsur isi dalam klausa didominasi oleh proses material sebanyak 64, 29%, partisipan jenis mahluk sebanyak 53,84%, dan sirkumstan lokasi sebanyak 40%. Unsur pelibat (tenor) adalah fungsi ujar pertanyaan dan pernyataan masing-masing sebanyak 92,86 % dan 7,14%. Unsur cara (mode) yang terdiri atas unmarked simple theme 50%, marked simple theme 7,14%, unmarked complex thema 28,57%, dan marked complex theme 14,29%. Sirkumstan yang terdiri atas lokasi 40%, penyerta 30%, rentang 20%, dan cara 10%. Sedangkan unsur hubungan logis yang didominasi oleh tipe paraktasis sebanyak 37,50%.

Adapun yang membedakannya dengan penelitian yang akan dilakukan berikut ini adalah landasan teori. Kalau pada penelitian dalam artikel tersebut menggunakan teori LFS yang menganalisis kalimat berdasarkan sistem arti dan sistem ekspresi. Sedangkan landasan teori pada tesis ini menggunakan teori AWK versi Teun van Dijk yang menganalisis teks sebagai sebuah kognisi sosial.

2.1.6 Penelitian yang dilakukan oleh Monika Wutun pada tahun 2012 dengan judul “*Analisis Berita Politik Tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur di Media Cetak (Studi Analisis Wacana Model teun A. Van Dijk pada Headline Pemberitaan Di surat Kabarharian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express dalam Perspektif Public relations Politik Periode Agustus – September 2012).*

Penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan tampilan citra Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya. Hasil penelitian menyimpulkan sebagian besar media massa di NTT memberitakan Gubernur dengan tampilan citra positif yang terwakilkan lewat Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express.

Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wutun dengan penelitian yang akan dilakukan berikut ini adalah (1) kajian teks sama-sama menggunakan analisis wacana kritis; (2) sama-sama menggunakan teori model AWK model Teun A. Van Dijk.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Wutun dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: (1) Wutun menggunakan Surat Kabar *Harian Pos Kupang* dan *Harian Pagi Timor Express* sebagai sumber data kajian; (2) tiga unsur dalam AWK model Teun van Dijk (teks, kognisi sosial, dan analisis sosial) digunakan seluruhnya dalam analisis teks; (3) kajian difokuskan pada masalah *Public Relations Politik*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada: (1) media koran *Lombok Post* sebagai sumber data kajian; (2) kajian unsur mikro dari teks berita, dan; (3) analisis terhadap penggunaan eufemisme dalam teks berita media harian *Lombok Post*.

* 1. **Definisi Operasional** 
     1. **Eufemisme**

Eufemisme termasuk dalam kajian semantik yang merupakan salah satu bagian dari majas atau gaya bahasa. Majas eufemisme merupakan majas yang menggunakan bahasa yang ditujukan untuk memperhalus makna dari sesuatu maksud yang disampaikan. Penggunaan eufemisme dalam komunikasi antar- masyarakat tampaknya merupakan sebuah kelaziman. Hal ini terlihat dalam keseharian masyarakat dalam menggunakan kata-kata yang lebih halus atau lebih sopan, seperti penggunaan kata *tiang* (saya), *pelungguh* (anda), *sampun* (sudah*), dll.* Kata-kata tersebut digunakan (diselipkan) dalam sebuah komunikasi sebagai bentuk penghormatan kepada lawan bicara dan sebaliknya pembicara merendahkan diri pada lawan bicara. Di samping itu, penggunaan kata-kata di atas juga dapat menunjukkan kelas sosial pemakainya dalam masyarakat (Sasak).

Selain pemakaiannya sepererti dalam bahasa Sasak di atas, bentuk penggunaan eufemisme yang lain dapat dilihat dalam beberapa kosa kata. Sebagai contoh, kata ‘*miskin*’ dapat diperhalus (eufemisme) dengan kata ‘prasejahtra’, kata ‘*bodoh*’ diperhalus dengan frase ‘ *kurang akal’,* kata ‘*menjiplak’* dapat diperhalus dengan kata *‘plagiat’* dan lain sebagainya. Mencermati beberapa contoh penggunaan eufemisme di atas, menunjukkan bahwa eufemisme antara lain dapat berupa kata ganti, kata keterangan, kata sifat atau pun kata kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa eufemisme itu sangat berfariasi, baik dalam bentuk maupun asal bahasa (tidak saja dari bahasa Indonesia, tetapi bisa juga dari bahasa asing).

* + 1. **Analisis Wacana Kritis**

Analisis wacana kritis adalah salah satu bentuk kajian yang lebih spesifik dan mendalam terhadap sebuah wacana. Wacana yang merupakan hasil dari sebuah kolaborasi yang dilakuan oleh penulis terhadap peristiwa tertentu dengan situasi, institusi dan sosial masyarakat. Kolaborasi tersebut menghasilkan makna yang kadang sulit dipahami oleh pembaca awam. Hal ini merupakan celah yang dapat dimanfaatkan pembaca untuk ditemukannya berbagai makna yang terkandung dalam sebuah wacana. Peluang pembaca terbuka lebar untuk menghadirkan makna lain di luar makna teks sesuai dengan persepsi dan sudut pandangnya. Walau demikian, pemaknaan tetap dalam koridor yang dapat ditoleransi yang mengacu pada konteks dasar (konteks sosial) yang membangun wacana tersebut.

Analisis wacana kritis merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengkaji dan memahami penggunaan bahasa dalam sebuah teks wacana secara lebih serius. Penggunaan bahasa oleh para wartawan dilakukan secara lebih bebas sesuai dengan motivasi dan tujuan penulisan. Tujuan penulisan sebuah teks berita tidak lepas dari berbagai pengaruh luar, seperti penguasa, organisasi tertentu, agama, dan ideologi. Melihat latar belakang di atas, analisis wacana kritis memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani penulis dengan pembaca. Studi ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan pencerahan dan pembelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan mudah memahami hal yang ingin disampaikan oleh wartawan dalam sebuah teks berita.

Sebagai acuan landasan oprasional dalam melakukan analisis kritis terhadap data teks berita pada media harian *Lombok Post,* peneliti menghadirkan terkaait dengan kajian Hallidayan tentang penggunaan bahsa dalam organisasi (dalam Tischer. 2009:236).

Fowler dkk. (dalam Badara.2012:54-55) menjelaskan, menganalisis pengalaman dan politik yang berbeda dapat dilihat dari bahasa yang dipakai, yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial terjadi. Arti penting klasifikasi ini dapat dilihat dari bagaimana sebuah peristiwa yang sama dapat dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, pristiwa pemerkosaan dapat dikatan dengan kata *memerkosa, meniduri, menggagahi, memerawani,* dan sebagainya. Hal tersebut menggambarkan suatu peristiwa yang sama dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kata-kata yang berbeda tersebut tidaklah dipandang semata teknis, tetapi sebagai suatu praktik ideologi tertentu. Bahasa yang berbeda tersebut akan menghasilkan realitas yang berbeda pula ketika diterima oleh khalayak. Pemakaian bahasa dipandang tidak netral karena membawa implikasi ideologi tertentu. Teks memproduksi “posisi pembaca” untuk khalayak, dalam arti menyediakan perspektif bagaimana suatu teks harus dibaca dan dipahami—meskipun pemaknaan suatu teks melibatkan juga hubungan transaksional dengan pembaca.

Pilihan kata dipertanyakan bagaimana peristiwa dan aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut dibahasakan. Penamaan itu berhubungan dengan paling tidak tiga aspek yaitu: (a) ada aspek ideologis pada pilihan kosa kata yang digunakan; (b) aktor tertentu yang dibahasakan dengan kata-kata tertentu; dan (c) pemaknaan yang diterima oleh khalayak berdasarkan pilihan kata yang digunakan.

* + 1. **Pembelajaran Wacana di SMP**

Materi wacana pada pelajaran bahasa Indonesia dibelajarkan pada semua jenjang pendidikan termasuk di tingkat sekolah menengah pertama. Materi pembelajaran wacana terkafer dalam standar kompetensi yang ada pada kurikulum. Materi wacana diajarkan pada semua tingkatan kelas, mulai dari kelas tujuh sampai dengan kelas sembilan. Khusus kelas sembilan, materi wacana ini tertuang dalam standar kompetensi (SK): memahami ragam wacana tulis dengan membaca intensif dan membaca memindai. SK ini dibelajarkan pada semester ganjil.

Beberapa indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai siswa dalam pembelajaran. Siswa diharapkan mampu mendata fakta yang terdapat dalam sebuah teks. Siswa diharapkan mampu mendata opini yang terdapat dalam teks. Dan selanjutnya siswa diharapkan mampu membedakan fakta dan opini yang terdapat dalam sebuah teks. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran wacana di sekolah lanjutan tingkat pertama.

* 1. **Teori** 
     1. **Semantik**

Semantik adalah kajian tentang makna (Winfried. 2006:103), Hurford dan Hearsly (dalam Subroto, 2011:1) menjelaskan bahwa semantik mengkaji arti di dalam bahasa. Arti di dalam bahasa itu disebut arti bahasa atau arti lingual. Arti bahasa itu merupakan objek kajian semantik.

Subroto (2011:31) menguraikan jenis arti dan kaitannya dengan jenis-jenis semantik ke dalam enam jenis. Keenam jenis arti tersebut dalah sebagai berikut:

1. **Arti Leksikal**

Arti leksikal adalah arti yang terkandung dalam kata-kata sebuah bahasa yang lebih kurang bersfat tetap dan dapat ditemukan dalam sebuah kamus. Arti leksikal berkaitan dengan arti leksikal kata-kata tunggal. Arti kata-kata “kursi”, “rumah”, “gemuk”, dan sebagainya mengacu pada makna yang sebenarnya (kursi= benda berkaki terbuat dari kayu dan yang lainnya digunakan sebagai tempat duduk), (rumah = sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal), (gemuk= keadaan tubuh manusia atau hewan yang memiliki banyak daging dan berlemak).

Menurut Chaer (2007:117) Makna leksikal, makna yang bersifat leksikon, secara inhereen dimiliki oleh stiap laksem.

1. **Arti Struktural atau arti Gramatikal**

Arti struktural atau arti gramatikal adalah arti yang timbul karena relasi satuan gramatikal baik dalam konstruksi morfologi, frase, klausa/kalimat. Imbuhan *ber-* ditambahkan pada kata *–baju* dalam *berbaju* menimbulkan arti memakai baju.

1. **Arti Kalimat (*Sentence Meaning*) dan Arti Tuturan (*Utterance Meaning*)**

Istilah kalimat pada umumnya dikaitkan dengan studi linguistik, sedangkan istilah tuturan/ujaran dikaitkan dengan studi pragmatik.

1. **Arti Wacana**

Pengertian “wacana” disamakan dengan teks. Yaitu, satuan pemakaian bahasa yang utuh yang tingkatannya berada di atas kalimat. Namun sebuah wacana dapat juga terdiri atas satu/sebuah ujaran utuh. Misanya, ujaran orang minta tolong “Tolog! Tolong! Copet!”. Meskipun berwujud ujaran pendek, namun sudah berwujud wacana utuh karena mengungkapkan maksud yang utuh. Adapun ciri penting adanya sebuah wacana adalah adanya ikatan atau jalinan informasi dari kalimat-kalimat yang membangunnya.

1. **Arti Cultural (*Cultural Meaning*)**

Arti cultural sebuah bahasa adalah arti yang secara khas mengungkapkan unsur-unsur budaya dan keperluan budaya secara khas aspek kebudayaannya. Arti kultural begitu khas sehingga tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

1. **Arti Literal dan Non-Litral**

Arti literal berkaitan dengan arti kata-kata yang bersifat lugas (arti yang sebenarnya) dan arti struktur satuan-satuan gramatikal yang membangun tuturan. Cantoh kaliamat yang mengandung arti leteral (arti yang sebenarnya) “dia duduk di kursi”. Dalam kalimat tersebut, penutur ingin menginformasikan keadaan yang sebenarnya. Setiap bahasa memiliki piranti dan perlengkapan yang dapat dimanfkan oleh penggunanya untuk keperluan ekspresinya.

Sementara itu, arti non-literal berkaitan dengan arti kiasan, arti idiomatik, arti metaforik sebuah tuturan. Arti non-literal ini digunakan untuk motivasi yang mengacu pada makna khusus. Contoh dalam kalimat “Mereka bertengkar berebut kursi”, “berebeut kursi” berarti berebut jabatan dalam rangka memperoleh kelebihan materi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semantik merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna secara umum. Kajiannya mencakup makna leksikal, makna struktural, makna dalam kalimat, makna dalam teks, makna kultural, dan makna literal atau nonliteral. Makna nonliteral ini akan menjadi pijakan kajian dalam penelitian ini.

* + 1. **Eufemisme**

Kata *eufemisme* atau *eufemismus* diturunkan dari kata Yunani *euphemizein* yang berarti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik”. Sebagai gaya bahasa, *eupemisme* adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kalimat-kalimat berikut ini.

*Ayahnya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka ( = mati).*

*Pikiran sehatnya semakin merosot saja akhir-akhir ini ( = gila).*

*Anak saudara memang tidak terlalu cepat mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya ( =bodoh).* Keraf, 2010 :132.

Sementara itu, **Wijana dan Rohmadi**, ( 2011:79) dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa eufemisme bermacam-macam wujudnya. Refrensi itu antara lain: (1) benda dan binatang, (2) bagian tubuh, (3) profesi, (4) penyakit, (5) aktivitas, (6) peristiwa, (7) sifat atau keadaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa digunakannya eufemisme dalam kalimat diperoleh lima manfaat, yaitu (1) sebagai penghalus ucapan, (2) untuk merahasiakan sesuatu, (3) untuk berdiplomasi, (4) sebagai alat pendidikan, dan (5) sebagai penolak bahaya. **Santoso** ( 2012:147), ekspresi eufemisme adalah ungkapan kebahasaan yang bertujuan untuk memperhalus sebuah keadaan sehingga apa yang ditangkap oleh pendengar tidak sama dengan keadaan aslinya.

**Muhammad,** (dalam Djojosuroto, 2007:412) eufemisme hanyalah peralihan kata saja. Hal ini didasarkan pada contoh kata-kata: *pelacur, wanita P, WTS.* Menurut Goenawan Mohamad, tiga kata itu menunjuk realitas yang persis sama. Seorang pelacur niscaya tak bertambah mania kalau dipanggil dengan sebutan WTS. **Alfian** (dalam Djojosuroto, 2007:411) mengemukakan – pada hemat saya- menunjuk segi bahasa dalam hakekatnya sebagai suatu konsesnsus sosial. Berarti, antara dua orang atau lebih sebetulnya telah terdapat kesepakatan bahwa kata x berarti y. Akan tetapi pada kesepakatan yang lain bisa saja ada kesepakatan baru bahwa kata x berarti z. Kata *basah* yang aslinya berarti “keadaan suatu benda yang kena air,” dalam lingkungan birokrasi berarti “keadaan suatu kedudukkan yang banyak kemungkinan fasilitasnya.” Dalam konteks tertentu kata basah berarti “tidak kering,” dalam konteks lain kata basah berarti banyak kesempatan untuk mendapat rezeki.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eufemisme merupakan suatu bentuk kreatifitas penggunaan bahasa oleh seseorang dengan maksud memperhalus kata agar tidak memunculkan respon negatif (tersinggung) dari orang yang dimaksud dalam tulisan. Hal tersebut juga untuk menunjukkan sikap yang lebih manusiawi kepada orang lain (orang yang dimaksud dalam tulisan). Perlu diingat bahwa apa yang dimaksud oleh penulis dalam tulisannya akan dapat dipahami oleh pembaca bila terdapat kesepakatan.

Analisis tentang penentuan bentuk eufemisme pada media harian *Lombok Post,* peneliti menggunakan pandangan Allan dan Burridge (1991:14). Eufemisme dibagi ke dalam 16 bentuk. Namuun tidak semua bentuk eufemisme tersebut muncul dalam teks berita harian Lombok Post. Adapun bentuk-bentuk eufemisme menurut Allan dan Burridge adalah sebagai berikut:

1. Ekspresi figuratif (Figurative expression), yaitu bersifat perlambangan, ibarat atau kiasan sesuatu dengan bentuk yang lain.

Contoh: *go to the happy hunting grounds* 🡪dia ‘meninggal’

1. Metafora (Methafor), yaitu perbandingan yang implisit di antara dua hal yang berbeda.

Contoh: *the miraculaos pitcher that hold water with the mouth down word 🡪* vagina

1. Flipansi (Flippancy), yaitu menghaluskan suatu kata, tetapi makna kata yang dihasilkan di luar pernyataan.

Contoh: *kick the bucket* -> meninggal

1. Memodelkan kembali (*Remodeling*), yaitu pembentuk ulang.

Cotoh: *shoot sheet* 🡪 *shit* ‘kotoran’

1. Sirkumlokusi (*cirkumlocutions*), yaitu penghalusan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang dan bersiat tidak langsung.

Contoh: *little girl’s room* 🡪toilet ‘wc’

1. Kliping (*clipping*), yaitu pemotongan, membuat menjadi pendek atau singkat.

Contoh: *Jeeze 🡪 Jesus* ‘Tuhan Yesus’

1. Akronim (*accronym*), yaitu penyingkatan atas beberapa kata menjadi satu.

Contoh: snaru 🡪 normal situation ‘situasi normal’

1. Singkatan (*Abbreviations*), yaitu singkatan kata-kata menjadi beberapa huuruf.

Contoh: *S.O.B🡪 son of a bitch* ‘anak seorang pelacur’

1. Pelesapan (*Omission*), yaitu menghilangkan sebagian kecil.

Contoh*: I need to go 🡪 I need to go to the lavatory* ‘saya mau ke belakang’.

1. Satu kata untuk menggantikan satu kata yang lain (*one for one substitutions*).

Contoh: *bottom 🡪 ass* ‘pantat’

1. Umum ke khusus (*general for spesific*), kata yang umum menjadi kata yyang khusus.

Contoh: *go to bed 🡪 fuck* ‘bersenggama’

1. Sebahagian untuk keseluruhan (*part for whole euphemisms*), yaitu kata yang khusus menjadi kata yang umum.

Contoh: *stuffed up nose, postnasal drip running eyes 🡪 I ‘ve got a fever* ‘saya demam’

1. Hiperbola (*hyperbole*), yaitu ungkapan yang melebih-lebihkan.

Contoh: *flight to glory 🡪 death* ‘meninggal’

1. Makna di luar pernyataan (*understatement*), yaitu satu makna kata yang terlepas dari makna kata tersebut.

Contoh: *genitas, bulogate, etc* 🡪 thing ‘sesuatu’

1. Jargon, yaitu kata yang memiliki makna yang sama tetapi berbeda bentuk.

Contoh: *feces 🡪 shit* ‘kotoran’

1. Kolokial (*colloquial*), yaitu ungkapan yang dipakai sehari-hari.

Contoh: *period* 🡪 *menstruate* ‘menstruasi’

* + 1. **Wacana**

Mengawali pembahasan tentang analisis wacana kritis, dikemukakan beberapa konsep wacana yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.Menurut Vass (dalam Stefan,dkk. (2009:42) secara etimologis kata ’wacana’ (discourse) berasal dari bahasa latin discurrere (mengalir ke sana kemari) dari nominalisasi kata *discursus* (‘mengalir secara terpisah’ yang ditransfer maknanya menjadi ‘terlibat dalam sesuatu’, atau memberi informasi tentang sesuatu’). Menurut Schiffrin ( 2007), wacana dilihat sebagai sebuah sistem (sebuah cara berbicara yang diatur oleh sosial dan budaya) melalui fungsi-fungsi tertentu diwujudkan. Fairclaugh (dalam Stefan. 2009:240) yang membandingkan teks dengan wacana. Menurutnya “teks” digunakan untuk mengacu pada produk dari proses penciptaan teks, sebaliknya gagasan ‘wacana’ lebih besifat informatif dan relevan dibandingkan istilah ‘teks’ karena CDA tidak menganalisis teks tetapi wacana. Wacana memiliki penerapan yang lebih luas dibandingkan teks. “Akan tetapi saya akan menggunakan istilah wacana untuk mengacu pada keseluruhan proses interaksi sosial dan tempat teks hanyalah merupakan bagiannya”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa wacana (kata benda abstrak) – “penggunaan bahasa dianggap sebagai praktik sosial” (lihat Jorgensen, 2010:116).

Lebih lanjut pengertian wacana menurut van Dijk (dalam Stefan, 2009:43) yang memandang wacana umumnya sebagai teks dalam konteks dan sebagai bukti yang harus diuraikan secara empiris. Van Dijk menunjuk ke satu aspek yang sangat penting, yaitu bahwa wacana itu hendaknya dipahami sebagai tindakan. Foucault (dalam Sobur. 2012), membedakan pengertian wacana menjadi tiga macam, yakni wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan.

1. Berdasarkan konseptual teoritis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata.
2. Konteks penggunaannya, wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Pengertian ini menekankan pada upaya untuuk mengidentiifikasi struktur tertentu dalam wacana, yaitu kelompok ujaran yang diatur dengan suatu cara tertentu, misalnya wacana imperialisme dan wacana feminisme.

c. Metode penjelasannya, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

Pendapat Edmonson, (dalam Fatimah, 2010), wacana adalah satu peristiwa yang terstruktur diwujudkan dalam perilaku linguistik (bahasa) atau yang lainnya. Dalam hal ini wacana sangat terkait dengan peristiwa yang terstruktur, dan lebih jauh dijelaskan pula bahwa teks adalah urutan- urutan ekspresi linguistik yang terstruktur membentuk keseluruhan yang padu (uniter) dari teks terstruktur.

Webster (dalam Sobur, 2009:9-10) wacana adalah (1) komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan; konversasi atau percakapan, (2) komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subyek studi atau pokok telaah, dan (3) risalat tulis; desertasi formal; kuiah; ceramah; khotbah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan pengertian wacana. Wacana merupakan sebuah pernyataan terstruktur dalam bentuk lisan atau tulisan yang mengandung makna dan efek yang digunakan untuk berbagai keperluan. Pernyataan tersebut mengemukakan satu hal sebagai sebuah gagasan di dalamnya yang dapat dipahami secara teks maupun konteks. Dalam penelitian ini, wacana dilihat sebagai sebuah teks dalam sebuah teks berita yang terdapat dalam media harian *Lombok Post*.

* + 1. **Analisis Wacana**

Beberapa konsep tentang analisis wacana yang dapat dikemukakan dalam rancangan penelitian ini diambil dari beberapa pendapat. Menurut Jorgensen dan Philips (2010:1) analisis wacana merupakan analisis atas pola-pola tertentu. Bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika ambil bagian dalam domain-domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya dalam domain “wacana medis” dan “wacana politik”. Stubbs (dalam Yoce, 2013), analisis wacana adalah satu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi. Sementara itu menurut Laclau dan Mouffe (dalam Jorgense. 2010:50) wacana merupakan usaha untuk menghentikan tergelincirnya hubungan satu tanda dengan tanda yang lain dan dengan demikian untuk menciptakan sistem makna yang padu. Semua kemungkinan yang ditiadakan oleh wacana itu disebut medan kewacanaan.

Selanjutnya menurut Gee (2010:117):

*discourse analysis is based on the details of speech (and gaze and gesture and actions) or writing that are arguably deemed to the relevant in the context and that are relevant to the arguments the analysis is attempting to make. A discourse analysis is not based on all the physical features present, not even on all those that might, in some conceivable context, be meaningful, or might be meaningful in analyses with different purposes. Such judgments of relevance (what goesinto a trancript and what does not)are ultimately theoretical judgments, that is, they are based on the analyst's theories of how language, context , and interactions work in general and in the specific.*

Konsep analisis wacana yang dikemukakan oleh Gee tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Analisis wacana didasarkan pada rincian pidato (dan tatapan dan gesture dan tindakan) atau tulisan yang bisa dibilang dianggap relevan dalam konteks dan yang relevan dengan argumen analisis mencoba untuk membuat. Analisis wacana tidak didasarkan pada semua fitur fisik hadir, bahkan tidak pada semua orang yang mungkin, dalam beberapa konteks dibayangkan, bermakna, atau mungkin bermakna dalam analisis dengan tujuan yang berbeda. Penilaian tersebut relevan (apa yang masuk ke trancript dan apa yang tidak) pada akhirnya pertimbangan teoritis, yaitu, mereka didasarkan pada teori analis tentang bagaimana bahasa, konteks, dan interaksi bekerja secara umum dan dalam konteks tertentu yang sedang dianalisis. Dalam pengertian ini, transkrip adalah entitas teoritis. itu tidak berdiri di luar analisis, tetapi lebih merupakan bagian dari itu.

Mencermati beberapa pendapat di atas, analisis wacana adalah sebuah kajian terhadap pemakaian bahasa baik lisan maupun tulisan untuk menemukan makna atau maksud tertentu dari penulis. Dalam hal ini, analisis wacana akan dilakukan pada pemakaian bahasa tulis yang terdapat dalam teks berita media harian *Lombok Post.*

* + 1. **Analisis Wacana Kritis**

Berikut ini dikemukakan beberapa konsep analisis wacana kritis yang diambil dari para pakar analisis wacana.

Menurut Fairchlough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan – sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan (dalam Eriyanto. 2001:7, Tischter, 2009:241, Jorgensen, 2010:122, Yoce, 2013:51).

Teun van Dijk (dalam Yoce, 2013:51, dalam Santoso, 2012:119) mengemukakan bahwa analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai fakta penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa bahasa merupakan salah satu akar persoalan secara keseluruhan, maka pengkajian aspek linguistik tehadap bahasa adalah penting.

Selanjutnya van Dijk (1996:352) menjelaskan:

*Critical discourse analysis is a type of discourse analytic research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced , and resisted by text and talk in the social and polytical context. With such dissident research, critical discourse analysits take explicit position, and thus want to understand, expose, and ultimately rasist social inequality.*

Konsep AWK yang dikemukakan oleh van Dijk tersebuut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Analisis wacana kritis adalah jenis wacana penelitian analitik yang terutama mempelajari cara penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan ditentang oleh teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan polytical. Dengan penelitian pembangkang tersebut, analysits wacana kritis mengambil posisi eksplisit, dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan akhirnya rasist kesenjangan sosial.

Berdasarkan kedua pendapat ahli analisis wacana kritis di atas, dapat disimpulkan bahawa analisis wacana kritis merupakan kajian terhadap penggunaan bahasa sebagai fakta penting dalam sebuah wacana. Bahasa-bahasa tersebut digunakan oleh kelompok sosial tertentu dengan tujuan positif atau negatif bagi pihak yang lain. Dengan demikian bahasa yang digunakan dalam sebuah teks berita tidak secara transparan. Makna kata dalam kalimat tidak dapat ditangkap/ dipahami secara langsung. Kata-kata yang digunakan lebih bersifat meredam gejolak emosi pembaca dengan kata yang maknanya lebih halus atau sopan (eufemisme). Dalam hal ini, teori AWK model Teun A. Van Dijk yang sangat memadai untuk digunakan menganalisis sebuah teks berita harian *Lombok Post.*

**2.3.6 Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk**

Analisis terhadap teks wacana media HLP ini, peneliti akan menggunakan teori analisis wacana kritis model van Dijk. Model van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial” karena mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Menurutnya, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu. Istilah kognisi sosial sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks.

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangun: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis van Dijk di sini menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan perhatian melulu pada teks ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks berita itu diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu wartawan maupun dari masyarakat. Model analisis van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Analisis Wacana Kritis versi Teun A.van Dijk

**KONTEKS SOSIAL**

**KOGNISI SOSIAL**

**TEKS**

(*Sumber: Eriyanto, 2001:225)*

1. **Teks**

Van Dijk melihat teks terdiri atas tiga struktur/ tingkatan, yaitu: (1) struktur makro, merupakan makna global / umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita; (2) superstruktur, merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks (pendahuluan, isi, penutup, dan kesimplan); dan (3) struktur mikro, merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pulihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks (lihat Eriyanto.2001).

Penelitian ini akan mengkaji sebuah teks berita yang mengadung makna eufemisme dengan menggunakan salah satu unsur teks dari ketiga unsur yang terdapat dalam teori AWK model van Dijk. Unsur yang dimaksud adalah unsur struktur mikro yang merupakan makna lokal dari suatu teks. Unsur struktur mikro terdiri atas: (1) semantik; (2) sintaksis; (3) stilistik; dan (4) retoris. Dengan demikian, eufemisme yang terdapat dalam sebuah berita akan dianalisis untuk ditentukan jenis unsur mikro yang digunakan.

**Bagan Struktur Mikro Wacana**

**Elemen:** latar, detil, maksud, pranggapan, nominalisasi

**SEMANTIK:**

**Makna Teks**

**Elemen:** bentuk kalimat**,** kata ganti, koherensi

**SINTAKSIS :**

**Bentuk susunan kalimat teks**

**STRUKTUR MIKRO WACANA**

**Elemen:** leksikon

**STILISTIK:**

**Pilihan kata teks**

**Elemen:** grafis, metafora, ekspresi

**RETORIS:**

**Cara penekanan**

1. **Kognisi Sosial**

Kognisi sosial adalah kesadaran mental wartawan yang membentuk teks tersebut. Van Dijk tidak saja membatasi perhatiannya pada struktur teks, tetapi juga bagaimana sebuah teks itu diproduksi. Dalam hal ini, wartawan memasukkan informasi yang diguakan untuk menulis dari suatu bentuk wacana tertentu, seperti wawancara, laporan konfrensi pers, atau debat parlemen. Selanjutnya wartawan melakukan penafsiran, pemaknaan dan penyimpulan terhadap berbagai informasi tersebut yang selanjutnya dikemas dan diproduksi menjadi sebuah berita. Oleh karena itu, untuk mengetahui mengapa sebuah berita cendrung seperti itu, atau mengapa suatu peristiwa tertentu dimaknai dan dipahami dalam pengertian tertentu, dibutuhkan analisis kognisi sosial untuk menemukan struktur mental wartawan ketika memahami suatu peristiwa (lihat Eriyanto. 2001).

Penelitian ini tidak akan menganalisis unsur kognisi sosial dalam sebuah teks pada media harian *Lombok Post.* Hal ini didasari oleh keterbatasan waktu yang tersedia dalam penelitian. Di samping itu juga untuk lebih meningkatkan kualitas analisis terhadap penggunaan eufemisme dalam teks berita pada media harian Lombok Post.Unsur kognisi sosial tersebut akan dianalisis pada penelitian dalam kesempatan yang lain.

**c. Konteks Sosial (analisis sosial)**

Wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalamm masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis internal tekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang sesuatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Menurut van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting: kekuasaan (power), dan akses (*acces*).

1. Praktik kekuasaan, umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, seperti uang, status, dan pengetahuan. Selain berupa kontrol yang ersifat langsung dan fisik, juga berbentuk bersifat persuasif. Persuasif, berupa tindakan seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.
2. Akses mempengaruhi wacana, bagaimana akses masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan kelompok lain yang tidak berkuasa. Akses yang lebih besar bukan saja berkesempatan untuk mengontrol kesadaran khalayak yang lebih besar, tetapi juga menentukan topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan didiskusikan kepada khalayak (lihat Eriyanto, 2001).

Demikian juga dengan unsur konteks sosial dalam teori model van Dijk ini tidak akan dianalisis. Unsur tersebut dapat dilakukan pengkajian pada penelitian yang lain. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang oleh peneliti yang lain untuk pengkajian berikutnya.

**2.3.7** **Relevansi Kajian Terhadap Pembelajaran**

Menurut Watson (dalam Hill, 2009:46), pembelajaran sebagai pengkondisian klasik. Kita terlahir dengan koneksi-koneksi stimulus- respon yang disebut sebagai refleks. Dicontohkan, bersin sebagai respon terhadap gangguan di hidung dan refleks tendangan lutut sebagai respon terhadap tepukan keras di lutut kita. Refleks-refleks inilah yang dimaksudkan merupakan perbendaharaan terhadap perilaku yang kita warisi. Watson lebih lanjut (dalam Budiningsih. 2005:22) menjelaskan, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Sejalan dengan Hull (dalam Budiningsih. 2005:23) mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruuh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muuncul dapat bermacam-macam bentuknya. Guthrie (dalam Budiningsih. 2005:23) menambahkan bahwa hukuman (*punishment*) memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Sementara itu menurut Skinner (dalam Budiningsih. 2005:23) pentingnya penguatan *(reinforcemant*) hukuman dalam teori belajarnya, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang teori belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah upaya pengkondisian lingkungan dengan memberikan stimulus kepada peserta didik dan selanjutnya peserta didik akan memberikan respon. Respon yang dapat diterima adalah tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Setiap akatifitas peserta didik tidak boleh lepas dari pengamatan pendidik agar dapat memberikan penguatan (reinfocemant).

Adapun pelaksanaan pembelajaran wacana di SMP, perlu diciptakan kondisi yang kondusif. Guru harus dapat memberikan stimulus yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran wacana. Stimulus dapat saja berupa nasihat dan penjelasan akan pentingnya sekaligus manfaat yang akan diperoleh bila siswa dapat menguasai materi wacana. Atau bila guru memiliki pengalaman yang posistif yang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai wacana (menjadi penulis, umpamanya) dapat dijadikan sebagai stimulus. Hal tersebut dapat memotivasi dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Bagaimanapun juga pembelajaran wacana sangat penting dalam kehidupan siswa untuk masa-masa belajar dan masa yang akan datang.

Adapun relevansi kajian dalam penelitian ini terhadap pembelajaran wacana di SMP terlihat pada silabus kurikulum KTSP yang diajarkan di kelas IX semester 2. Standar Kompetensi: 11 *Memahami ragam wacata tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif dan membaca cepat*. *Materi pembelajaran: cara menemukan gagasan dan implementasinya.* Dengan demikian pembelajaran tentang wacana merupakan materi yang sangat strategis (selalu dibutuhkan) dalam kehidupan dan sudah terintegrasi dalam kurikulum KTSP.

* + 1. **Kerangka Berpikir Penelitian**

Kerangka berpikir dalam penelitian, teori AWK model Teun A. Van Dijk akan digunakan untuk menganalisis beberapa hal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Bentuk-bentuk Eufemisme pada Media Harian *Lombok Post***

Penentuan bentuk-bentuk eufemisme yang terdapat pada media harian Lombok Post akan dilakukan dengan elemen struktur mikro wacana model van Dijk yang akan didukung oleh pandangan Allan dan Burridge. Elemen struktur mikro dalam teori AWK model van Dijk te rdiri atas semantik, sintaksis, stilistika, dan retoris. Sedangkan pandangan Allan dan Burridge dalam menentukan bentuk eufemisme pada sebuah teks terdiri atas 16 bentuk.

Bentuk-bentuk eufemisme dalam setiap rubrik berita akan diklasifikasikan berdasarkan teori dan pandangan di atas. Pengklasifiasian akan dilakukan dengan membuat sebuah model tabel klasifikasi. Dengan demikian akan terlihat bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan dalam setiap teks berita dan sekaligus dapat diketahui bentuk yang paling mendominasi dalam teks berita tersebut.

1. **Makna Eufemisme yang Terdapat dalam Teks Berita pada Rubrik Media**

**Harian *Lombok Post*.**

Penentuan makna eufemisme yang terdapat dalam teks berita setiap rubrik akan dilakukan melalui proses analisis dan pengkajian. Penganalisisan dan pengkajian mendalam setiap bentuk eufemisme dilakukan dengan memahami makna eksplisit dari setiap bentuk eufemisme dan dilanjutkan dengan pengungkapan makna implisit yang terdapat dalam setiap bentuk eufemisme tersebut. Penentuan makna implisit ini tentunya akan mengacu pada teori AWK model Teun A.van Dijk. Peneliti akan mengkaji *maksud* penulis pada setiap bentuk eufemisme pada judul teks berita dalam rubrik. Sedangkan teknis penganalisisannya dikolaborasikan dengan teknis yang dikembangkan oleh Fowler dkk (lihat Bab 2).

Diketahui bahawa penulis berita sering menyampaikan sebuah berita yang sifatnya merugikan pihak tertentu dengan cara yang tersamar dan eufemistik. Dengan demikian untuk penentuan makna eufemisme terlebih dahulu harus dipahami maksud tersembunyi yang sengaja dihilangkan atau tidak diungkapkan secara langsung oleh penulis teks berita.

1. **Pengintegrasian Teks Harian *Lombok Post* dengan Pengajaran Wacana di SMP.**

Pengintegrasian teks harian *Lombok Post* dengan pengajaran bahasa Indonesia di SMP tentunya mengacu pada kurikulum yang ada. Mengingat penelitian ini direncanakan awal tahun pelajaran 2012-13, maka pengintegrasian teks harian Lombok Post dengan pengajaran bahasa Indonesia di SMP mengacu pada kurikulum KTSP. Silabus kurikulum KTSP yang diajarkan di kelas IX semester 2 dengan Standar Kompetensi: 11 *memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca cepat. Adapun materi pembelajaran: cara menemukan gagasan dan imlpementasinya.*

Teks berita atau bacaan lain yang terdapat dalam media harian *Lombok Post* dijadikan sebagai alat, media, atau sumber belajar. Siswa diharapkan dapat menemukan gagasan, makna kata, atau yang lainnya melalui kegiatan membaca intensif, ekstensif ataupun membaca cepat. Hal tersebut sangat bergantung pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dengan demikian pengintegrasian penelitian ini dengan pembelajaran wacana di SMP sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

**Bagan Kerangka Berpikir**

**Teks Berita Harian *Lombok Post***

**Rubrik: Hukum &Kriminal, Ekonomi Bisnis, dan Politik**

**Pandangan Allan dan Burridge memiliki 16 bentuk eufemisme**

**Struktur Mikro AWK Teun van Dijk:**

**Semantik**

**Sintaksis**

**Stilistik**

**Retoris**

**Bentuk-bentuk Eufemisme ditentukan oleh:**

**Makna Eufemisme dalam Rubrik Teks Berita Harian *Lombok Post***

**Pengintegrasian dalam Pembelajaran Wacana di SMP**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Pendekatan / Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (deskriptif kualitatif dan kuantitatif). Alasan penggunaan pendekatan deskriptif adalah karena penelitian ini didasarkan pada fakta yang ada atau fenomena penggunaan eufemisme dalam penulisan teks wacana pada media harian *Lombok Post*, Bogdan dan Biklen (dalm Emzir, 2012). Selanjutnya data-data tersebut akan dideskripsikan menurut teori analisis wacana kritis Teun Van Dijk.

**3.2 Setting**

Penelitian ini dilakukan Mataram NTB karena objek dalam penelitian ini adalah media harian *Lombok Post* yang diterbitkan Mataram NTB. Objek dalam penelitian ini adalahberupa teks wacana tulisan, yaitu teks wacana yang terdapat pada rubrik media koran *Lombok Pos* periode Januari s.d. Mei 2013. Media harian *Lombok Pos* sebagai objek kajian karena media ini sangat populer di kalangan masyarakat Lombok dan NTB pada ummnya. Data diarsipkan (dokumentasi) setiap penerbitan harian, media koran *Lombok* *Pos* secara kontinu. Peneliti membatasi jumlah data koran *Lombok Pos* yang akan diteliti dengan pertimbangan efisiensi waktu.

Media harian *Lomok Post* sebagai objek kajian dalam penelitian ini diindikasikan menggunakan eufemisme dalam penulisan judul berita, satu sampai dua judul dalam rubrik setiap penerbitan. Namun, terkadang peneliti tidak menemukan adanya penggunaan eufemisme pada penulisan berita dalam satu penerbitan yang lain. Peneliti telah menginventarisasi media Harian *Lombok Post* (HLP) selama lima bulan ( 140 eksemplar) yaitu dari bulan Januari s.d. Mei 2013. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk mengambil tiga rubrik berita dalam media harian *Lombok Post* yang akan dijadikan objek kajian, yaitu rubrik Hukum dan Kriminal sebanyak 9 data, rubrik Ekonomi Bisnis sebanyak 10 data, dan rubrik Politika sebanyak 9 data.

Koran *Lombok Post* sebagai media cetak yang sangat populer di masyarakat NTB banyak memberitakan peristiwa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum dan beberapa peritiwa yang bersekala nasional serta internasional. Berita-berita tersebut dapat dijadikan sebagai media belajar oleh guru- guru bahasa Indonesia dalam membahas materi teks berita (wacana). Di samping itu, juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi para siswa dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

Penggunaan media koran *Lombok Post* sebagai media dalam pembelajaran wacana dilakukan pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini didasarkan pada pengalaman peneliti yang bertugas sebagai pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama (SMPN 1 Narmada).

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Patton, (dalam Emzir. 2010:66) mengungkapkan (dalam dokumen adalah bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan-catatn program; dan *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dan dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.

Berdasarkan pendapat Patton tersebut, teks berita yang terdapat dalam media koran *Lombok Post* ini termasuk dalam dokumen tertulis. Data-data yanng diambil dari dokumen tertulis dengan cara memfotokopi dan mempertahankan keaslian data. Bahhkan data yang ada disertai dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan keaslian data.

Kegiatan pendokumentasian koran *Lombok* *Post* dilakukan selama lima bulan, yaitu dari bulan Januari s.d. bulan Mei 2013 (5 bulan). Penentuan jumlah bulan ini didasarkan pada pengalaman peneliti saat melakukan observasi awal penemuan eufemisme pada media koran *Lombok Post* yang sangat terbatas. Dalam satu eksemplar koran, peneliti hanya menemukan satu sampai dua penggunaan eufemisme pada teks berita. Bahkan tidak jarang peneliti tidak menemukan penggunaan eufemisme pada teks berita dalam satu eksemplar koran *Lombok Post*. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk melakukan pendokumentasian media koran *Lombok Post* selama lima bulan sebagai sumber data..

Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan atau langkah. Tahapan atau langkah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian media koran Lombok Post setiap

penerbitan sejak bulan Januari s.d. Mei 2013.

1. Melakukan pemilihan dan pemilahan teks berdasarkan rubrik-rubrik yang telah

ditentukan.

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penggunaan eufemisme pada judul atau isi

teks wacana pada media harian *Lombok Post.*

1. Mengklasifikasikan data berdasarka bentuk eufemisme
2. Melakukan pengguntingan (kliping) terhadap teks berita yang sudah diklasikasikan berdasarkan bentuk eufemisme.
3. Selanjutnya data teks berita yang sudah digunting, difotokopi dan dibendel.
4. Merancang format tabel pengklasifikasian data eufemisme.
   1. **Metode dan Teknik Penganalisisan Data**

Penelitian yang dilakukan terhadap teks berita pada HLP yang difokuskan pada analisis penggunaan eufemisme pada penulisan teks berita dengan kajian *AWK* model Teun van Dijk. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskripsi, yaitu teknik yang berusaha menggambarakn atau menguraikan berbagai data yang telah ada.

Penganalisisan data dalam penelitia ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitataif akan dipergunakan untuk menemukan makna kata atau frase yang menggunakan eufemisme dalam rubrik sebuah teks berita pada HLP. Adapun teknik analisis data kualitatif ini akan pada pendapat Miles dan Huberman (dalam Emzir. 2012:129) yang menyatakan ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. **Reduksi Data**
2. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data teks berita (dengan proses kliping terlebih dahulu).
3. Penyederhanaan data yang difokuskan pada bagian judul yang menggunakan eufemisme.
4. Perangkuman data dengan pengelompokan menurut rubrik yang telah dipilih dalam teks berita (tiga rubrik: hukum & kriminal, ekonomi bisnis, dan politik).
5. Pengodean data dan dikelompokkan menurut bentuk eufemisme yang menngacu pada model Teun van Dijk ( struktur mikro: semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris) yang ditandai dengan kode BE1. Dan pandangan Allan & Burridge (16 bentuk) ditandai dengan kode BE2.
6. **Model Data** **(tahap penyajian data**)
7. Pembuatan tabel sebagai tempat mengelompokkan bentuk eufemisme
8. Penentuan data yang dianggap sudah valid dan dimasukkan ke dalam tabel.
9. Penulisan kembali data berupa judul teks yang mengadung eufemisme ke dalam lembaran yang lain untuk dianalisis.
10. Penginterpretasian makna implisit terhadap data eufemisme sehingga ddapat ditemukan maksud penulis.
11. **Penarikan / Verifikasi Kesimpulan**

Data-data yang telah dianalisis tersebut diverifikasi dan ditentukan maknanya secara eksplisit. Data-data yang sudah dianggap final diakhiri dengan penyimpulan sebagai akhir dari sebuah penelitian.

* 1. **Rancangan Penelitian**

Penganalisisan data penggunaan eufemisme pada teks berita media harian *Lombok Post* akan dianalisis menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif akan disajikan dalam bentuk rumusan berupa kata-kata biasa yang didukung dengan bagan/diagram, tabel, dan gambar. Penentuan bentuk eufemisme dalam judul teks berita akan menggunakan struktur mikro dalam model van Dijk (BE1) yang dikolaborasikan dengan pandangan Allan dan Borridge (BE2). Hasil analisis atau penginterpretasian maksud penulis dalam teks berita yang mengandung eufemisme akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran wacana di SMP.

**Bagan: Skema Alur Penelitian**

**Data Teks Berita Media Harian *Lombok Post* Terbitan**

**Januari s.d. Mei 2013**

**Rubrik Hukum dan Kriminal, Ekonomi Bisnis dan Politik**

**Eufemisme Pandangan Allan dan Burridge**

**Analisis Wacana Kritis**

**Teks Struktur Mikro**

**Stilistika**

**Retoris**

**Sintaksis**

**Semantik**

**Eufemisme**

**Integrasi Dengan Pembelajaran Wacana**

**Hasil Analisis, Simpulan, dan Saran**

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Identifikasi**

Analisis teks berita media harian *Lombok Post* untuk menemukan bentuk-bentuk *eufemisme* dilakukan dengan menggunakan AWK model van Djk, (selanjutnya akan disingkat BE1) dan didukung oleh pandangan Allan dan Burridge (selanjutnya akan disingkat BE2). Bentuk eufemisme model van Dijk difokuskan pada stuktur mikro berupa semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris (lihat Bab 2). Pandangan Allan dan Burridge mengenai bentuk *eufemisme* terdiri atas 16 bentuk (lihat Bab 2).

Berdasarkan data sebanyak 28 teks yang dikumpulkan dari media HLP sejak bulan Januari s.d. Mei 2013, ditemukan bentuk-bentuk *eufemisme*. Bentuk-bentuk eufemisme tersebut dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) jenis rubrik yang dipilih pada teks berita media HLP. Rubrik yang dimaksud adalah: (1) Rubrik Hukum dan Kriminal, (2) Rubrik Ekonomi Bisnis, dan (3) Rubrik Politik.

Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel. Masing-masing tabel analisis teks berisi frekwensi dan persentase penggunaan eufemisme. Tabel analisis teks, *pertama* tabel berisi hasil analisis teks berita tentang bentuk eufemisme dilihat dari struktur mikro model van Dijk. *Kedua*, tabel berisi hasil analisis teks berita tentang bentuk eufemisme dilihat dari pandangan Allan dan Burridge. *Ketiga,* tabel berisi hasil analisis teks berita tentang bentuk eufemisme menurut pendapat peneliti berdasarkan data yang ditemukan. Hasil analisis bentuk eufmisme teks media HLP tersebut terlampir dalam lampiran penelitian.

Berikut ini tabel frekwensi dan persentase hasil analisis bentuk eufemisme pada teks media HLP. Tabel hasil analisis teks bentuk eufemisme tersebut ditampilkan dalam tiga kelompok. Kelompok *pertama*, tabel (1) berupa bentuk eufemisme dilihat dari struktur mikro model van Dijk. Kelompok *kedua*, tabel (3) berupa bentuk eufemisme dilihat dari pandangan Allan dan Burridge. Kelompok *ketiga,* tabel (3) berupa bentuk eufemisme yang terdapat pada teks berita media HLP sebagai sebuah simpulan.

1. Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penggunaan Bentuk *Eufemisme* pada Media HLP (model van Dijk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk *Eufemisme* Mikro van Dijk  (BE1) | Rubrik Teks Media HLP | | | | | |
| Hukum & Kriminal | | Ekonomi Bisnis | | Politik | |
| f | % | f | % | f | % |
| 1 | Semantik | 19 | 54.3% | 18 | 66.66 % | 19 | 79.2% |
| 2 | Sintaksis | 1 | 2.85% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stilistik | 11 | 31.42 % | 8 | 29.62% | 3 | 12.5% |
| 4 | Retois | 4 | 11.42 % | 1 | 3.7% | 2 | 8.33% |
| Jumlah | | 35 | | 27 | | 24 | |

Tabel di atas menjelaskan bentuk penggunaan *eufemisme* pada struktur mikro model van Dijk (BE1) sebagai berikut: (1) Rubrik Hukum dan Kriminal pemakaian eufemisme berjumlah 35 kata/frase. Bentuk penggunaan *eufemisme* terbanyak adalah bentuk semantik, frekwensi berjumlah 19 kata/frase (54.3%) dan yang terendah bentuk sintaksis frekwensi 1 kata (2.85%). (2) Rubrik ekonomi bisnis pemakaian *eufemisme* berjumlah 27 kata/ frase. Bentuk penggunaan eufemisme terbanyak adalah bentuk semantik, berjumlah 18 kata/frase (66.66%) dan bentuk sintaksis tidak digunakan. (3) Rubrik Politik, pemakaian eufemisme berjulah 24 kata/frase. Bentuk penggunaan eufemisme terbanyak adalah bentuk semantik, berjumlah 19 kata/frase (79.2%) sedangkan bentuk sintaksis tidak digunakan. Dari ketiga rubrik tersebut, penggunaan bentuk eufemisme yang paling domonan adalah bentuk semantik.

1. Tabel 2

Jumlah dan Persentase Penggunaan *Eufemisme* pada media HLP Pandangan Allan dan Burridge

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk Eufemisme  Pandangan Allan dan Burridge  (BE2) | Rubrik Teks Media HLP | | | | | |
| Hukum dan Krimunal | | Ekonomi Bisnis | | Politik | |
| f | % | f | % | f | % |
| 1. 1 | Metafora | 2 | 5.71% | 2 | 7.40% | 5 | 20.83% |
|  | Flipansi | 8 | 22.86% | 2 | 7.40% | 1 | 4.2% |
|  | Sirkumlokusi | 5 | 14.3% | 4 | 14.81% | 4 | 16.7% |
|  | Singkatan | 1 | 2.86% | 8 | 29% | 1 | 4.2% |
|  | Satu kata pengganti | 12 | 34.3% | 11 | 40.47% | 3 | 12.5% |
|  | Hiperbola | 2 | 5.71% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Makna di luar | 3 | 8.6% | 6 | 22.22% | 10 | 41.7% |
|  | Jargon | 1 | 2.86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kolokial | 1 | 2.86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 35 | | 27 | | 24 | |

Tabel di atas menjelaskan bentuk penggunaan eufemisme menurut pandanga Allan dan Burridge (BE2) adalah sebagai berikut: (1) Rubrik Hukum dan Kriminal, pemakaian eufemisme berjumlah 35 kata/frase. Bentuk penggunaan *eufemisme* terbanyak adalah bentuk satu kata untuk menggantikan satu kata yang lain, berjumlah 12 kata/frase (34.3 %) dan tujuh bentuk tidak ditemukan penggunaannya (lihat tabel 5). (2) Rubrik ekonomi bisnis pemakaian *eufemisme* berjumlah 27 kata/ frase. Bentuk penggunaan eufemisme terbanyak adalah bentuk satu kata untuk menggantikan kata yang lain, berjumlah 11 kata/frase (40.74 %) dan sepuluh bentuk tidak ditemukan penggunaannya (lihat tabel 5). (3) Rubrik Politik, pemakaian eufemisme berjulah 24 kata/frase. Bentuk penggunaan eufemisme terbanyak adalah bentuk makna di luar pernyataan, berjumlah 10 kata/frase (41.7 %) sedangkan 10 bentuk lainnya tidak ditemukan penggunaannya (lihat tabel 5). Dari ketiga rubrik tersebut, penggunaan bentuk eufemisme yang cukup menonjol adalah bentuk satu kata menggantikan kata yang lain.

1. Tabel 3

Jumlah dan Persentase Penggunaan Bentuk *Eufemisme* pada Media HLP (pandangan peneliti)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk *Eufemisme* Pandangan Peneliti  (BE3) | Jumlah dan Persentase Penggunaan Eufemisme Media HLP | | |
| f | % | |
| 1 | Satu kata | 17 | 19.8 % | |
| 2 | Frasa | 34 | 39.53 % | |
| 3 | Ungkapan | 8 | 9.30 % | |
| 4 | Singkatan/akronim | 6 | 6.97 % | |
| 5 | Campur kode | 21 | 24.41 % | |
| Jumlah | | 86 | | 100% |

Tebel 3 di atas menyebutkan bentuk-bentuk eufemisme yang terdapat pada teks media HLP sebagai sebuah simpulan peneliti. Bentuk-bentuk eufemisme yang dikemukakan dalam tesis ini adalah berbentuk satu kata, berbentuk frasa, berbentuk ungkapan, berbentuk singkatan/akronim, dan berbentuk campur kode. Penentuan bentuk tersebut didasarkan pada frekwensi penggunaannya dalam teks media HLP yang terdapat dalam 28 teks yang dijadikan sampel, sesuai penjelasan awal.

Kajian terhadap media HLP yang berjumlah 28 teks tersebut, ditemukan 86 jumlah penggunaan eufemisme. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk eufemisme yang diikuti dengan frekwensi penggunaan dan persentasenya. (1) Eufemisme berbentuk *satu kata,* frekwensi pemakaian sebanyak 17 (19.8 %). (2) Eufemisme berbentuk *frasa,* frekwensi pemakaian sebanyak 34 (39.53%). (3) Eufemisme berbentuk *ungkapan,* frekwensi pemakaian sebanyak 8 (9.30%). (4) Eufemisme berbentuk *singkatan/ akronim,* frekwensi pemakaian sebanyak 6 (6.97%). (5) Eufemisme berbentuk *istilah asing*, frekwensi pemakaian sebanyak 21 (24.41%). Lihat Tabel 4 hal. 55

Mencermati data yang terdapat pada tabel 3, terlihat penggunaan bentuk eufemisme ada yang tertinggi dan ada yang terendah. Pemakaian eufemisme yang tertinggi adalah eufemisme berbentuk frasa dengan frekwensi pemakaian sebanyak 34 (39.53%). Sedangkan penggunaan eufemisme yang terendah berbetuk singkatan/akronim sebanyak 6 (6.97%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan bentuk eufemisme yang paling mendominasi adalah eufemisme berbentuk frasa.

**4.2 Klasifikasi**

Bentuk-bentuk eufemisme yang terdapat pada teks media HLP yang dijadikan sebagai sumber data, ditemukan kata-kata dan frasa yang mengandung makna eufemisme. Data-data eufemisme tersebut dikelompokkan ke dalam lima macam bentuk eufemisme. Berikut ini tabel pengklsifikasian bentuk eufemisme:

Tabel 4

Bentuk Eufemisme pada Teks Media HLP Edisi Januari s.d. Mei 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | Bentuk Eufemisme  Berupa | Contoh Eufemisme |
| 1 | Satu kata | *bermasalah*  *dianiaya*  *berurusan*  *diragukan*  *menyesuaikan*  *perkembangan*  *ditertibkan*  *permainan*  *meramaikan*  *merealisasikan*  *mengembangkan*  *menghilang*  *berperan*  *berbenah*  *telusuri*  *oknum*  *bermasalah*  *meredup* |
| 2 | Frasa | *terima percikan*  *tindakan tegas*  *tak kunjung dapat dioprasikan*  *tidak akan banyak mengalami perubahan*  *diproyeksikan masih lemah*  *sekedar bertahan hidup*  *melakukan hal yang sama*  *waktu belum dipastikan*  *mengalir ke kantong pribadi*  *anggarannya dicairkan*  *akan dikembangkan lagi*  *tidak berimbang*  *tuding ada permainan*  *angkat martabat*  *penyumbang devisa*  *belum cukup meyakinkan*  *kandidat calon yang ingin dilamar*  *mengabdikan diri*  *menghalalkan semua cara*  *Anas tak disebut*  *menggulirkan pelengseran Anas*  *beliau pasti tahu yang mesti dilakukan*  *peka terhadap masalah-masalah sosial*  *media massa tidak bisa dalam posis netral*  *indeks IPM naik*  *bekerja profesional*  *masih kesulitan menentukan sikap*  *politik gaya infotainment*  *proses pemilu berjalan sehat*  *dapat bersikap dewasa dalam berpolitik*  *angkat elektabilitas demokrat*  *anggaran kementrian bermasalah*  *permintaan pasar diproyeksi masih lemah*  *remitansi turun*  *belum bekerja maksimal* |
| 3 | ungkapan | *aktor intelektual*  *daerah rawan pangan*  *pihak berwenang*  *nota kesepahaman*  *bagai magnet*  *pahlawan devisa*  *penata laksana rumah tangga*  *turun tangan*  *pilih kasih* |
| 4 | Singkatan/akronum | *IPM*  *NNT*  *SPPD*  *bansos*  *bintek*  *parpol* |
| 5 | Campur kode | *survey*  *investigasi*  *profesionalisme*  *defisit*  *moratorium*  *lauhul mahfuz*  *relokasi*  *koo koordinasi*  *kartel*  *klarifikasi*  *ritel*  *remitansi*  *dement*  *konsumen*  *monitoring*  *kritis*  *investor*  *subsidi*  *fiktif*  *independen*  *kinerja* |
|  | Jumlah | 86 |

**4.3 Deskripsi**

Berikut ini pendeskripsian bentuk-bentuk eufemisme yang terdapat pada tabel di atas. Pendeskripsian dilakukan dengan mengungkap makna yang terdapat di dalam kata-kata yang mengandung eufemisme. Akan dihadirkan contoh penggunaan kata-kata eufemisme dala sebuah kalimat.

**4.3.1 Eufemisme Berbentuk Satu Kata**

Bentuk eufemisme satu kata adalah kata yang mengandung makna eufemisme yang digunakan dalam sebuah kalimat. Komponen pembentuknya hanya terdiri atas kata dasar yang mendapatkan imbuhan pada kata dasarnya atau bisa juga hanya berupa bentuk dasarnya.

Berikut ini ditamppilkan beberapa contoh eufemisme berbentuk satu kata yang diambil dari teks media HLP yang dijadikan sebagai data dalamm penelitian.

Contoh :

1. Untuk itu, ritel lokal harus segera *berbenah* untuk bisa bersaing.

(HLP, 08 Januari 2013)

1. Tahun ini ada beberapa ritel asing bakal *meramaikan* sektor ritel Indonesia.

(HLP, 08 Januari 2013)

1. Mobil hibah PT NNT *bermasalah* secara fisik maupun dokumen*.*

(HLP, 12 Januari 2013)

1. Pemenang lelang ...dari hibah harus *berurusan* dengan polisi.

(HLP, 12 Januari 2013)

1. Sat Pol PP berencana melakukan *penertiban* tempat hiburan di kawasan Sumbawa dengan Sumbawa Barat.

(HLP, 30 Januari 2013)

1. Kasus dugaan SPPD fiktif yang melibatkan sejumlah *oknum* anggota DPRD Lombok Tengah *menghilang*.

(HLP, 20 Februari 2013)

1. Ketika pengusutan kasus SPPD fiktif *meredup*: independensi penegak hukum *diragukan.*

(HLP, 23 Februari 2013)

1. Penyidik Polres Mataram terus *megembangkan* kasus pemalsuan tanda tangan Wali Kota Mataram.

(HLP, 19 Maret 2013)

1. Kini, penyidik *menelusuri* aktor intelektual di belakang pelaku bernama sahabudin.
2. Wartawan *dianiaya* preman: diduga terkait pemberantasan korupsi.

(HLP, 27 April 2013)

1. Sementara itu, sekitar akhir tahun lalu perusahaan ritel asal Jepang, Family Mart telah *merealisasikan* investasinya.

(HLP, 08 Januari 2013)

1. Tim dari Kantor Ketahanan Pangan masih *menyesuaikan* data penduduk yang diterima dari Kantor Pusat Statistik dengan kondisi di lapangan.

(HLP, 31 Januari 20130

1. Rapor anggaran 15 kementrian yang diisi tokoh parpol memiliki hasil audit *bermasalah.*

(HLP, 03 Mei 2013)

**4.3.2 Eufemisme Berbentuk Frasa**

Eufemisme berbentuk frasa merupakan penggabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu fungsi dalam sebuah struktur kalimat. Hubungan antara kata yang satu dengan yang lainnya tidak rapat, dapat ditambahkan dengan imbuhan atau kata tugas yang lain.

Berikut ini ditampilkan contoh eufemisme yang berbentuk frasa yang diambil dari teks media HLP yang dijadikan sebagai data data dalam peneitian ini.

1. Kendaraan lain yang diketahui dihibahkan PT NNT *juga tak kunjung dapat dioprasikan.*

(HLP, 12 Januari 2013)

1. Puluhan oknum dewan diduga *terima percikan*

(HLP, 01 Februari 2013)

1. Kalah tender, kontraktor *tuding ada permainan*.

(HLP, 06 Mei 2013)

1. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh hanya bisa untuk *sekedar bertahan hidup.*

(HLP, 22 Februari 2013)

1. Calon pemimpin juga diharapkan dapat *bersikap dewasa dalam berpolitik.*

(HLP, 18 April 2013)

1. Namun dengan melihat kondisi saat ini, penyelenggara pemilu dinilai *belum bekerja maksimal*.

(HLP, 27 Maret 2013)

**4.3.3 Eufemisme Berbentuk Ungkapan**

Ungkapan adalah kata atau gabungan kata yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk menyatakan suatu hal, maksud, kejadian, atau sifat secara tidak langsung. Jadi kata atau gabungan kata itu tidak digunakan menurut makna aslinya (leksikal atau gramatikal), melainkan menurut makna lain. namun demikian makna tersebut masih memiliki hubungan dengan makna aslinya (Chaer. 2002). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa eufemisme berbentuk ungkapan eufemisme yang merupakan gabungan beberapa kata yang mengandung makna baru yang mengacu pada makna dasar.

Berikut ini contoh temuan eufemisme berbentuk ungkapan yang terdapat dalam teks media HLP yang dijadikan sebagai data penelitian.

1. Namun ironisnya, setiap tahun masih ditemukan *daerah-daerah rawan pangan.*

(HLP, 31 Januari 2013)

1. Kini, penyelidik menelusuri *aktor intelektual* di belakang pelaku benama Sahabudin yang sudah ditahan.

( HLP, 19 Maret 2013)

1. Indonesia *bagai magnet* yang terus menarik minat para investor asing.

(HLP, 15 Februari 2013)

1. “Saya hanya dalam posisi meminta SBY *turun tangan* mengangkat elektabilitas partai”.

(HLP, 07 Februari 2013)

1. “Jangan *pilih kasih* terhadap salah satu pasangan calon,”

(HLP, 27 Maret 2013)

1. Apjati angkat martabbat *pahlawan devisa.*

(HLP, 08 Mei 2013)

**4.3.4 Eufemisme Berbentuk Singkatan**

Singkatan terbagi dalam dua macam, singkatan biasa yang merupakan gabungan huruf awal dari beberapa kata yang dijadikan satu, dan singkatan yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata dari beberapa kata menjadi satu dan diperlakukan seperti kata. Jadi eufemisme berbentuk singkata ini merupakan bentuk singkatan secara umum yang menckup kedua jenis singkatan.

Berikut ini adalah contoh penggunaan dalam kalimat beberapa singkatan yang ditemukan dalam teks media HLP yang dijadikan data peneltian.

1. Posisi *IPM* NTB telah menjelma menjadi senjata.

(HLP, 28 Februari 2013)

1. Ia berharap *PT NNT* bertanggung jawab atas ketidakjelasan identitas kendaraan tersebut.

(HLP, 12 Januari 2013)

1. Kasus dugaan *SPPD* fiktif yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Lombok tengah menghilang.

(HLP, 20 Februari 2013)

1. Tanggal 16 Maret lalu Dewan Loteng mengagendakan *bintek* ke Jakarta terkait teknis pelaksanaan *pemilu* selama empat hari.

(HLP, 23 Februari 2013)

1. Kinerja *KPU* dan *Panwaslu* Lombok timurmendapatkan sorotan dari tim sukses.

(HLP, 27 Maret 2013)

**4.3.5 Eufemisme Berbentuk Campur Kode**

Istilah adalah kata atau gabungan kata yang maknaya sudah tetap dan pasti; serta hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu (Chaer.2007). mengcu pada konsep di atas, eufemisme berbentuk istilah adalah penggunaan beberapa istilah yang digunakan untuk memperhalus makna. Penggunaan istilah asing ini merupakan sebuah teknik media dalam menyampaikan sebuah berita sebagai upaya meminimalisir respon negatif pembaca .

Berikut ini beberapa contoh penggunaan istilah asing yang ditemuukan pada teks media HLP yang dijadikan sebagai data penelitian.

1. “Sekarang tim sedang melakukan *survey* di semua desa yang ada di wilayah kabupaten”.

(HLP, 31 Januari 2013)

1. Tahun ini dipastikan bakal ada dua *ritel* asing yang masuk Indonesia.

(HLP, 08 Januari 2013)

1. Lonjakan impor dan susutnya ekspor menorehkan catatan *defisit* perdagangan terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia.

(HLP, 2 Februari 2013)

1. *Remitansi* tahun 2012 mengalammi penurunan sebagai akibat dari *moratorium.*

(HLP, 05 Maret 2013)

1. KPPU memiliki dugaan kuat bahwa importasi bawang putih dan daging sapi memang diwarnai praktek *kartel* oleh pelaku usaha tetentu.

(HLP, 11 April 2013)

**4.4 Eksplanasi Makna**

Analisis makna *eufemisme* pada teks berita media HLP menggunakan AWK model van Dijk (lihat Bab). Sedangkan teknis analisisnya menggunakan teknis analisis yang difokuskan pada penggunaan bahasa (kosa kata) yang dianggap mengandung eufemisme. Teknis tersebut dikembangkan oleh Fowler dkk. (lihat Bab 2).

Berikut ini adalah makna eufemisme yang dapat diungkapkan dari hasil analisis teks media HLP. Selanjutnya dalam pengelompokan data teks berita, identitas setiap rubrik ditampilkan dengan inisialnya. Rubrik *Hukum* *dan Kriminal* disingkat H K, rubrik *Ekonomi Bisnis* disingkat E B, dan rubrik Politik disingkat P. Sedangkan makna yang dapat diungkap ada empat masalah pokok, yaitu:

1. Mengecilkan masalah yang diberitakan
2. Membesar-besarkan masalah yang diberitakan
3. Meredam emosi pembaca terhadap masalah yang diberitakan
4. Membentuk opini publik terhadap masalah yang diberitakan

Keempat makna eufemisme dalam teks media HLP tersebut diperincikan dalam tabel analisis makna. Berikut ini ditampilkan data teks media HLP yang memperlihatkan penggunaan eufemisme untuk mengungkapkan keempat makna tersebut.

Tabel 5: Makna Teks Media HLP

|  |  |
| --- | --- |
| Makna Eufemisme Teks Media HLP | Bukti Kalimat Teks Berita dalam Rubrik dan Edisi |
| Mengecilkan masalah yang diberitakan | *Mobil hibah PT NNT bermasalah* (H K, 12-01-13) |
| *Puluhan oknum dewan diduga terima percikan kasus korupsi bansos Lobar* (H K, 01-02-13) |
| *SPPD fiktif, Kasus Loteng menghilang* (H K, 20-02-13) |
| *Ketika penguusutan kasus SPPD fiktif meredup, independensi penegak hukum diragukan* (H K, 23-02-13) |
| *Kalah tender, kontraktor tuding ada permainan* (H K, 06-05-13) |
| *Survey daerah rawan pangan* (E B, 31-02-13) |
| *MUI: masyarakat perlu waspadai setiap produk* (E B, 25-03-13) |
| *Anggaran 15 kementrian bermasalah mayoritas diisi orang parpol* (P, 03-05-13) |
| *Jumlah* 9 data = 32.14% |
| Membesar-besarkan permasalahan yang diberitakan | * *Telusuri aktor intelektual* (H K,19-03-13) |
| *Wartawan dianiaya preman diduga terkait pemberitaan kasus korupsi* (H K, 27-04-13) |
| *Dahlan bisa angkat elektabilitas demokra* (P, 26-04-13) |
| *Apjati angkat martabat pahlawan devis* (E B, 08-05-13) |
| *Jumlah* 4 data = 14.28 % |
| Meredam emosi pembaca | *Batu Guring bakal ditertibkan* (H K, 30-01-13) |
| *Dua ritel asing siap dibuka* (E B, 08-01-13) |
| *Defisit 2012 terburuk sepanjang sejarah RI* (E B, 02-02-13) |
| *Pengerajin tahu-tempe minta disubsidi* (E B, 22-02-13) |
| *Seribu investor Jepang incar relokasi...*(E B, 25-02-13) |
| *Remitansi turun akibat moratorium* (E B, 05-03-13) |
| *Kartel rugikan konsumen Rp 5T* (E B, 11-04-13) |
| *Monitoring utang swasta diperketat...*(E B, 25-04-13) |
| *Bawaslu diminta bekerja profesional* (P, 27-03-13) |
| Jumlah 9 data = 32.14 % |
| Membentuk opini pembaca | *TGB: Cawagub masih di lauhul mahfuz* (P, 10-01-13) |
| *Kirim SMS dari Makkah, Anas tak disebu* (P, 07-02-13) |
| *Masyarakat diharap jadi pemilih yang kritis* (P, 18-02-13) |
| *Indeks IPM naik,... IPM NTB yang betah di posisi 32 dari 33 provinsi kerap dieksploitas...banyak yang tak mengetahui, kalau indeks IPM NTB ... sebetulnya naik pesat* (P, 28-02-13) |
| *TGB: jangan gunakan politik gaya infotainment* (P, 08-04-13) |
| *Harus dewasa dalam berpolitik* (P, 18-04-13) |
| *Jumlah* 6 data = 21.43 % |
|  | *Jumlah keseluruhan* 28 data |

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi tentang frekwensi dan persentase penggunaan eufemisme pada teks media HLP. Masing-masing kelompok makna disertai dengan bukti kalimat yang diambil dari teks media HLP. Pada tabel tersebut terlihat dua makna yang paling dominan, yaitu makna mengecilkan masalah yang diberitakan dan makna upaya media meredam emosi pembaca. Masing-masing makna tersebut frekwensi penggunaannya sebanyak 9 kali kemunculan atau 32.14 %. Selanjutnya, makna yang mengungkapkan upaya media dalam membentuk opini pembaca sebanyak 6 kali kemunculan atau 21.43 %. Sedangkan makna yang terakhir yaitu makna yang mengungkapkan upaya media dalam membesar-besarkan masalah yang diberitakan. Makna tersebut kemunculannya hanya 4 kali atau 14.28 %.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media HLP dalam memberitakan sebuah kasus/peristiwa kepada masyarakat tidak menyampaikan sesuatu apa adanya. Sebuah peristiwa cendrung direkonstruksi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Tidak salah bila dikatakan bahwa berita merupakan sebuah rekonstruksi yang dipengaruhi oleh ideologi sebuah media. Pada akhirnya, kita dapat mengetahui orientasi yang ingin dicapai oleh sebuah media dengan pemberitaan-pemberitaannya.

**4.5 Pengintegrasian Teks Harian Lombok Post dengan Pembelajaran Wacana di SMP**

Penelitian ini mengkaji teks berita media HLP dan pengintegrasiannya ke dalam pembelajaran wacana di SMP. Rancangan penelitian ini dimulai pada tahun pelajaran 2012-2013. Silabus yang digunakan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengintegrasian teks media HLP ke dalam pengajaran bahasa Indonesia di SMP pada kelas IX semester 2 didasarkan pada Standar Kompetensi (SK): 11 . Adapun kalimat S K tersebut adalah*: memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca itensif, dan membaca cepatat.*

Pengintegrasian teks HLP ke dalam pengajaran bahasa Indonesia di SMP juga dapat dilakukan pada kelas VIII semester 2. Standar kompetisi yang terkait dengan pengintegrasian tersebut dapat ditemukan dalam silabus. Kalimat yang terdapat dalam SK tersebut adalah: *memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring*.

Teks berita yang terdapat dalam media HLP atau bacaan lainnya yang memadai dijadikan sebagai alat, media, atau pun sumber belajar. Siswa diharapkan dapat menemukan gagasan, makna kata, atau pun maksud yang disampaikan penulis dalam sebuah teks/ bacaan (berita) melalui kegiatan membaca intensif, ekstensif, ataupun membaca cepat. Tentunya semua alat, media, dan sumber belajar yang digunakan harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Penggunaan media HLP sebagai salah satu sumber belajar memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) Guru dan siswa sudah cukup akrab dengan media HLP; (2) Media tersebut termasuk mudah didapatkan dan murah harganya; (3) Materi bacaan yang ada di dalamnya selalu mengangkat masalah-masalah yang baru dan kontekstual; dan (4) Sebagai koran lokal, memberitakan masalah-masalah yang terjadi di sekitar siswa.

Sekali lagi ditegaskan bahwa pengintegrasian teks media HLP dengan pengajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan di tingkat SMP kelas VIII semester 2 dan di kelas IX semester 2. Berikut ini adalah tabel yang berisi data tentang pengungkapan penginntegrasian teks media dengan pengajaran wacana di SMP.

Tabel 6: Pengintegrasian Teks dengan Pengajaran Wacana di SMP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelas/  Semester | Topik | Subtopik |
| IX/2 | Membaca artikel dan buku untuk menemukan berbagai gagasan yang terdapat di dalamnya | Menemukan gagasan dari artikel |
| Menemukan gagasan dari buku |
| Mengutip pernyataan dari artikel atau buku sebagai refrensi dalam penulisan karya tulis |
| VIII/2 |  |  |
|  |

**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1 Simpulan**

Setelah melaksanakan keseluruhan tahapan dalam proses penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Eufemisme merupakan penggunaan bahasa berupa kata/frase untuk memperhalus pengucapan tentang sesuatu hal yang mmengandung nilai rasa rendah atau kurang pantas, baik bagi pembaca maupun objek yang ada dalam berita.

Penentuan bentuk eufemisme dalam kajian ini dibagi dalam dua macam acuan yang saling melengkapi. Bentuk *pertama,* dilihat dari struktur mikro, meliputi semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Bentuk *kedua,* dilihat dari pandangan Allan dan Burredge yang terdiri atas 16 macam, dan yang ditemukan sebanyak sepuluh bentuk. Kesepuluh bentuk yang dimaksud adalah: (1) Ekspresi Figuratif (figurative Expressions), (2) metafora (methafor), (3) Flipansi (Flippancy), (4) Sirkumlokusi (circumlocutions), (5) Singkatan (Abbreviations), (6) Satu kata untuk menggantikan satu kata yang lain (one for one substutions), (7) Hiperbola (hyperbole), (8) Makna di luar pernyataan (understatement), (9) Jargon, (10) Kolokial

Selanjutnya, ditemukan lima jenis bentuk penggunaan eufemisme dalam teks media HLP. Bentuk-bentuk eufemisme tersebut adalah: (1) eufemisme berbentuk *satu kata*; (2) eufemisme berbentuk *frasa;* (3) eufemisme berbentuk ungkapan; (4) eufemisme berbentuk *singkatan*; dan (5) eufemisme berbentuk *istilah asing*. Dari kelima bentuk eufemisme tersebut, eufemisme berbentuk frasa yang paling banyak digunakan dalam teks media HLP. Dan bentuk eufemisme yang paling sedikit ditemukan penggnaannya adalah eufemisme berbentuk singkata

**5.2 Makna Eufemisme pada Teks Media HLP**

Proses analisis yang dilakukan terhadap teks media HLP edisi bulan Januari s.d. Mei 2013, ditemukan beberapa makna secara umum. Makna tersebut mengungkapkan sikap media HLP terhadap masalah yang diberitakan. Makna-makna yang terungkap sangat dipengaruhi oleh *aktor* yang diberitakan. Berikut ini makna-makna eufemisme yang dapat diungkapkan pada hasil penelitian ini.

1. Media menggunakan kata eufemisme untuk mengecilkan masalah yang diberitakan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa berita yang diangkat, seperti kasus mobil hibah oleh PT NNT.
2. Media menggunakan kata eufemisme untuk membsar-besarkan masalah yang diberitakan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa berita yang diangkat, seperti kasus pemukulan terhadap wartawan yang dilakukan oleh preman.
3. Media menggunakan istilah asing dalam eufemisme sebagai upaya meredam emosi kelompok tertentu (masyarakat awam) agar tidak memberikan reaksi berlebihan terhadap sebuah kasus. Hal ini terlihat pada pemberitaan kasus menyangkut perekonomian yang berdampak merugikan bangsa. Kata/ istilah asing yang dimaksud, antara lain: defisit, kartel, remitansi, ritel, dll.
4. Pada bidang politik, media berupaya membentuk opini publik dengan membenarkan pernyataan salah satu kandidat menjelang pilkada 2013. Media sangat mendukung pernyataan calon tentang sikap, etika, dan materi kampanye yang mesti dipatuhi. Sebagai contoh” *Dalam berkampanye tidak boleh menggunakan gaya infotainment,”* ucap salah seorang kandidat.

Demikianlah makna-makna eufemisme yang dapat diungkapkan pada teks media HLP, yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini.

**5.3 Saran**

Media koran dalam hal ini media HLP sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat, hendaknya mempertimbangkan juga masyarakat pembaca kalangan menengah ke bawah (awam). Tingkat pemahaman mereka terhadap kata-kata, frase, atau istilah terntu terkadang sulit dipahami sehingga dapat menimbulkan kesalahan pemahaman. Dikhawatirkan, informasi penting yang disampaikan dalam teks berita menjadi tidak penting dan akan mubazir. Oleh karena itu, dalam menulis sebuah berita hendaknya diawali dengan penulisan sebuah judul dengan kata, frase, atau istilah yang bermakna lugas. Selektif dalam penggunaan kata, frase, atau istilah yang memperhalus makna (eufemisme).

Pembelajaran bahasa Indonesia, yang materi pelajarannya membahas masalah teks berita/ wacana dan sejenisnya, hendaknya memilih materi yang kontekstual. Media-media pelajaran yang murah, dekat dengan siswa dan guru. Salah satu media yang mudah didapat adalah media yang ada pada HLP. Dengan demikian, guru bahasa Indonesia dapat menggunakan media HLP sebagai alternatif media dan sumber pembelajaran

**DAFTAR PUSTAKA**

Allan, Keith and Kate Burridge. 1991. *Euphemism & Dysphemism Language Used as Shield and Weapon.* New York: Published by Oxford university Press.

Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media.* Jakarta: Karisma Utama

Barthes, Roland. 2012. *Elemen-Elemen Semiologi: Sistem Tanda Bahasanya, Hermeneutika dan Strukturalisme*. Jogjakarta: IRGiSoD.

Budiningsih, Asri. 2005. *Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chaer, Abdul. 2007. *Leksikologi dan Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

-----------------.2002. *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darma, Yoce Aliah. 2013.  *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya

Djajasudarma, Fatimah.2010. *Wacana Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*.

Bandung: Refika Aditama.

Djojosuroto, Kinayati. 2007. *Filsafat Bahasa.* Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali

Pers.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media.* Yogyakarta:

LkiS.S dan Representasi Semiotik. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra:

Vol. II No. 2 Oktober 2006.

Hill, Winfred F. 2009. *Theories of Learning (Teori-Teori Pembelajaran Konsep, Komparasi, dan Signifikansi*. Bandung: Nusa Media

Hariyanto. 2009. *Gender Dalam Konstruksi Media*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi: Vol.3 No. 2 Juli-Desember 2009

Irfan, Noor. 2011. Tesis. *Analisis Framing Pemberitaan Harian Kompas Atas RUU-DIY*. Semarang: Universitas Semarang

Jorgensen W. Marrianne dan Louise Philips. 2010. *Analisis Wacana Teori & Metode*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.

Keraf, Goris. 2010. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Ikrar Mandiripribadi.

Leech,Geoffrey. 2011. *Prinsip-Prinsip Pragmatik ( The Principles of Pragmatics*. Jakarta: UI Press.

Mahsun.2012. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan strategimetode, dan tekniknya*.Jakarta: Rajawali Pres.

Noth, Winfried. 2006. *Semiotik*. Surabaa: Airlangga University Press

Paul Gee, James. 2010. *An Introdauction to Discourse Analysis Theory and Method.* New York: Routledge

Rubby,Tia dan Dardanila.2008. Artikel: *Eufemisme Pada Harian Seputar Indonesia.* USU: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra

Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis Menguak Bahasa Membongkar Kuasa.* Malang: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_\_\_\_ 2008. Jejak *Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis.* Jurnal Ilmiah Bahasa dan Seni

Schiffrin, Deborah.2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Malang: Pustaka Pelajar.

Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pegantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analis Freming*. Bandung: Rosda Karya.

Subana dan Sunarti. 2009. *Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indnesia: Berbagai Pendekatan, Metode Teknik dan Media Pengajaran*. Bandung: Pustaka Setia.

Subroto, Edi. 2011. *Pengantar Studi Semantik dan Pragmatik*. Surakarta: Cakrawala Media.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:

Alfabeta

Suwandi, Sarwiji. 2011. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Surakarta: Media

Perkasa

Thomas, Linda dan Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*. Malang: Pustaka Pelajar.

Titscher, S., Mayer, M., Wodak, R, and Vetter, E. 2000. *Methods of Text and Discours Analysis.* Ibrahim A.S. (ed.) *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Diterjemahkan oleh Gazali, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ullmann, Stephen. 2012. *Pengantar Semantik* *(Semantics, An Introduction to the Science of Meaning).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van Dijk, Teun A. 1996. *Discourse, power and access. In R C. Caldas-Coulthard and M. Coulthard (eds), Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis (pp. 84-104).* London: Routledge and Kegan Paul.

Wazis, Kun. 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Jember: Aditya Media Publishing

Wijana dan Rohmadi. 2011. *Semantik Teori dan Analisis*. Surakarta:Yuma Pustaka.

Win dan Realitasingsih. 2009. Artikel. *Marginalisasi Perempuan Dalam Pemberitaan Harian Jawa Pos Tentang Pekerja Migran Perempuan*

Wutun, Monika. 2013. Artikel: *Analisis Berita Politik Tentang Gubernur Nusa*

*Tenggara Timur di Media Massa Cetak (Studi Analisis Wacana Model*

*Teun A. Van Dijk pada Headline Pemberitaan di Surat Kabar Harian*

*Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express dalam Perspektif Public*

*Relations Politik Periode Agustus- September 2012).* Jurnal Publikasi

Berkala Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**

**3.6 Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Bulan dan Minggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desember  2012 | | Januari | | | | Februari - Maret  2014 | | | | April  2014 | | | | Mei  2014 | | | | Juni  2014 | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 4 |  |
| 1 | Observasi | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Penentuan sampel riset |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Penyusunan instrumen |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | Pengumpulan data rubrik teks berita media HLP  Yang mengandung eufemisme |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | Penganalisisan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | |  |
| 6 | Penulisan draf laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | |  |
| 7 | Seminar hasil riset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | |  |
| 8 | Revisi dan perbaikan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | |  |
| 9 | Penggandaan dan pelaporan hasil  pengumpulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | |

**LAMPIRAN 2**

Tabel 6

**Analisis Bentuk Eufemisme Teks Berita Media HLP Rubrik Hukum dan Kriminal**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Edisi** | **Judul** | **Temua Eufemis**  **me** | **Padanan** | **Bentuk Eufemisme** | |
| **Mikro van Dijk**  **(BE1)** | **Pandangan Allan & Burridge**  **(BE2)** |
|  | 12-01-13 | Mobil Hibah PT NNT Bermasalah | *Bermasalah* | Tidak singkron, tidak cocok, tidak sesuai (palsu) | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flipansi,** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*bermasalah*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| *Berurusan* dengan polisi | Kendaraan yang digunakan ditahan oleh polisi. Pemilik diintrogasi | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flipansi** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*berurusan*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| *Tak kunjung dapat dioprasikan* | ditahan | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Hiperbola,** yaitu ungkapan yang berlebihan. |
| Investigasi | penyelidikan | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata) **Elemen**: leksikon | **Satu kata menggantikan kata yang lain,** yaitu “penyelidikan” dapat diperhalus dengan kata”investigasi |
| Tindakan tegas | sanksi/ hukum | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flifansi** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*tindakan tegas*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| Pihak berwenang | instansi yang berkuasa: Kepolisian, pengadilan dan instansi terkait | **Retoris** (penggunaan ungkapan) **Elemen**: metafora | **Metafora,** yaitu perbandingan yang implisit di antara dua hal yang berbeda. *Pihak berwenang* , sebagai sebuta untuk Polisi, Pemerintah, atau Pejabat lainnya. |
| Belum dapat konfirmasi | Menghindari wartawan | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokasi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang dan bersipat tidak langsung |
|  | 30-01-13 | Batu Guring Bakal Ditertibkan | *Bakal ditertibkan* | Rencana Pembongkaran (tutup | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flifansi** yaitu makna di luar pernyataan. Kata *ditertibkan,* maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| Kita akan tetap *Melakukan hal yang sama* | Melakukan penertiban | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokasi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang dan bersipat tidak langsung |
| Melakukan koordinasi | Ajakan kerjasama/ minta dukungan | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flifansi** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*melakukan koordinasi*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| Waktu belum dipastikan | Masih berupa rencana, tidak serius | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan,** yaitu satu makna kata yang terlepas dari makna kata tersebut |
|  | 01-02-13 | Puluhan oknum dewan diduga terima percikan: kasus korupsi bansos | *Oknum* dewan | Pelaku dari anggota dewan | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**:  leksikon | **Satu kata menggantiikan kata yang lain,** kata “*oknum”* untuk menggantikan kata “anggota” sebagai pelaku dalam satu kasus yang berasal dari anggota dewan. |
| Diduga *mengalir*  ke *kantong pribadi* | Diduga diterima (diambil) untuk keperluan sendiri | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokasi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang dan bersipat tidak langsung |
| Belum dilirik Jaksa | Belum dipermasalahkan | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan,** yaitu satu makna kata yang terlepas dari makna kata tersebut. kata “*dilirik”* maknanya tidak langsung mengacu pada kata tersebut |
| Akan dikembangkan lagi | Dicari tersangka baru | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flifansi,** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*akan dikembangkan lagi*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
|  | 20-02-13 | SPPD Fiktif: Kasus Loteng Menghilang | SPPD Fiktif | SPPD palsu | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata “*palsu”* digantikan oleh kata “*fiktif*”. |
| Kasus Loteng menghilang | Kasus dilenyapkan, ditutup, dihentikan tanpa proses hukum | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*dihentikan*” (tidak pernah dipermasalahkan lagi kasusnya dalam persidangan) digantikan oleh kata “*menghilang.*” |
| Kasus *belum ada perkembangan* hingga saat ini | Kasus belum ada perubahan keputusan | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flifansi,** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*melakukan koordinasi*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| Tidak ikut bintek (tetapi) *anggarannya* *dicairkan* | Tidak ikut bintek uang dikeluarkan | **Sintaksis** (berbentuk kalimat yang mengungkapkan dua hal yang bertentangan dengan kata hubung “tetapi”. **Elemen**: koherensi | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*dikeluarkan*” digantikan oleh kata “*dicairkan.*” |
|  | 23-02-13 | Ketika Pengsutan Kasus SPPD Fiktif Meredup: Independensi Penegak Hukum Diragukan | Pengusutan kasus SPPD  Fiktif *meredup* | * Pengusutan kasus ...tidak jelas Pengusutan kasus SPPD   Fiktif *meredup* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata) **Elemen**: leksikon | **Metafora ,** yaitu perbandingan yang implisit di anatara dua hal yang berbeda. Kata meredup dibandingkan dengan keadaan sebuah kasus yang semakin tidak jelas (tidak dilanjutkan) |
| *Independensi penegak hukum diragukan* | *Kemandirian penegak hukum tidak dipercaya* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan,** yaitu satu makna kata yang terlepas dari makna kata tersebut |
| SP3 | Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (bebas) | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Singkatan,** yaitu menghaluskan suatu bentuk kata dengan menyingkat kata-kata menjadi berapa huruf |
| *Profesionalime* dan *independensi sangat kering* | Keahlian, kemandirian sudah berkurang bahkan hampir hilang | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang agak panjang dan bersifat tidak langsung |
|  | 19-03-13 | Telusuri Aktor Intelektual | Telusuri | Pencarian | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*pencarian*” digantikan oleh kata “*telusuri.*” |
| *aktor intelektual* | Pelaku yang berada di belakang peristiwa (dalang/ sutradara) | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Jargon,** kata yang memilki maknna yang sama tetapi berbeda bentuk |
| curiga dengan gelagat Sahabudin, langsung *berkoordinasi* dengan Wali Kota Mataram | ...gerak gerik.......*menghubungi, mengecek kebenaran...* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flipansi,** yaitu menghaluskan suatu kata tetapi makna yang dihasilkan tersebut di luar pernyataan dari kata yang dihaluskan tadi. Kata “*berkoordinasi*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan. |
|  | 27-03-13 | Kinerja KPU dan Panwaslu Disorot: Atribut calon belum ditertibkan | *Kinerja* KPU dan Panwaslu disorot | Prestasi kerja KPU dan Panwaslu disorot | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*prestasi kerja*” digantikan oleh kata “*kinerja.*” |
| *Atribut calon* | Kelengkapan tanda partai | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*kelengkapan partai*” digantikan oleh kata “*atribut.*” |
| belum *ditertibkan* | belum dilepas yang berada di tempat umum. | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*dilepaskan/dihilangkan*” digantikan oleh kata “*ditertibkan.*” |
| Penyelenggara pemilu *belum kerja maksimal* | Penyelenggara pemiilu tekesan tidak serius (setengah hati) | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*tidak sungguh-sungguh*” digantikan oleh kata “*belum maksimal.*” |
|  | 27-04-13 | Wartawan Diaaniaya Preman: Diduga terkait pemberitaan kasus korupsi | *Dianiaya* | *penyhiksaan*  maksudnya pemukulan pada bagian kepala dan pipi | **Stilistik,** pilihan kata yang dipakai dalam teks berita  **Elemen:** leksikon | **Hiperbola ,** ungkapan yang melebih-lebihkan. Kata *dianiaya,* yang digunakan pada teks berita dengan maksud menyatakan pemuklan kepala dan pipi kiri yang diakukan oleh Topan |
| Wartawan dianiaya *preman* | ....*orang yang tidak jelas identitasnya* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*tidak beridentitas, bayaran/ suruhan*” digantikan oleh kata “*preman.*” |
| ..melakukan pemotongan dengan dalih *fee persen* | *...uang jasa 10 persen* | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Kolokial,** yaitu ungkapan yang dipakai sehari-hari. Istilah “*uang jasa/ persen”* biasa disebut “*fee*” |
| ...jika ada kaya jurnalis yang *tidak berimbang* | ...*berat sebelah, informasi sepihak*... | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*berat sebelah”* dapat diperhalus dengan kata *“tidak berimbang”.* |
| seharusnya *diklarifikasi* | kebohongan...*dijernihkan*, *diperbaiki* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*tidak beridentitas, bayaran/ suruhan*” digantikan oleh kata “*preman* |
|  | 06-05-13 | Kalah Tender, Kontraktor Tuding Ada Permainan | Kalah Tender , Kontraktor tuding *ada permainan* | ... dilakukan dengan cara *yang tidak jujur, tidak objektif (ada penngaturan pemenang*) | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flipansi,** yaitu menghaluskan suatu kata tetapi makna yang dihasilkan tersebut di luar pernyataan dari kata yang dihaluskan tadi. Kata “*ada permainan*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |

Tabel 7

**Analisis Bentuk Eufemisme Teks Media HLP Rubrik Ekonomi Bisnis**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Edisi** | **Judul** | **Temuan Eufemisme** | **Padanan** | **Bentuk Eufemisme** | |
| **Mikro van Dijk** | **Allan Burridge** |
| 1. . | 08-01-13 | Dua Ritel Asing Siap Dibuka | Dua *ritel asing* siap dibuka | Dua *dagang eceran asing* siap dibuka | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*dagang eceran”* dapat diperhalus dengan kata *“ritel”.* |
| Beberapa ritel *asing bakal meramaikan s*ektor ritel nasional | Ritel asing bakal *memenuhi, membanjiri sektor* ritel nasional | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flipansi,** yaitu menghaluskan suatu kata tetapi makna yang dihasilkan tersebut di luar pernyataan dari kata yang dihaluskan tadi. Kata “*bakal meramaikan*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| Perusahaan ritel asal Jepang, Family Mart telah *merealisasikan* investasinya | *...telah memulai membuka usaha* dagang eceran | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Flipansi,** yaitu menghaluskan suatu kata tetapi makna yang dihasilkan tersebut di luar pernyataan dari kata yang dihaluskan tadi. Kata “*merealisasikan*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |
| Pasar Indonesia yang besar *menjadi magnet* bagi ritel asing | ...*menjadi incaran* , rebutan ritel asing | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Metafora** , yaitu perbandingan antara dua hal yang berbeda, ibarat, atau kiasan. Kata pasar Indonesia menjadi “*menjadi magnet”* bagi ritel asing. |
| Ritel lokal harus *berbenah* untuk bisa bersaing | Ritel lokal harus *memperbaiki diri* agar tidak kalah bersaing | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu makna kata yang terlepas dari makna kata tersebut. kata “berbenah” maknanya berada di luar makna kata sebenanrnya. |
|  | 31-01-13 | Survey Daerah Rawan Pangan | * Survey *daerah rawan pangan* | Mengawasi, menyelidiki..daerah yang penduduknya *kekurangan kebutuhan bahan pokok* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu makna kata yang terlepas dari makna kata tersebut. kata “daerah rawan pangan” maknanya berada di luar makna kata sebenanrnya. |
| * *Mnyesuaikan data penduduk* yang diterima dari kantor pusat statistik dengan kondisi di lapangann | *Mencocokkan data penduduk.....dengan kondisi di lapangan* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. Kata “*menyesuaikan*” tidak sama dengan kata ” *menambah*” |
| * Setiap tahun jumlah bantuan selalu *meningkat.* Tahun 2011 Rp 25 juta. Tahun lalu meningkat menjadi Rp37 juta. Mudah-mudahan tahun ini kami dapat dan meningkat katanya*.* | *Bantuan bertambah* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*bertambah”* dapat diperhalus dengan kata *“meningkat”.* |
|  | 02-02-13 | Defisit 2012 terburuk sepanjang sejarah RI | * *Defisit* 2012 terburuk*...* | *Kerugian* terburuk yang dialami Indonesia 2012 | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*berat sebelah”* dapat diperhalus dengan kata *“tidak berimbang”.* |
| * defisit neraca perdagangan disebabkan oleh *sektor migas* | * *...bidang minyak dan gas* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Singkatan,** yaitu menghaluskan suatu bentuk kata dengan menyingkat kata-kata menjadi beberapa huruf |
| * *kondisi perekonomian tidak akan banyak mengalami perubahan.* | Indonesia masih akan mengalami merugi (devisit) | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih pannjang yang bersifat tidak langsung. |
| * Demand (Permintaan) pasar internasional *diproyeksi masih lemah* | .....diperkirakan tidak ada permintaan pasar luar terhadap produk dalam negeri. (ekspor turun) | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang yang bersifat tidak langsung |
|  | 22-02-13 | Pengerajin tahu-tempe *Minta Disubsidi* | * Pengerajin tahu-tempe minta *disubsidi* | ....minta bantuan keuangan | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*berat sebelah”* dapat diperhalus dengan kata *“tidak berimbang”.* |
| Pasalnya, keuntungan yang diperoleh *hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup* | ...hanya untuk membeli kebutuhan pokok (makan-minum) | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang yang bersifat tidak langsung. Frase “*hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup*”, tidak menyatakan maksud yang sebenarnya yaitu “*kurang modal usaha*”. |
|  | 25-02-13 | Seribu investor Jepang Incar relokasi ke Indonesia | Seribu investor Jepang incar *relokasi ke* Indonesia | *Seribu orang kaya Jepang membidik Indonesia sebagai tempat memindahkan / penampungan pabrik yang ada di luar Indonesia* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | . **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*tempat memindahkan/ menampung pabrik yang ada di luar”* dapat diperhalus dengan kata *“relokasi”.* |
|  | 05-03-13 | Remitansi Turun Akibat Moratorium | *Remitansi turun akibat moratorium* | *Kiriman uang* turun akibat *penundaan pengiriman TKI* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*remitansi dan moratorium”* lebih halus daripada kata *“kiriman uang dan penghentian pengiriman TKI”* |
| Data kiriman uang dari *pahlawan devisa* | *TKI* | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Metafora ,** yaitu membandingkan dua hal yang berbeda, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain. Kata TKI dapat dikiaskan dengan menggunakan bentuk sebutan yang lain yang lebih sopan yaitu” *pahlawan devisa”* |
| Indonesia sudah melakukanpenandatanganan nota kesepahaman *(MoU)* | *....membuat perjanjian* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Singkatan,** yaitu singkatan kata-kata menjadi beberapa huruf. Singkata “MoU” dirasakan lebih sopan daripada bentuk panjang “*Memorandum Upgrading*” |
| Diharapkan penempatan para TKI di bidang *penata laksana rumah tangga* (PLRT) lebih jelas *sesuai dengan kompetensinya* | ....pembantu rumah tangga......keahliannya | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*penata laksana”* lebih halus daripada kata *“pembant* atau *pelayan”* |
| Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga harus *ikut berperan* | Pemda harus *memberikan kepedulian dan perlindungan serta membekali dengan keahlian atau keterampilan* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. Kata “*harus ikut berperan*” |
|  | 25-03-13 | MUI: Masyarakat Perlu Waspadai Setiap Produk | Masyarakat perlu *waspadai* setiap produk | ...*curigai setiap produk* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. Kata “*waspadai*” tidak sama dengan kata ” |
|  | 11-04-13 | Kartel Rugikan Konsumen Rp 5 T | *Kartel rugikan konsumen* | *Kerjasama sekelompok pengusaha dalam mengendalikan harga .....masyarakat* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*kartel”*bersinonim dengan kata *tengkulak.* Kata *“kartel’* lebih halus daripada kata *“tengkulak”* |
| KPPU dalam waktu dekat akan segera *melakukan gelar perkara* terkait dengan dugaan kartel | *...melakukan pengusutan ,penuntutan di pengadilan...* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang yang bersifat tidak langsung. Frase “*melakukan gelar perkara”*digunakan sebagai pengganti kata”sidang” |
|  | 25-04-13 | Monitoring Utang Swasta Diperketat | *Monitoring* utang swasta diperketat | *Pengawasan terhadap utang swasta sesuai rasio utang* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*monitoring”*bersinonim dengan kata *pengawasan.* Kata *“monitoring’* lebih halus daripada kata *“* pengawasan” |
|  | 08-05-13 | Apjati Angkat Martabat Pahlawan Devisa | Apjati *angkat martabat* pahlawan devisa | ...*hargadiri...*TKI | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Metafora ,** yaitu membandingkan dua hal yang berbeada, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain. Kata TKI dapat dikiaskan dengan menggunakan bentuk sebutan yang lain yang lebih sopan yaitu” *pahlawan devisa”* |
| *Penyumbang devisa* | *pendapatan negara* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*penyumbang”*bersinonim dengan kata *pemberi.* Kata *“penyumbang’* lebih halus daripada kata *“pemberi”* |
| *“*Saya juga minta NTB ikut menyukseskan program penempatan *satu juta TKI formal,”* harapnya | *...TKI yang memiliki dasar pendidikan yang memadai dan bekerja di instansi formal: Rumah sakit, Perusahaan dll.* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. Kata “*formal*” maknanya terlepas dari makna katanya |

**Tabel 8** **Analisi Eufemisme Teks Media HLP Rubrik Hukum**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Edisi** | **Judul** | **Temuan eufemisme** | **padanan** | **Bentuk Eufemisme** | |
| **Mikro van Dijk** | **Allan Burridge** |
|  | 10-01-13 | TGB: Cawagub Masih di Lauhul Mahfuz | Cawagub *masih di Lauhul Mahfuz* | ...belum ada kejelasan, kepastian | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Metafora ,** yaitu bentuk eufemisme yang membandingkandua hal yangberbeda, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain. Ungkapan “*Lauhul Mahfuz”* yang bermakna menyatakan suatu tempat yang mmasih rahasia yang belum bisa dipastikan oleh manusia, hanya Tuhan yang tahu. Penggunaan ungkapan ini lebih halus daripada frrase”*masih dirahasiakan”* |
| Para *kandidat calon* wakil gubernur *yang ingin dilamar* | ...calon...diminta | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*dilamar”*bersinonim dengan kata *diminta.* Kata *“dilamar’* lebih halus daripada kata *“diminta”* |
| Salah satunya terkait masalah ummah, alias persoalan keumatan yang mengharuskan untuk ikut *mengabdikan diri* dalam pembangunanmasyarakat | ...bekerja untuk memajukan masyarakat... | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. frase *mengabdikan diri,* maknanya terlepas dari maknna kata tersebut. |
| Pemilukada bukanlah perang yang bisa *menghalalkan semua cara.* Tetapi merupakan kompetisi untuk menawakan ide, visi, misi, untuk membangun daerah | ...membolehkan segala cara...persaingan menawarkan program pembangunan | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Metafora ,** yaitu bentuk eufemisme yang menghaluskan kata dengan melambangkan, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain. Ungkapan “*menghalalkan semua cara”* yang bermakna membolehkan segala cara...persaingan menawarkan program pembangunan. Ungkapan tersebut lebih halus daripada mengatakan “membenarkan semua cara” |
|  | 07-02-13 | Kirim SMS dari Makkah Anas Tak Disebut: Anas Punya Hak untuk Bertahan | Kirim SMS dari Makkah, *Anas tak disebut* | Tidak peduli pada Anas, SBY marah | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. frase *Anas tak disebut* maknanya terlepas dari maknna kata tersebut. |
| Sejummlah tokoh senior partai yang beberapa hari terakhir menggulirkan *pelengseran Anas Urbaningrum* dari posisi ketua umum ... | ...membicarakan pemecatan Anas Urbaningrum... | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*pelengseran”*bersinonim dengan kata *pemecatan.* Kata *“pelengseran’* lebih halus daripada kata *“pemecatan”* |
| “Kita serahkan saja pada SBY, *beliau pasti tahu apa yang perlu dilakukan*,” | ...Segala keputusan ada di tangan Pak SBY... | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
| “Saya hanya dalam posisi meminta SBY *turun angan* mmengangkat elektabilitas partai. | ...mengambil alih memperbaiki nama baik partai | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Metafora ,** yaitu bentuk eufemisme yang menghaluskan kata dengan melambangkan, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain. Ungkapan “*turun tangan”* yang bermakna *ikut membantu*. Ungkapan tersebut lebih halus daripada mengatakan “*ambil alih”* yang dirasa lebih kasar. |
|  | 18-02-13 | Masyarakat Diharap Menjadi Pemilih yang Kritis | ...jadi pemilih yang *kritis* | Pemilih yang tidak cepat percaya, mempertimbangkan kemampuan calon dilihat dari program yang ditawarkan. | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*kritis”*bersinonim dengan kata “*cerewet, teliti”* |
| ...masyarakat tidak hanya *peka terhadap masalah politik, namun juga peka terhadap masalah sosial* | *Tahu, mengerti dan peduli tentang masalah memilih pemimpin dan masalah kemiskinan, pengangguran, ksehatan dan pendidikan* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang yang bersifat tidak langsung. |
| ...media massa tidak bisa *dalam posisi netral*, karena media *harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas*. | Media massa selalu berada di tengah, karena media massa harus condong kepada kepentingan masyarakat miskin, pengangguran | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang yang bersifat tidak langsung. |
|  | 28-02-13 | Indeks IPM Naik, PosTerkerekisi Belum | *Indeks IPM naik* | tingkat pendidikan Masyarakat sudah baik, kesehatan membaik, harapan hidup lebih tinggi | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
| *Posisi belum terkerek* | *keadaan belum ada peningkatan,* daerah lain jauh lebih berhasil dalam meningkatkan IPM. | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
|  | 27-03-13 | Bawaslu Diminta Bekerja Profesional | Bawaslu diminta *bekerja profesional* | Bawaslu harus *bekerja berdasarkan keahlian, lebih objektif dan selalu mengacu pada undang-undangg yang berlaku* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
| “Bawaslu harus tegas terhadap keputusannya. *Jangan pilih kasih terhadap salah satu pasangan calon,” kata*  *Dahlan* | *...jangan berlaku tidak adil, tidak memihak pada salah satu pasangan calon...* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen:** maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Metafora ,** yaitu bentuk eufemisme yang menghaluskan kata dengan melambangkan, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain |
| KAMMI NTB juga akan ikut *mengkritisi pasangan*  *calon* yang memanfaatkann *struktur birokrasi dalam suksesi* pemilukada | ...*mengawasi pasangan calon yang memanfaatkan para pejabat yang*  *menjadi bawahannya lingkup pemerintahan dalam memenangkan pasangan tertentu* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
| Bawaslu *masih* *kesulitan untuk menentukan sikap* terkait dugaan keterlibatan PNS | Bawaslu belum dapat dapat *mengambil keputusan yang tegas dan objektif* terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PNS. | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
|  | 08-04-13 | TGB: Jangan Gunakan Politik Gaya Infotainment | ...jangan gunakan *politik gaya infotainment* | ...politik yang *mengungkapkan aib pribadi pasangan calon: masalah keluarga (rumah tangga), menampilkan popularitas* | **Retoris**  (cara penekanan degan menggunakan *ungkapan* sebagai bumbu dari suatu berita yang dapat menjadi petunjuk untuk memahami suatu teks). **Elemen:** metafora | **Metafora,** yaitu bentuk eufemisme yang menghaluskan kata dengan melambangkan, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk yang lain |
| “Kita mengharapkan *proses pemilu berjalan sehat*....,” terangnya | *...*proses pemilu *tanpa adanya intimidasi pasangan calon yang lain, tidak memakai politik uang ...* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
|  | 18-04-13 | Harus Dewasa dalam Berpolitik | Harus *dewasa dalam berpolitik* | Para calon membangun bangsa *mengutamakan visi, misi, dan program dalammembangun bangsa. Gunakan cara yang santun dan bijak. Tidak mengedepankan otot, tetapi ootak.* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Makna di luar pernyataan**, yaitu satu kata yang terlepas dari makna kata tersebut. |
|  | 26-04-13 | Dahlan Bisa Angkat Elektabiliaas Demokrat | ...*bisa angkat elektabilitas Demokrat* | *Menaikkan (popularitas) tingkat keterpilihan partai Demokrat* | **Semantik** (penekanan pada makna yang disampaikan) **Elemen**: maksud, adanya informasi yang merugikan disampaikan scr tersamar | **Sirkumlokusi,** yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang yang bersifat tidak langsung |
| Dukungan grass root | *Dukungan masyarakat bawah(akar rumput* | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen:** leksikon | **Satu kata untuk menggantikan kata yang lain,** yaitu bentuk eufemisme yang menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kata, “*masyarakat bawah”*bersinonim dengan kata “*grass root”* |
|  | 03-05-13 | Anggaran 15 Kementrian Bermasalah: Mayoritas diisi orang parpol | Anggaran 15 kementrian *bermasalah* | Terindikasi *merugikan negara* sebesar Rp8,3 triliun | **Stilistik** (penggunaan pilihan kata ) **Elemen**: leksikon | **Flipansi,** yaitu makna di luar pernyataan. Kata “*bermasalah*”, maknannya tidak langsung mengacu pada kata yang digunakan |

**Lampiran 3**

**Analisis Makna Teks 1**

**Rubrik: Hukum dan Kriminal, Edisi: 12 – 01 - 2013**

Judul: *Mobil Hibah PT NNT Bermasalah*?

Kata “*bermasalah ?*” yang diakhiri oleh tanda tanya pada kalimat judul di atas menggunakan kata yang bermakna eufemisme. Bentuk eufemisme yang digunakan dalam BE1 adalah bentuk *semantik* dan pada BE2 adalah bentuk *flipansi.* Penggunaan kata *bermasalah* tersebut bermaksud untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya yang berada di luar makna lugasnya. Namun, rupanya penulis masih ragu dan mempertanyakannya. Bila kita baca teks berita secara keseluruhan jelas bahwa mobil tesebut mengandung masalah yang sangat fatal yaitu ketidaksesuaian antara surat kendaraan dengan keadaan fisik kendaraan

“...pasalnya, mobil yang dilelang tersebut bermasalah secara fisik maupun dokumen kendaraannya. Sadiksyah, Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) KSB, kemarin terpaksa berurusan dengan polisi menyusul tidak jelasnya surat dan fisik kendaraan. Nomor mesin dan rangka kendaraan roda empat itu tidak memiliki kesamaan.”

........................................................................................

“Mobil jenis kijang kapsul warna biru dilelang pemda setempat, setelah menerima hibah sekitar tahun 2010 silam dari PT NNT. Ia berharap PT NNT bertanggung jawab atas ketidakjelasan identitas kendaraan tersebut. Kata dia, mesin-mesin yang dirakit pada bengkel PT NNT dikanibal, hingga ada mobil yang mesinnya tidak sesuai dengan rangka dan surat kendaraan.

.........................................................................................................

Masalah ketidakjelasan surat kendaraan hibah itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Hanya saja, belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

............................................................................................................

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Muh. Suryo Saputro juga belum dapat berkomentar terkait masalah ini. Kapolres terkesan menghindari wartawan.

Penggunaan kata “*bermasalah ?”* yang diakhiri dengan sebuah tanda tanya pada kalimat judul di atas, merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak media untuk *mengelabui* masyarakat pembaca. Penggunaan pilihan kata yang lebih tepat dan sesuai dengan isi berita adalah kata “*ilegal*” . Jadi kalimat judul teks berita tersebut mestinya berbunyi “*Mobil Hibah PT NNT Ilegal*”. Bila pihak media menggunakan kata “ilegal” maka hal itu akan dengan cepat direspon oleh masyarakat. Lebih-lebih pertistiwa pemalsuan terhadap sura-surat kendaraan tersebut telah berlangsung lama. Namun pihak yang berwajib belum mengambil tindakan tegas.

Penulisan kalimat judul di atas dengan pilihan kata yang tidak netral jelas sebagai sebuah upaya untuk membentuk opini pembaca. Kesalahan yang dilakukan oleh satu pihak (PT NNT) dianggap bukan merupakan sebuah pelanggaran yang berat dan tidak perlu dibesar-besarkan. Penggunaan kata bermasalah yang diakhiri oleh tanda tanya mengindikasikan sebagai sebuah upaya dari media untuk meredam emosi masyarakat. PT NNT sebagai aktor dalam kasus ini tidak ditindak dengan tegas. Sementara itu, pemerintah sebagai pihak yang dirugikan tidak melakukan penuntutan atas pelannggaran yang dilakukan oleh PT NNT. Polisi sebagai institusi penegak hukum tidak menunjukkan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas.

Media HLP, sebagai sebuah lembaga bersikap tidak netral dalam memberikan sebuah informasi kepada masyarakat. PT NNT, sebagai sebuah lembaga swasta terbesar di NTB memiliki kekuasaan yang lebih besar pada media dan pemerintah. Pemda, sebagai lembaga pemerintahan tidak dapat berbuat banyak pada PT NNT yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dan Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT NNT merupakan sebuah perusahaan swasta yang dapat menguasai instansi-instansi lain dalam membuat sebuah keputusan.

**Penampang 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa kata pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Bermasalah | *Mobil Hibah PT NNT Bermasalah?* | Eufemisme |
| Ilegal | *Mobil Hibah PT NNT ilegal?* | Netral |
| Mobil bodong | *Mobil Hibah PT NNT adalah Mobil Bodong?* | Netral |

Penampang di atas memperlihatkan bahwa kata *bermasalah* dapat dipadankan dengan yang lain yaitu kata *ilegal atau bodong.* Kata ilegal ini muncul sebagai akibat dari bentuk temuan pelanggaran yang dijelaskan secara panjang lebar dalam teks berita secara utuh. *Jadi* ***makna eufemisme*** *yang dapat diungkap dari teks berita 1adalah adanya upaya media untuk mengecilkan sebuah masalah agar masyarakat tidak merespon secara berlebihan kasus yang dilakukan oleh PT NNT*

**Analisis Makna Teks 2**

**Rubrik: Hukum dan Kriminal, Edisi 30-01-2013**

Judul “*Batu Guring Bakal Ditertibkan*”

Kalimat judul di atas menggunakan frase yang mengandung penghalusan makna (eufemisme), yaitu “*bakal ditertibkan*”.Makna lugas frase *bakal ditertibkan* adalah akan dilakukan *penataan* objek wisata Batu Guring. Namun, kata tersebut hanya merupakan bentuk eufemisme saja. Bentuk eufemisme yang dapat diungkap BE1 adalah *semantik* dan BE2 Flipansi. Dengan demikian, makna yang dikemukakan dari bentuk eufemisme tersebut berada di luar pernyataan. Makna sebenarnya yang disampaikan adalah makna yang bertentangan dengan makna lugasnya, yaitu *akan dilakukan penggusuran* terhadap objek wisata Batu Guring.

Media HLP menulis judul tersebut sebagai upaya untuk merespon tututan masyarakat atas pembongkaran yang dilakukan sebelumnya yaitu pembongkaran sejumlah tempat hiburan malam. Masyarakat tidak akan melakukan tindakan anarkis karena kekecewaan yang dirasakan atas pembongkaran yang dilakukan Sat Pol PP beberapa waktu yang lalu di Batu Gong. Masyarakat Batu Gong sendiri meminta Pemda NTB berlaku adil (melakukan pembongkaran terhadap tempat hiburan yang lain).

”Sebelumnya, (Satpol PP) NTB melakukan pembongkaran terhadap puluhan tempat hiburan di kawasan Pantai Batu Gong. Belakangan Satpol PP berencana melakukan penertiban tempat hiburan di kawasan Pantai Batu Guring, yang terletak di perbatasan Kabupaten Sumbawa dengan Sumbawa Barat.

Diketahui, bahwa untuk melakkan tindakan serupa (pembongkaran) membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, yaitu dari Pemda NTB dan dua kepala daerah yang bertetangga. Dengan demikian bahwa proses penertiban (pembongkaran) tersebut hanya merupakan sebuah rencana sebagai upaya untuk meredam emosi massa Batu gong.

Kembali pada masalah penggunaan frase “bakal ditertibkan” tersebut dirasakan lebih halus. Kesannya, tindakan Sat Pol PP tidak anarkis, lebih manusiawi, lebih elegan, dan akan mendapatkan simpati masyarakat. Akan tetapi, bila pihak media menulis judul “ Batu Guring akan Dibongkar” tentunya akan menimbulkan respon yang beragam. Pihak Batu Guring akan memberikan respon yang berlebihan. Stabilitas keamanan di wilayah itu akan terganggu, yang akan memunculkan kelompok tertentu untuk melakukan provokasi menolak rencana pemda yang akan melakukan pembongkaran.

**Penampang 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa kata pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Bakal ditertibkan | *Batu Guring Bakal Ditertibkan* | Eufemisme |
| Akan dibogkar | *Batu Guring akan Dibongkar* | Netral |

Makna frase *akan dibongkar* yang dimunculkan untuk menggantikan frase “bakal ditertibkan” pada kalimat judul di atas. Frase “*bakal ditertibkan”* dapat dimaknakan sebagai satu tindakan akan dilakukan pembongkaran. Seperti yang diungkapkan olehKasat Pol PP NTB, berikut ini.

Kasat Pol PP NTB Ibnu Salim yang dikonfirmasi via ponsel kemarin tidak membantah bakal melakukan penertiban kawasan hiburan tersebut.

“Kita akan tetap melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada tempat hiburan malam di wilayah batu Gong-Sumbawa,” janjinya. Diakuinya, penertiban tempat hiburan malam di wilayah perbatasan merupakan kewenangan provinsi. Namun sebelumnya, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Pol PP setempat. Koordinasi dilakukan, sehingga pada saat proses penertiban berlangsung, Pol PP NTB mendapat dukungan dari dua daerah tadi. “Kalau dengan “Kasat Pol PP KSB saya sudah melakukan koordinasi, meskipun baru sebatas pembicaraan via ponsel. Koordinasi ini juga akandilakukan dengan Sumbawa,” imbuhhnya

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media telah mengelabui masyarakat dengan menulis judul seperti itu. Media dalam menulis judul seperti itu tentu memiliki dasar dan alasan yanng kuat. Jadi tidak ditulis dengan serta-merta tanpa pertimbangan yang matang. Atau mungkin ada permintaan dari pihak tertentu yang tidak menginginkan terjadinya gejolak yang bersifat anarkis. Boleh jadi sebagai upaya untuk meredam emosi massa. *Jadi makna yang dapat ditangkap pada teks berita 2 ini adalah adanya upaya media untuk mengelabui masyarakat pembaca. Aparat dikesankan sangat adil dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak gegabah dalam merespon permintaan dari masyarakat.*

**Analisis Makna Teks 3**

**Rubrik: Hukum dan Kriminal, Edisi: 01 -02- 2013**

Judul: “ *Puluhan Oknum Dewan Diduga Terima Percikan* (*Kasus Korupsi Bansos Lobar 2009)*

Penentuan bentuk eufemisme pada analisis teks 3 adalah frase *terima percikan.* Makna lugas dari frase *terima percikan* adalah memperoleh sesuatu dalam bentuk pecahan-pecahan kecil yang tidak terlalu bernilai. Frse tersebut mengandung makna eufemisme Penggunaan frase “*terima percikan*” pada kalimat judul di atas telah melalui pertimbangan yang cukup matang. Kata “oknum” digunakan untuk menyebut pelaku tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang sebagai anggota sebuah lembaga / organisasi / pejabat (orang yang dihormati). Bentuk eufemisme BE1 berbentuk semantik dan BE2 berbentuk sirkumlokusi.

...................................................................................................................................Jumlah dana yang mengalir kekantong pribadi para oknum wakil rakyat itu mencapai ratusan juta.....koran ini menyebutkan, besaran dana yang diterima 21 oknum anggota dewan itu bervariasi. Ada yang menerima Rp 20 juta, ada juga yang menerima Rp 30 juta.

Di duga dana yang dicairkan itu, sebagian mengalir ke sejumlah anggota dewan. Bahkan, sejumlah nama oknum dewan tercantum dalam draf penerimaan bansos.

......................................................................................................................

Berdasarkan kedua bentuk eufemisme tersebut, makna yang dapat diungkapkan adalah adanya upaya penyembunyian identitas pelaku korupsi oleh media . Media mengabaikan fakta yang ada meskipun sudah teridentifikasi termsuk besar dana yang dikorupsi. Hal itu didasari oleh belum ditetapkannya sebuah keputusan oleh pengadilan.

Selanjutnya, frase “*terima percikan*” lebih halus dari “*menerima sejumlah dana*”. Kata “*terima”* adalah bentuk pasif, dan kata “*percikan*” menimbulkan kesan bahwa dana yang diterima jumlahnya kecil dan tidak pernah direncanakan. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh oknum dewan tersebut sesuatu perbuatan yang tidak disengaja dan besarnya pun tidak seberapa. Padahal diketahui bahwa oknum dewan yang berjumlah 21 orang itu tercantum dalam draf penerimaan. Besar dana yang diterima bervariasi, mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta. Dana yang dikatakan hanya berupa percikan tersebut tergolong sangat besar bagi masyarakat awam.

**Penampang 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa kata pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Oknum, terima percikan | *Puluhan Oknum Dewan Diduga Terima Percikan* | Eufemisme |
| Anggota, mengambil (korupsi) | *Puluhan anggota dewan mengambil /melakukan korupsi* | Netral |

Dengan demikian, kalimat judul tersebut tidak menguungkapkan dengan jelas dan tegas bahwa oknum anggota dewan yang sudah terdaftar dalam draf penerima aliran dana itu melakukan korupsi. Diketahui, bahwa setiap warga negara yang melakukan penyelewengan terhadap penggunaan keuangan negara dan menimbulkan kerugian negara meupakan sebuah tindakan korupsi. Berapa pun besarnya dan bagaimanapun caranya.

Jadi makna yang dapat diungkapkan berdasarkan bentuk eufemisme tersebut adalah adanya *upaya media untuk melemahkan makna sebuah kasus korupsi* yang seolah-olah pelakunya pasif. Nilai nominalnya memang tidak terlalu besar (Rp 30 juta) bila dibadinngkan dengan kasus korupsi yang sering kita dengar lewat media (milyaran bahkan triliunan rupiah). Dengan penulisan seperti itu diharapkan masyarakat tidak terlalu berlebihan dalam memberikan respon.

**Analisis Makna Teks 4**

**Rubrik: Hukum dan Kriminal, Edisi: 20 - 02 - 2013**

Berjudul*: “SPPD Fiktif : Kasus Loteng Menghilang*”

Bentuk BE1adalah stilistik dan BE2 adalah Kata *“mengilang*” pada kalimat judul di atas mengandung eufemisme. Kata menghilang mengandung makna bahwa peristiwa tersebut mengungkapkan bahwa kasus yang telah digelar sejak 2009 hilang tanpa dapat diketahui pelakunya (orang yang menghilangkan) atau tanpa proses SP3. Diketahui bahwa kasus yang melibatkan 21 oknum anggota dewan setempat sebagai tersangka.

**Mataram** –Kasus dugaan SPPD fiktif yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Lombok Tengah menghilang. Padahal, pengusutan kasus tersebut telah menetapkan 21 oknum anggota dewan setempat sebagai tersangka.

Anehnya, kasus tersebut hilang tanpa ada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Kasus yang diusut sejak tahun 2009 itu. Lenyap tanpa jejak. Bahkan, berkas penyidikannya tidak lagi tersimpan di Polres Loteng

............................................................................................................................

Hilangnya kasus SPPD fiktif di Loteng tesebut menunjukkan bahwa kinerja aparat belum maksimal (belum profesional). Keseriusan aparat dalam menangani kasus SPPD fiktif yang dilakkukan oleh oknum anggota dewan 21 orang tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini juga menunjukkan betapa lemahnya bagian pengarsipan setiap kasus yang diproses. Inilah potret penegakan hukum yang terjadi di daerah kita atau mungkin di tanah air kita yang tercinta ini. berikut ini ditampilkan judul yang bermakna eufemisme dan yang bermakna netral/lugas.

**Penampang 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa kata pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Fiktif, menghilang | *SPPD Fiktif: Kasus Loteng Menghilang* | Eufemisme |
| Palsu, lenyap | *SPPD palsu:Kasus Loteng lenyap* | Netral |

Bila dicermati isi teks secara keseluruhan, maka judul tersebut dirasa kurang tepat karena tidak dapat menggambarka peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kata *menghilang* merupakan bentuk kata kerja aktif intransitif. Kata kerja itu menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh subjek (oknum dewan) untuk melenyapkan sendiri (bantuan orang tertentu) tanpa sepengetahuan pihak lain yang menjadi lawan (penegak hukum). Satu saat kasus tersebut akan muncul kembali ada pihak tertentu yang memindahkan untuk sementara. Akan tetapi, yang terungkap dalam teks bahwa kasus itu lenyap tanpa jejak. Bahkan berkasnya pun tidak lagi tersimpan di Polres Loteng. Jadi judul yang tepat adalah “*Kasus Loteng Lenyap”.*

**Analisis Makna Teks 5**

**Rubrik: Hukum dan Kriminal, Edisi: 23 – 02 - 2013**

Judul:*Ketika Pengusutan Kasus SPPD Fiktif Meredup, Independensi Penegak Hukum Diragukan*

Penghentian penyelidikan kasus SPPD fiktif Lombok Timur (Lotim), serta hilangnya penanganan kasus SPPD fiktif Lombok Tengah (Loteng) menjadi sorotan. Pihak kepolisian pun didesak untuk memberikan penjelasan kepada publik. M Islamuddin – Mataram

Peggunaan kata “*meredup, indevendensi*, dan *diragukan*” pada judul di atas bermakna lebih halus (*eufemisme*). Kata-kata tersebut bersinonim dengan frase “*tidak dipermasalahkan, kebebasan, dan tidak dipercaya”.* Penggunaan kata-kata tersebut oleh media tidak memberikan infomasi yang jelas. Masyarakat umum tidak akan memberikan respon yang berlebihan . Sepintas, kata-kata tersebut tidak mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal itu dapat dilihat pada penggalan berita berikut.

........................................................................................................................ Kasus SPPD fiktif sejumlah oknum anggota dewan Lombok Timur telah dihentikan. Penyidik Polres Lombok Timur yang menangani kasus itu, tidak menemukan unsur kerugian Negara.

Nah, setelah diaudit BPKP, tiga penjabat yang menggantikan tiga anggota dewan itu mengembalikan uang SPPD itu. Karena telah dikembalikan, maka unsur kerugian negara tidak didukung bukti keberangkatan mereka berupa boarding pass, dan daftar manifest penumpang pesawat.

Ketua Pos Koordinasi (Posko) Pemantauan Peradilan NTB Ahyar Supriadi menyoroti kasus dugaan korupsi SPPD fiktif itu. Menurutnya, alasan penghentian kasus tersebut berbenturan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 4, tentang pengembalian kerugian keuangan negara. “ Pengembalian itu tidak menghapus pidananya, kata Ahyar. Dikatakan, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian itu salah satu faktor yang meringankan terpidana. “Ini cukup membingungkan,” cetusnya.

Selain itu, ia menyinggung soal hilangnya kasus dugaan korupsi SPPPD Fiktif Loteng tahun 2009. Ia cukup kaget mendengar, bahwa Polres Lombok Tengah dan Polda NTB tidak menanganinya. Padahal, kasus tersebut telah menetapkan tersangka. “Profesionalisme dan independensi penegak hukum sangat kering. Masa ada kasus yang hilang,” katanya.

Bila judul berita dengan gamblang menyatakan peristiwa yang sebenarnya terjadi, masyarakat akan dapat memahami hal yang sebenarnya. Respon yang diberikan masyarakat tentunya akan berbeda seiring dengan pemahamnnya terhadap judul berita. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan media sehingga penggunaan eufemisme diperlukan. Di samping itu independensi (kebebasan) penegak hukum diragukan (tidak dipercaya). Sekali lagi, pihak media nampaknya sangat berhati-hati dalam menggunakan kata bila menulis berita yang berhubungan lembaga tertentu. Aktor tentu dibahasakan dengan kata-kata tertentu pula. Bila redaksi judul tersebut di ubah menjadi “Penegak Hukum Tidak bebas dalam Memutuskan Perkara”. Bila kalimat ini yanng digunakan tentunya akan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat pembaca. Respon yang diberikan oleh masyarakat akan sangat beragam

**Penampang 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa kata pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Independensi, diragukan | *Independensi* Penegak Hukum *Diragukan* | Eufemisme |
| Kebebasan, ditolak | *Kebebasan* Penegak Hukum *Ditolak* | Netral / lugas |

Kalimat judul di atas dapat dibahasakan dengan pilihan kosa kata yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan media dan aktor yang menjadi subjek maupun objek dalam peristiwa.

**Analisis Makna Teks 6**

**Rubrik: Hukum dan Kriminal, Edisi: 19- 03 - 2013**

Judu: “*Telusuri Aktor Intelektual”*

Kalimat judul tersebut keseluruhan kosa kata yang digunakan mengandung makna eufemisme. Kata *telusuri* merupakan kata khusus dari kata *menncari.* Makna kata telusuri adalah mencari sesuatu dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran yang tinggi, terkesan tidak gegabah. Kata *aktor,* bersinonim dengan kata pelaku. Kata *Aktor* sendiri mengandung makna pelaku yang cerdik, terampil, lihai dalam setiap tindakan. Sedangkan kata *intelektual,* bersinonim dengan kata *berpendidikan, cerdas, elit,* dsb. Bila digabungkan kata aktor dengan kata intelektual akan membentuk sebuah istilah yaitu *aktor intelektual* yang bermakna *tokoh yang berada di belakang pelaku di lapangan, dalang, sutradara,* dsb.

Dengan kalimat judul seperti itu, terkesan bahwa polisi tidak gegabah dalam mencari orang yang memberi perintah kepada Sahabudin, pelaku yang sudah ditahan. Sahabudin belum mengakui siapa yang menyuruhnya melakukan tindakan penipuan itu. Meski demikian, polisi masih menyelidi kasus itu. polisi masih memeriksa sejumlah saksi.

MATARAM-Penyidik Polres Mataram terus mengembangkan kasus pmalsuan tanda tangan Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, Kini, penyidik menelusuri actor intelektual di belakang pelaku bernama Sahabuddin, yang sudah ditahan.

Kasubaghumas Polres mataram AKP Arief Yuswanto mengatakan, pelaku belum mengakui siapa yang menyuruhnya melakukan tindak penipuan itu. Meski begitu, pihaknya masih terus menyelidiki kasus itu. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi.

**Penampang 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Telusuri, aktor, intelektual | *Telusuri Aktor Intelektual* | Eufemisme |
| Mencari, pelaku, yang memberi perintah | *Mencari pelaku yang memberi perintah* | Netral |

Bila dicermati isi teks secara keseluruhan, terlihat upaya keras yang dilakukan polisi. Polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Berdasarkan gambaran yang terdapat dalam teks, maka judul teks berita tersebut yang memadai adalah “*Mencari Pelaku yang Memberi Perintah”,* karena kasus tersebut belum terbukti dilakukan secara berulang dan belum terbukti dikoordinir oleh sebuah sindikat (organisasi).

**Analisis Makna Teks 7**

**Rubrik: Hukum dan kriminal,** Edisi:27- 03 - 2013

**Judul**: *Kinerja KPU dan Panwaslu Disorot: Atribut Calon Belum Ditertibkan*

Penggunaan beberapa kata pada kalimat judul: *kinerja, atribut,* dan *ditertibkan* di atas mengandung makna eufemisme. Kata-kata tersebut bersinonim dengan kata *prestasi, tanda kelengkapan, dan dirapikan.* Sinonim-sinonim kata tersebut ada yang maknanya langsung mengacu pada makna yang sebenarnya, tetapi ada makna yang justru bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Hal yang dimaksudkan dengan penggunaan kata *kinerja* adalah penilaian yang diberikan kepada KPU dan Panwaslu yang belum bekerja secara maksimal.

.........................................................................................................................Sukardi menjelaskan, sebagai penyelenggara pemilu kedua lembaga itu sebenarnya independen. Namun dengan melihat kondisi saat ini, penyelenggara pemilu dinilai belum bekerja maksimal........

Sementara itu, ketegasan yang ditunjukkan oleh kedua lembaga pemilu (Panwaslu dan KPU) masih dilakukan hanya pada kelompok partai tertentu saja. Sikap tegas tersebut dinilai dapat merugikan dan menguntungkan kelompok tertentu pula. Inilah yang dikeluhkan oleh Tim Sukses pasangan calon.

........................................................................................................................... Menurutnya dengan ketegasan itu maka dia berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua tim Sukses pasangan Mafan, Asyatul Anwar. Ketua PKPI Lotim ini berharap KPU dan Panwaslu bersikap adil dan tegas. “Tidak hanya baliho, di media massa juga harus dihentikan sementara sampai massa kampanye tiba,” tegasnya..................................................................

Penggunaan kata *atribut* pada judul di atas adalah sebagai kata umum dari segala macam benda yang digunakan sebagai alat kampanye sebuah partai sebagai identitas. Kata *atribut* lebih mudah dan lebih elegan digunakan dalam media daripada kata-kata yang lain, seperti kata bendera, baliho, pamflet, dll. Jadi kata *atribut* cakupan maknanya lebih luas daripada kata-kata yang sudah disebutkan di atas.

Sementara itu, penggunaan frase *belum ditertibkan* yang maknanya adalah *belum dirapikan.* Rupanya, apa yang dimaksudkan dalam judul tersbebut tidak sesuai dengan makna yang dikandung oleh frase tersebut secara harfiah. Makna yang dimaksudkan adalah melakukan tindakan pencabutan atau pembebasan tempat-tempat umum dari atribut-atribut partai. Media sengaja menggunakan frase *belum ditertibkan* sebagai upaya untuk meredam emosi pendukung partai lain. Tentunya, bila media menggunakan frase *belum dicabut* dalam kalimat judul di atas akan memberikan reaksi yang berlebihan. Jadi, penggunaan kata yang mengandung makna *eufemisme* dalam media bisa jadi merupakan sebuah permintaan dari pihak tertentu.

............. Terpisah, Ketua Panwaslu Lotim Joyo supeno, mengatakan, penertiban atribut kampanye itu adalah wewenang KPU. Walau demikian pihaknya sudah menyebar Panwascam untuk lakukan pemantauan. “Kalau ditemukan akan kami laporkan ke KPU. Ini sudah kami lakukan,” tandasnya.

**Penampang 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Kinerja, atribut, belum ditertibkan | *Kinerja KPU dan Panwaslu Disorot: Atribut Calon Belum Ditertibkan* | Eufemisme |
| Prestasi, baliho, dicabut | *Prestasi KPU dan Panwaslu Disorot: Baliho Calon Belum Dicabut* | Netral |

**Analisis Makna Teks 8**

**Rubrik Hukum dan kriminal, Edisi: 27 – 04 - 2013**

**Judul: “***Wartawan Dianiaya Preman: Diduga Terkait Pemberitaan Korupsi”*

Kata “*dianiaya* *preman”* yang digunakan pada kalimat judul teks berita di atas mengandung makna *eufemisme*. Makna kata *dianiaya* mengandung makna perbuatan bengins. Sedangkan *preman* mengandung makna pelaku yang tidak memiliki identitas yang jelas (bukan TNI). Pengungkapan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh seorang preman diungkapkan secara berlebihan. Sesuai isi teks, peristiwa itu hanya merupakan pemukulan biasa yang dinyatakan secara berlebihan (hiperbola). Meskipun pihak media sendiri sudah mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap seorang wartawa.

Menurut rafidin, sebelum kejadian, dirinya sedang duduk bersama beberapa teman wartawan lainnya. Tiba-tiba dating sekelompok orang menghampirinya. Salah seorang yang diketahui bernama Sudirman alias Topan mengancamnya. Ia meminta dirinya untuk tidak mengganggu salah seorang pejabat di Dinas Dikpora Kabupaten Bima. “Saya tidak tahu permasalahannya, kemudian saya tanya maksudnya,” katanya

Namun, penulis teks berita tidak mau gegabah, atau tidak mau mengambil resiko yang lebih besar. Jadi, penggunaan kata “*preman”* dalam judul beritanya adalah sebagai upaya untuk melindungi diri dan lembaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila ada keputusan tetap dari pihak yang berwenang tetang identitas pelaku, barulah dilakukan penyebutan pelaku secara jelas dan terang.

**Penampang 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Preman | *Wartawan Dianiaya Preman* | Eufemisme |
| pelaku yang tidak memiliki identitas yang jelas (bukan TNI) | *Wartawan Dipukul bagian kepala dan pipi oleh pelaku yang tidak memiliki identitas yang jelas (bukan TNI)* | Netral |

**Analisis Makna Teks 9**

**Rubrik Hukum dan kriminal, Edisi: 06 – 05 - 2013**

**Judul: “***Kalah Tender, Kontraktor Tuding Ada Permainan*”

Kalimat judul di atas menggunakan kata yang bermakna *eufemisme,* yaitu kata *permainan*. Kata *permainan* bermakna *perbuatan yang dilakukan dengan tidak sunguh-sungguh.* Judul berita tersebut mengungkapkan adanya satu tindakan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh atau tidak serius.

Kami telah dinyatakan tidak lolos dalam tahap kualifikasi. Namun, dalam tahap pembuktian penawaran, kami akhirnya lolos,” kata Direktur CV Palapa Abdullah Wildan kepada *Lombok Post*, kemarin.

Dijelaskan, pada tahap kualfikasi, pihaknya dinyatakan gugur dengan alasan perusahaan yang dipimpin tidak memiliki bengkel las. Diduga proses pelelangan ini telah diatur sebelumnya untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Kata Abdullah, pelelangan proyek ini cenderung dipaksakan agar tidak terjadi gagal tender. Sehingga panitia memasukkan tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yakni cV Palapa, CV Karya Pejeruk, dan Anggrek. Meskipun dari awal perusahaan yang mendaftarkan diri sebanyak 13 perusahaan. “Jika hanya dua perusahaan yang lolos tahap pembuktian, proses lelang dinyatakan gagal,”bebernya.

“CV Anggrek kok bisa lolos di tahap kualfikasi. Padahal, tidak lengkap dokumen dan tidak memiliki penawaran. Kentara sekali permainan,” bebernya. Sekadar diketahui, proses pelelangan proyek pengadaan biogas ini memiliki pagu dana Rp 1,3 miliar lebih.

Penggunaan kata *“permainan”* pada kalimat judul teks berita di atas merupakan satu bentuk kehati-hatian pihak media dalam memberitakan sebuah kasus. Tentunya pihak media akan melakukan pendalaman informasi dengan mewawancarai pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut. dengan demikian akan diperoleh informasi yang berimbang. Seperti terlihat pada penggalan berita berikut ini.

Sementara itu Kepala distamben NTB M Husni yang dikonfirmasi *Lombok Post* mengaku tidak merasa ada kecurangan dan permainan dalam proses tender ini. Bahkan, pihaknya tidak pernah berpikir untuk mengatur proses lelang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan kata “permainan” pada judul berita di atas merupakan satu kehatia-hatian media dalam membuat sebuah judul berita. Media tidak ingin memfonis satu instansi telah melakukan pelanggaran sebelum pihak yang berwenang menetapkan keputusan pada satu perkara. Dalam hal ini, media perlu melakukan perlindungan diri dan lembaganya.

Berikut ini dapat dilihat perbandingan sebuah judul berita yang mengandung eufemisme dan yang bermakna netral.

**Penampang 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Permainan | *Kalah Tender, Kontraktor Tuding Ada Permainan* | Eufemisme |
| Kecurangan | *Kalah tender, Kontraktor Tuding Ada Kecurangan* | Netral |

**Analisis Makna Teks 10**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 08 – 01 - 2013**

Judul*: “Dua Ritel Asing Siap Dibuka”*

Kalimat judul di atas menggunakan kata bermakna eufemisme, yaitu kata “*ritel asing”.* Ritel asing mengandung makna *dagang eceran* yang dimiliki oleh orang-orang asing yang membuka usaha di Indonesia. Kata *ritel* merupakan istilah asing yang digunakan dalam judul teks berita dengan berbagai macam pertimbangan oleh media. Dengan penggunaan istilah asing ini, masyarakat awam tidak akan bereaksi secara berlebihan dengan kehadiran pedagang-pedagan eceran yang begitu banyak akhir-akhir ini. Walau kenyataannya, di setiap kecamatan sudah terlihat begitu banyak swalayan beroprasi dan menjadi salah satu tujuan berbelanja masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sangat mengganggu keberadaan dagang eceran (kios-kios) kecil maupun menengah yang dioprasikan oleh masyarakat setempat. Tentuya ini merupakan persaingan yang tidak sehat karena umumnya masyarakat yang mengooprasikan (dagang eceran ) di kios-kios kecil maupun menengah tidak didukung permodalan yang kuat. Sementara itu ritel-ritel asing sangat didukung dengan permodalan yang kuat, bahkan mereka berani merugi selama sepuluh tahun.

.......“Ritel asing punya kekuatan lebih baik dari segi teknologi maupun permodalan. Meskipun iklim industry Indonesia kurang saat ini kurang mendukung, rite lasing siap menghadapi. Bahkan dari segi permodalan mereka siap rugi 10 tahun,” ujarnya.....

Keberadaan *ritel asing* yang begitu marak di berbagai daerah kahir-akhir ini merupakan satu bentuk ketidakberdayaan pemerintah melindungi ekonomi masyarakat kecil (pedangang eceran lokal) dari serbuah pengusaha asing.

JAKARTA-Pengusaha ritel dalam negeri harus bersiap menghadapi persaingan yang makin ketat. Tahun ini dipastikan bakal ada dua rite lasing yang masuk di Indonesia yaitu Ikea dan Ministop dari Jepang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Pujianto mengatakan, tahun ini ada beberapa rite lasing bakal meramikan sector ritel nasional. Dua diantaranyayang sudah pasti yaitu perusahaan dari Swedia, Ikea dan Ministop dari Jepang. Sementara itu, sekitar akhir tahun lalu perusahaan ritel asal Jepang, Family Mart telah mereaslisaikan investasinya. “Gerai Family Mart dibangun di Cibubur,” terangnya pada JPNN, kemarin.

Selain dua perusahaan yang sudah pasti dibangun tersebut, Pujianto mengungkapkan ada dua perusahaan yang sedang dalam penjajakan. Ia berkata, pasar Indonesia yang besar masih menjadi magnet bagi rite lasing. Untuk, itu ritel local harus segera berbenah untuk bisa bersaing.

Tahun ini, lanjut udjianto, bakal menjadi tahun yang berat bagi ritel local. Di tengah regulasi yang ada dan gempuran perusahaan rite lasing, ritel local terus terhimpit. Iamemastikan tahun ini, ekspansi ritel local tak akan segencar tahun lalu. Dan itu berbanding terbalik dengan ekspansi yang dilakukan oleh rite lasing.

Fakta di atas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah kepada ekonomi kerakyatan. Tentunya hal ini yang sangat dikhawatirkan akan terjadi di Tanah Air Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia pada produk impor lambat laun akan semakin tinggi. Tingginya kebutuhan tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama produk-produk impor. Kemandirian negara akan semakin berkurang. Persaingan negara-negara asing untuk merebut pasar Indonesia akan semakin meningkat. Setiap kebijakan pemerintah akan banyak dipengaruhi ooleh kepentingan negara-negara asing tersebut. Masyarakat akan dimanjakan dengan berbagai barang produk luar yang sangat berkualitas, murah, dan sangat menarik. Pada akhirnya, rakyat Indonesia hanya akan menjadi konsumen yang pasif dan tidak mampu untuk berkreatifitas.

Dengan demikian, penggunaan intilah *ritel* tersebut merupakan satu bentuk pegelabuan media kepada pembaca (masyarakat awam) tentang ini teks berita. Media tidak transparan dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Boleh jadi hal ini merupakan satu bentuk interpensi kelompok tertentu terhadap media dalam penyampaian sebuah informasi kepada masyarakat pembaca.

Berikut ini ditampilkan perbandingan kalimat judul yang tidak mengandung eufemisme.

**Penampang 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Ritel asing | *Dua Ritel asing Siap Dibuka* | Eufemisme |
| Dagang eceran | *Dua Dagang Eceran Asing Siap Dibuka* | Netral |

**Analisis Makna Teks 11**

**Rubrik : Ekonomi Bisnis, Edisi 31-01-2013**

**Judul: “ Survey Daerah Rawan Pangan”**

Kalimat judul di atas, keseluruhan kata yang digunakan mengandung *eufemisme*. Kata *survey,* bermakna *penyelidikan atau peninjauan,* melakukan peninjauan atau penyelidikan terhadap (keadaan) suatu daerah. Sedangkan dalam teks berita kata *survey,* mengandung makna *melakukan penyesuaian* *data dengan kondisi di lapangan.* Makna yang dikemukakan dalam teks berita ini adalah lebih mengarah kepada seberapa banyak daerah yang mengalami rawan pangan. Sementara dalam judul, kata *survey* bermakna sebatas melakukan penyelidikan atau pemantauan. Belum diketahui seberapa banyak orang yang/ daerah yang mengalami daerah rawan pangan. Namun, yang terjadi adalah seberapa banyak penambahan daerah yang mengalami rawan pangan. Setiap tahun bantuan selalu meningkat.

............................................................................................................

Dipaparkan tahun 2012 lalu Kantor Ketahanan Pangan mendapat bantuan Rp 37 juta dari pemerintah pusat untuk PDRP. Anggaran itu kemudian digunakan untuk menanggulangi rawan pangan di Desa Gontar Baru dan Pamulung.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan Sembilan bahan pokok. Seperti beras, susu dan beberapa kebutuhan lainnya.

“Setiap tahun jumlah bantuan selalu meningkat. Tahun 2011 rp 25 juta. Tahun lalu meningkat menjadi 37 juta. Mudah-mudahan tahun ini kami dapat dan meningkat,” katanya.

Dengan demikian, judul pada teks berita memberikan informasi yang menyesatkan. Terkesan informasi yang diberikan bahwa situasi yang terjadi tidak terlalu genting.

Frase berikutnya adalah “daerah rawan pangan”, adalah *daera yang mudah, berisiko untuk mengalami suatu masalah atau gangguan.* Informasi yang didapatkan pembaca dari judul berita tersebut bahwa daerah itu hanya akan mengalami gangguan pangan. Namun, kenyataannya bahwa hal yang dikemukakan dalam teks berita justru keadaan yang sebaliknya. Daerah yang teridentifikasi rawan pangan justru mengalami kekurangan bahan kebutuhan pokok yang dipicu oleh rendahnya hasil pertanian. Setiap tahun pemerintah memberikan tambahan bantuan kebutuhan pokok kepada keluarga miskin.

.................................................................................................................

Meskipun belum ada kepastian, dia yakin tahun ini pemerintah Kaupaten Sumbawa melalui Kantor Ketahan Pangan tetap akan mendapat bantuan Penangnanan daerah Rawan Pangan (PDRP) daripemerintah pusat. “Setiap tahun kita selalu dapat. Saya yakin tahun ini kita juga tetap dapat,” ujarnya.

...............................................................................................................

Berikut ini dapat dilihat perbandingan judul berita yang menggunakan eufemisme dengan yang tidak mengandung eufemisme (netral).

**Penampang 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Survey,.. rawan pangan | *Survey Daerah Rawan Pangan* | Eufemisme |
| Penyesuaian jumlah data....masyarakat miskin penerima sembako | *Penyesuaian Jumlah Data Penerima Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Miskin dengan Data dari Statistik* | Netral |

Mencermati kedua judul di atas tentunya kita dapat menentukan judul yang dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya sesuai teks berita. Judul dengan makna yang netral inilah yang dapat mewakili keadaan sesuai dengan teks beita. Akan tetapi, bila judul yang bermakna netral ini yang digunakan tentu akan memunculkan beragam respon dari masyarakat. Pemda setempat akan merasa tertampar karena dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di daerahnya. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan maka digunakanlah kata yang bermakna lebih halus (eufemisme) untuk memberitakan permasalahan yang terjadi

**Analisis Makna Teks 12**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 02 – 02-2013**

**Judul :** *Defisit 2012 Terburuk Sepanjang Sejarah RI*

Kalimat judul teks berita di atas, menggunakan eufemisme, yaitu kata *“defisit*”. Kata *defisit* diambil dari istilah asing yang bermakna *kerugian* yang disebabkan oleh tingginya konsumsi (impor) dalam negeri, sedangkan nilai ekspor rendah.

JAKARTA-Alarm bahaya sector perdagangan internasional mulai menyala. Lonjakan impor dan susutnya ekspor menorehkan catatan deficit perdangan terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, kinerja ekspor sepanjang Januari – Desember 2012 lalu tercatat sebesar USD 190,04 miliar, turun 6,61 persen dibandingkan realisasi 2011 yang mencapai USD 203,49 miliar. Ada pun impor pada 2012 mencapai USD 191,67 miliar, naik 8,02 persen disbanding realisasi 2011 yang sebesar USD 177,43 miliar.

“Sehingga, neraca perdagangan mencatat defisit USD 1,63 miliar,” ujarnya kemarin.

Dalam sejarah Indonesia, deficit neraca perdagangan terakhir terjadi pada 1961, namun nilainya relative jauh lebih kecil dibandingkan deficit tahun lalu. Setelah 1961, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus. Bahkan, pada 2006 lalu surplus perdagangan mencetak rekor terbesar hingga USD 39,73 miliar.

Kalimat judul tersebut tidak berdampak besar bagi masyarakat awam, yang tidak memahami makna kata defisit. Hanya berpengruh pada orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan terhadap masalah ekspor-impor.

Bila kalimat judul tersebut ditulis menggunakan kata bermakna netral (tidak memiliki kepentingan), tentunya akan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Bukan tidak mungkin akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat akan melakukan spekulasi untuk menyelamatkan usaha mereka. Hal itulah yang mungkin ingin dihindari oleh media. Atau mungkin juga merupakan sebuah pesanan dari pihak tertentu yang tidak menginginkan terjadinya gejolak di tengah-tengah masyarakat..

Berikut ini bisa dicermati perbandingan kalimat judul yang menggunakan kata bermakna eufemisme dan yang bermakna netral.

**Penampang 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Defisit | *Defisit 2012 Terburuk Sepanjang Sejarah RI* | Eufemisme |
| Kerugian | *Kerugian 2012 Terburuk Sepanjang Sejarah RI* | Netral |

Kalimat judul yang bermakna netral tersebut akan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat pembaca seluruh kalangan. Pembaca akan tertarik untuk membaca teks berita secara keseluruhan sehingga informasi yang diperoleh lengkap dan sempurna. Tidak menimbulkan kesalahan pemahaman di kalangan masyarakat awam tentang kata defisit. Sebaiknya judulteks berita yang menggunakan istilah asing dilengkapi dengan pengertian dalam bahasa Indonesia.

**Analisis Makna Teks 13**

**Rubrik: Ekonomi Bisnis, Edisi: 22-02-2013**

**Judul:** *Pengerajin Tahu-Tempe Minta Disubsidi*

MATARAM-Harga kedelai yang tidak beranjak turun masih memusingkan para pengrajin tahu-tempe di Mataram. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup.

Agar tidak terlalu terbebani dengan tingginya harga bahan baku, pengerajin tempe meminta pemerintah kembali mengucurkan dana subsidi pembelian kedelai. Siti Munawarah, dalah satu pengerajin tempe di Kelurahan Kekalik Jaya. Mataram, mengatakan bahwa harga kedelai saat ini sekitar Rp 7,800 per kg dan diperkirakan akan terus naik.

**........................................................................................................................**

Kata *subsidi* pada kalimat judul di atas mengandung eufemisme yang berasal dari bahasa asing. Kata *subsidi* bermakna *bantuan* dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Terkadang masyarakat awam kurang memahami istilah subsidi, lebih-lebih pada sebuah judul teks berita. Sehingga tugas dan fungsi media cetak koran sebagai salah satu sarana penyampai informasi menjadi lemah dan kurang efektif. Hanya dapat dipahami oleh kalangan menengah ke atas saja. Cermati penampang yang membandingkan judul teks berita yang mengandung eufemisme dan yang bermakna netral berikut.

**Penampang 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Disubsidi | *Pengerajin Tahu-Tempe Minta Disubsidi* | Eufemisme |
| Dibantu dalam keuangan | *Pengerajin Tahu-Tempe Minta Dibantu dalam keuangan* | Netral |

Mencermati kedua judul di atas, judul yang bermakna netral dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat awam karena kata yang digunakan mengandung makna yang lugas. Kalimat judul yang lugas/ netral dapat mengungkapkan kondisi para pengerajin tahu-tempe yang sebenarnya. Mereka dalam keadaan kesulitan melanjutkan usahanya, bahkan cenrung bangkrut. Dengan demikian, konsumen/masyarakat banyak (awam) dapat memahami kesulitan yang dialami oleh para pengusaha dan memaklumi naiknya harag produk mereka sebagai wujud dari rasa empati mereka.

**Analisis Makna Teks 14**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 15-02-2013**

**Judul:** *Seribu Investor Jepang Incar Relokasi Ke Indonesia*

Kalimat judul di atas menggunakan dua buah kata dari bahasa asing. Kedua kata tersebut digunakan sebagai upaya untuk memperhalus makna (eufemisme) untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Di dalamnya ada informasi yang merugikan terutama masyarakat yang anti terhadap keberadaan pengusaha asing.

JAKARTA-Indonesia bagai magnet yang terus menarik minat para investor asing. Kali ini, sekitar 1000 investor Jepang menyatakan minat untuk merelokasi pabriknya di berbagai Negara ke Indonesia

................................................................................................

Bila kalimat judul di atas menggunakan kata yang bermakna netral atau makna secara literal, dikhawatirkan akan memunculkan berbagai respon yang negatif. Respon tersebut tentunya merupakan sebuah bentuk penolakan dari masyarakat yang anti terhadap kelompok kapitalis. Bandingkan kedua kalimat judul berikut ini.

**Penampang 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Investor, relokasi | *Seribu Investor Jepang Incar Relokasi ke Indonesia* | Eufemisme |
| Pemilik modal (orang kaya), pemindahan | * *Seribu orang kaya Jepang Incar tempat memindahkan perusahaannya ke Indonesia* * *Seribu pemilik modal Jepang Incar tempat memindahkan perusahaannya ke Indonesia* | Netral |

Kata *investor* bermakna *pemilik modal (*orang kaya), dan kata *relikasi* bermakna *pemindahan perusahaan ke Indonesia* yang berada di di negara lain. Secara sepintas tentunya kita akan merasa bangga dengan kepercayaan orang asing terhadap bangsa kita yang cukup kondusif sehingga mereka sangat berkeinginan (mengincar) untuk berusaha di Indonesia.

......................................................................................................

Menurur Gatot, sebagai tindak lanjut atas minat para investor Jepang tersebut, BNI kini tengah menyiapkan pengembangan sebuah kawasan industry khusus atau Industrial Estate dengan luas hingga 1.000 hektar di Karawang, Jawa Barat. “Kawasan industry ini disiapkan untuk para pebisnis Jepang yang ingin merelokasi usahanya ke Indonesia,” katanya melalui keterangan resmi kemarin (24/2)..........................................................................................................

Penggalan teks berita di atas memperlihatkan begitu antusiasnya perbankan kita dalam merespon para pengusaha Jepang tersebut. Bahkan berusaha untuk menyediakan seribu hektar lahan relokasi perusahaan Jepang di daerah Karawang. Bila saja perhatian itu diberikan kepada pengusaha pribumi, bukan tidak mungkin pengusaha kita bisa mampu bersaing dengan pengusaha asing. Hal ini menunjukkan bentuk keberpihakan lembaga tertentu kepada sekelompok pengusaha asing. Sudah terlihat arah pengembangan ekonomi yang berpihak pada kapitalis, bukan nasionalis.

Kita tak perlu mengelak adanya manfaat dari tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi disisi lain, bangsa kita akan selalu menjadi incaran negara asing yang ingin menguasai perekonomian bangsa kita. Kita akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam bentuk yang lain (tidak secara fisik). Kita tidak akan bisa menjadi tuan di negara sendiri, tetapi akan menjadi budak di negeri sendiri.

**Analisis Makna Teks 15**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 05-03-2013**

**Judul :** *Remitansi Turun Akibat Moratorium*

Kalimat judul di atas mengandung kata yang memperhalus makna (eufemisme). Kata yang dimaksud adalah kata *remitansi* bermakna *kriman uang dari TKI,* dan kata *moratorium* bermakna *penundaan pengiriman TKI.* Kedua kata tersebut membentuk hubungan akibat- sebab. Remitansi terjadi karena adanya moratorium. Kedua hal tersebut memberikan dampak negatif, bagi pemerintah yaitu tidak adanya pemasukan pendapatan (devisa) bagi negara dan bagi rakyat, hilangnya kesempatan mereka untuk mendapatkan penghasilan bagi kehidupan keluarga. Bandingkan judul berikut yang mengandung makna eufemisme dan bermakna netral (literal).

**Penampang 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Remitansi, moratorium | *Remitansi Turun Akibat Moratorium* | Eufemisme |
| Kiriman uang dari TKI, penundaan pengiriman TKI | *Kiriman Uang dari TKI Turun Akibat Penundaan Pengiriman TKI* | Netral |

Kalimat judul di atas menggunakan kata dari istilah, yaitu kata remitansi dan moratorium. Kedua kata tersebut tidak dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat awam. Penggunaan kedua kata tersebut lebih halus dan lebih sopan bila dibandingkan dengan maknanya dalam bahasa Indonesia. *Remitansi* bermakna *kiriman uang dari TKI* dan kata *moratorium* bermakna *penghentian sementara pengiriman TKI.*

Bila dicermati, dengan dibukanya pengiriman TKI akan memberikan keuntungan berupa pemasukan devisa bagi negara dan mengurangi beban pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, keuntungan dari bagi rakyat adalah memperoleh pekerjaan yang mendatangkan penghasilan bagi mereka. Hal ini yang tidak diungkapkan secara transparan oleh media dengan menggunakan kata secara lugas pada judul berita di atas. Media menggunakan bentuk eufemisme untuk menyembuunyiikan maksud yang sebenarnya.

**Analisis Makna Teks 16**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 25-03-2013**

**Judul:** *MUI: Masyarakat Perlu Waspadai Setiap Produk*

Kalimat judul di atas berisi imbauan kepada umat Islam yang disampaikan oleh MUI. Imbauan tersebut mengandung permasalahan yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh umat Islam. Bila tidak diikuti imbauan tersebut berakibat fatal dan berdosa bagi yang melanggarnya. Sayang sekali, imbauan tersebut bernilai rasa melemahkan karena menggunakan kata yang lebih halus, lembut, yaitu kata *perlu waspada.* Perhatikan penggalan teks berita berikut ini.

MATARAM-Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar waspada terhadap setiap produk, baik produksi local maupun barang impor: Pasalnya tidak menutup kemungkinan bahan campurannya mengandung zat yang diharamkan Islam.

“Perlu ada keraguan atau was-was terhadap setiap produk olahan. Apalagi banyak yang dating dari Cina. Kami tidak mengatakan haram, tapi patut diragukan kehalalannya,” kata Ketua MUI NTB Prof Syaiful Muslim.

Dikatakan, berbagai produk berbahan baku pangan local, seperti singkong ketika sudah masuk industry olahan pasti dicampur dengan bahan lain yang masih diragukan kehalalnnya. Bahan pencampur makanan bisa saja mengandung bagian dari babi yang diharamkan dalam Islam. Bahkan rambut dari hewan itu bisa digunakan untuk kuas.

Selain itu, carbon penjernih air yang dating dari luar negeri tidak menutup kemungkinan juga mengandung bahan babi. Fakta ini belum diketahui secara luas oleh umat muslim.

.........................................................................................................

Mencermati isi penggalan teks berita tersebut, kondisi barang-barang yang diproduksi oleh berbagai negara cukup mengkhaawatirkan. Barang-barang tersebut, baik berupa makanan, obat-obata, kosmetik, dan berbagai peralatan rumah tangga yang diproduksi oleh negara non-Muslim, perlu dikhawatirkan kehalalannya. Bandingkan judul-judul berita yang ada dalam penampang berikut.

**Penampang 16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Perlu Waspadai | *MUI: Masyarakat Perlu Waspadai Setiap Produk* | Eufemisme |
| Harus Berhati-hati | *MUI: Masyarakat harus berhati-hati setiap Produk* | Netral |

Mencermati isi teks berita tersebut, farse *perlu waspadai* yang digunakan pada judul di atas cendrung melemahkan. Sementara itu kondisi barang-barang yang didatangkan dari luar demikian mengkhawatirkan umat Islam. Jadi judul imbauan tersebut harus lebih tegas dan meyakinkan. Dalam hal seperti itu harus menunjukkan ketegasan karena menyangkut masalah keyakinan. Sebagai agama mayoritas, tentunya merupakan konsumen terbanyak di Indonesia. Menyadari sebagai konsumen terbanyak, umat Islam harus dapat memberikan nilai tawar terhadap sebuh produk yang akan dipasarkan di Indonesia demi kemaslahatan umat.

**Analisis Makna Teks 17**

**Rubrik: Ekonomi Bisnis, Edisi: 11-04-2013**

**Judul**: *Kartel Rugikan Konsumen Rp 5 T*

Kata *kartel* pada judul berita di atas merupakan istilahasing yang tidak dapat dipahami secara transparan oleh masyarakat (pembaca awam). Kata *kartel* meerupakan salah satu bentuk *eufemisme*, yang bermakna *kesepakatan sekelompok pengusaha yang mengatur harga barang tertentu.* Istilah tersebut sengaja digunakan dalam judul agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal ini dapat dikatan sebagai satu upaya yang dilakukan untuk mengelabui pembaca. Perhatikan penggalan teks berikut ini.

JAKARTA-Lonjakan harga bawang putih dan daging sapi tidak hanya menghantam angka inflasi namun juga menggerus kantorng konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya hitungan menarik mengenai seberapa besar kerugian yang harus ditanggung masyarakat akibat lonjakan harga yang diduga berbau *kartel* ini. ......................................................

Mencermati penggalan teks berita tersebut, masyarakat akan mempertanyakan tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelindung rakyat. Pengaturan harga barang kebutuhan pokok harus diatur oleh pemerintah, bukan ditentukan oleh sekelompok orang. Pemerinta harus tegas dalam hal pengaturan harga barang, tidak boleh ada interfensi dari pihak manapun.

Dalam penampang berikut ini, dapat dibandingkan judul teks berita yang mengandung makna eufemisme dan makna netral.

**Penampang 17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Kartel, Konsumen | *Kartel Rugikan Konsumen Rp 5 T* | Eufemisme |
| Kesepakatan pengusaha mengatur harga, pembeli (pemakai) | *Kesepakan pengusaha mengendalikan harga barang tertentu Rugikan pembeli (masyarkat pemakai barang Rp 5 T* | Netral /lugas |

Kedua judul dalam penampang di atas memiliki maksud yang sama, tetapi memunculkan respon yang berbeda di kalangan pembaca. Pembaca tentu akan mempertanyakan dan mencari tahu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan isi teks secara keseluruhan, judul yang dapat mengungkapkan permasalah yang terjadi adalah “*Kesepakatan Pengusaha Mengendalikan Harga Barang Tertentu Rugikan Masyarakat Pemakai Barang Rp 5 T”*

**Analisis Makna Teks 18**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 25-04-2013**

**Judul:** *Monitoring Utang Swasta Diperketat*

Bentuk eufemisme yang ditemukan pada judul berita teks 18 tersebut, bila dilihat dari BE1 adalah berbentuk *semantik* dan BE2 adalah *satu kata untuk menggantikan kata yang lain.* Maknalugas kata monitoring adalah satu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh orang terhadap satu situasi. Aktifitas yang dilakukan tidak mendetail. Akan tetapi media menggunakan kata monitoring tersebut sebagai bentuk eufemisme (memperhalus makna) dari satu aktifitas yang sangat intensif, teliti dan mendetail. Hal ini terlihat dalam penggalan teks berikut ini.

....................................................................................................................

Selanjutnya diketahui, pemerintah harus memonitor utang swasta karena penuntasannya dapat menimbulkan berbagai risiko dan memicu krisis. Misalnya, salah satu penyebab parahnya imbas krisis moneter 1997 adalah banyaknya perusahan yang memiliki utang dala denominasi USD, namun pendapatnya kebanyakan dlam denomisai Rupiah. Akhirnya, ketika nilai tukar Rupiah Akibatnya, ketika nilai tukar Rupiah anjlok, perusahaan koaps karena tidak sanggup membayar utang.

Data menunjukkan, rasio utang swasta terhadap produk domestic bruto (PDB) yang mencapai kisaran 30 persen, kini memang sudah melampaui rasio utang pemerintah terhadap PDB yang di kisaran 23 persen.

Dari sisi nilai, pada akhir 2011, utang luar negeri swasta masih di kisaran USD 106,73 miliar, tapi per Januari 2013 sudah meningkat menjadi USD 125,05 miliar. Sedangkan utang luar negeri pemerntah yang pada 2011 sebesar USD 123,13 miliar, pada akhir 2012 hanya naik tipis menjadi USD 126,11 miliar.

*Lantas apa yang akan dilakukan pemerintah?*

Mahendra mengatakan, saat ini Kementrian Keuangan tengah memfinalisasi system monitor utang swasta melalui instrument aturan pajak. “Ini untuk transparansi. Kalau ada utang (luar negeri) harus jelas asal dan peruntukannya,” upaya.

......................................................................................................................

Mencermati penggalan teks berita tersebut, terlihat adanya upaya yang intesnsif dari pemerintah. Pemerintah tidak hanya sekedar melihat secara sepintas permasalahan utang swasta. Kata *monitoring* mengandung makna lebih konkrit aktifitas yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian setiap aktifitas pihak swasta dengan menggunakan instrumen pajak. Media menggunakan istilah *monitoring* lebih kepada upaya untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Walaupun sebenarnya hal yang diungkapkan dalam isi teks lebih mengarah pada satu situasi yang cukup genting. Hal ini dapat dicermati pada penggalan teks pada paragraf pertama penggalan teks di atas.

Bila media menggunakan kata yang bermakna lugas pada judul teks berita dapat dilihat pada penampang berikut.

**Penampang 18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Monitoring, diperketat | *Monitoring Utang Swasta Diperketat* | Eufemisme |
| Memeriksa / mengecek, dibatasi | *Pemeriksaan, Utang Swasta Dibatasi* | Netral / |

Judul teks yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan isi teks adalah judul yang bermakna netral. Judul tersebut mengacu pada aktifitas yang dilakukan oleh wakil Menteri Keuangan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam hal ini media tidak transparan dalam mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Penulisan sebuah judul berita tentunya telah melakukan pertimbangan yang matang, walau menyesatkan. Atau mungkin juga merupakan sebuah permintaan untuk membentuk opini publik bahwa situasi keuangan swasta baik-baik saja.

Makna eufemisme yang dapat diungkapkan bahwa *media berupaya membentuk opini publik bahwa transaksi keuangan yang dilakukan pihak swasta normal-normal saja. Monitoring yang dilakukan oleh pemerintah sebagai satu aktivitas yang biasa saja dan tidak berlebihan.*

**Analisis Makna Teks 19**

**Rubrik Ekonomi Bisnis, Edisi: 08-05-2013**

**Judul:** *Apjati Angkat Martabat Pahlawan Devisa*

Bentuk eufemisme yang digunakan oleh media dilihat dari BE1 adalah berbentuk *retoris* dan dilihat dari BE2 adalah berbentuk *ekspresi piguratif*. Penggunaan eufemisme tersebut sebagai upaya untuk mengangkat martabat/harga diri para pekerja yang bekerja di sektor nonformal. Sebutan pahlawan tentunya diberikan kepada seseorang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Siapapun dia tidak akan berkeberatan bila sebutan itu diberikan kepada para TKI. Namun yang perlu diketahu bahwa jangan penyebutan itu hanya untuk memberikan sanjungan saja. Tanpa pernah memperhatikan perjuangan dan pengorbanannya dengan memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan. Mengapa kita tidak memberikan predikat yang lebih besar seperti “pahlawan kemanusiaan ataupun pahlawan pembangunan”. Bukankah sudah terbukti bahwa mereka berjuang untuk menghidupi anak,istri, orang tua, keluarga, dll. Bahkan tidak sedikit desa-desa yang mereka tinggalkan dalam keadaan masih terisolir. Kini sudah bisa dijangkau walau hanya dengan kendaraan roda dua berkat dana yang mereka kirimkan untuk membangun desa-desa mereka. Sangat disayangkan, mereka digelari sebagai pahlawan devisa karena aliran dana yang mereka kirimkan melalui bank-bank menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Namun nasib mereka yang tidak jelas manakala kembali ke tanah air. Terkadang saat mereka sampai di terminal atau pelabuhan, sudah ditunggu oleh preman-preman yang akan memangsa (memeras) mereka.

Media sebagai sarana penyampai informasi, turut berperan dalam memberikan perlindungan. Jangan hanya memberikan sanjungan hampa. Sampaikanlah apa adanya hal yang berkaitan dengan pemberitaan yang berkaitan dengan para tenaga kerja. Perhatikanlah penampang berikut ini.

**Penampang 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Martabat, Pahlawan Devisa | *Apjati Angkat Martabat Pahlawan Devisa* | Eufemisme |
| Harga diri, TKI | *Apjati Angkat Hargadiri TKI* | Netral |

Kalimat judul yang dapat dipahami oleh para buruh migran kita adalah kalimat judul yang mengandung makna lugas/netral apa adanya. Tidak sedikit para Tki kita yang tidak bisa baca tulis. Pendengaran mereka lebih akrab dengan sebutan TKI, budak (bhs. Malaysia). Sementara itu, sebutan “pahlawan devisa” sangat aneh di telinga mereka. Yang lebih mengherankan mereka adalah mereka tidak mendapatkan perlakuan yang layak.

Makna eufemisme yang dapat dikemukakan adalah bahawa *penggunaan kata/frase yang memperhalus makna oleh media tidak berpengaruh langsung (kurang efektif) kepada sasaran (TKI).*

**Analisis Makna Teks 20**

**Rubrik: Politik, Edisi: 10-01-2013**

**Judul:** *TGB: Cawagub Masih di Lauhul Mahfuz*

MATARAM-Para Kandidat calon wakil gubernur yang ingin dilamar kandidat petahana Dr. TGH M Zainul Majdi sebagai pendamping masih layak berharap untuk digandeng. Pasalnya, TGB masih benar-benar “ masih “jomblo”. “Soal siapa yang akan menjadi cawagub itu masih ada di lauhul mafuz,” ungkap TGB di depan puluhan anggota dan pengurus Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah (FKAT) NTB saat silaturrahmi, kemarin

................................................................................................................

Kata yang mengandung makna eufemisme pada judul judul teks 20 adalah *Lauhul Mahfuz*. Istilah *Lauhul Mahfuz* , dilihat bentuk eufemisme BE1 adalah berbentuk *retoris,* sedangkan dilihat bentuk BE2 adalah berbentuk *ekspresi piguratif.* Makna istilah *Lauhul Mahfuz* secara lugas adalah menyatakan suatu tempat ditentukannya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia oleh Tuhan.

Sementara itu, media HLP menggunakan istilah tersebut menjadi salah satu unsur pembentuk judul memiliki pertimbangan. Di samping pertimbangan memperhalus makna, juga pertimbangan yang cukup realistis adalah situasi menjelang pilkada. TGB, sebagai kandidat dari inkamben memiliki peluang yang cukup besar. NTB yang mayoritas memeluk agama Islam, sangat akrab dengan istilah tersebut. tentunya simpati masyarakat akan semakin besar karena dapat menjadi sebuah pencitraan. Hal ini terlihat pada penggalan teks berikut.

....................................................................................................................

Berbagai alsan mendasar yang menguatkan niat untuk kembali maju dalam pemilukada, juga disampaikan TGB, yang juga salah satu alumni Timur Tengah. Salah satunya terkait maslahul ummah, alias persoalan keumatan yang mengharuskan untuk ikut mengabdikan diri dalam pembangunan masyarakat. Terlebih lagi, NTB merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Indonesia. “setahun saya meneguhkan hati dan menimbang, apakah maju kembali atau tidak” bebernya.

Bahkan, TGB mengaku sampai mencari figure, yang mungkin lebih tepat dan bisa membawa percepatan pembangunan yang lebih luar biasa. Namun, dengan kerendahan hati, kandidat-kandidat yang muncul masih belum cukup meyakinkan.

....................................................................................................................

Tentunya media juga berperan membentuk opini publik. Cermati judul yang ada dalam penampang berikut ini.

**Penampang 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Lauhul Mahfuz | *TGB: Cawagub Masih di Lauhul Mahuz* | Eufemisme |
| Masih rahasia Tuhan/ belum ada kepastian | *TGB: CawagubMasih Rahasia Tuhan (belum ada kejelasa)* | Netral |

HLP sebagai sebuah media penyampai informasi, tentunya harus memperhatikan setiap kata atau istilah yang digunakan dalam sebuah judul. Judul yang baik harus dapat mengungkapkan maksud secara garis besar mengenai isi teks. Untuk menggunaan kata harus benar-benar diperhatikan. Jangan menggunakan kata-kata atau istilah yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu atau agama tertentu. Gunakan kata atau istilah yang lebih lugas/netral.

Kalimat judul “ TGB: Cawagub Masih Rahasia Tuhan” ini merupakan kalimat judul yang lugas/netral. Judul tersebut lebih mudah diterima dan dipahami oleh seluruh kalangan. Sama-sama mengungkapkan tentang sikap religius yang ditunjukkan oleh TGB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *media HLP dalam menulis judul berita terkesan berpihak dan turut mendukung majunya TGB sebagai cagub dalam pilkada. Media terkesan membuat pencitraan kepada masyarakat yang mayoritas beragama Islam.*

**Analisis Makna Teks 21**

**Rubrik Politik, Edisi: 07-02-2013**

**Judul :** *Kirim SMS dari Makkah, Anas Tak Disebut*

Kalimat judul pada teks 21 menggunakan frase eufemisme *tak disebut.* Frase yang memperhalus makna tersebut mengandung pengertian bahwa *SBY sudah tidak peduli, memponis bersalah, melupakan dsb.* Bentuk eufemisme pada frase tersebut dilihat dari BE1 adalah berbentuk *semantik* dan dilihat dari BE2 adalah *berbentuk makna di luar pernyataan*.

Sikap SBY yang diungkapkan pada teks tersebut bahwa SBY tidak tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Kiriman SMS dari Makkah sebagai sinyal yang kuat menunjukkan ketidaktegasan SBY. SMS hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu sehingga yang menerima SMS membentuk opini sendiri dan membuat keputusan secaara sepihak. Hal ini terlihat pada penggalan teks berikut.

.......................................................................................................................

Kemarin, tepat sehari sebelum kepulangan, SBY berkirim pesan pendek dari Makkah ke sejumlah petinggi partai. Di antara isinya, SBY terus memohon petunjuk dari pertolongan Allah SWT selama berada di tanah suci. Yaitu, agar Demokrat segera dibebaskan dari berbagai cobaan berat yang dihadapi saat ini. Namun, dari pesan pendek yang kemudian menyebar luas itu, ada hal yang ganjil. Ketua umum DPP PD Anas Urbaningrum tidak disebut secara eksplisit sebagai pihak yang diituju untuk SMS itu. Malah, sekjen Edhie Baskoro Yudoyono (Ibas) justru yang disebut. Bahkan, bersama sekretaris dewan pembina, sekretaris dewan kehormatan, dan ketua fraksi PD DPR, sekjen juga termasuk yang diminta untuk menyebarluaskan SMS itu ke semua kader di seluruh tanah air. “ Iya itu SMS-nya Pak SBY, saya juga terima,” kata Syarief saat dikonfirmasi.

...........................................................................................................

Mengacu pada penggalan teks di atas jelas menunjukkan bahwa SBY sudah tidak lagi menganggap Annas sebagai Ketua Umum PD. Hal ini menujukkan kurang bijaknya SBY dalam memutuskan perkara sebelum terbukti kesalahan yang dilakukan Anas oleh pengadilan.

Penggunaan eufemisme pada judul di atas tidak dengan jelas mengungkapkan maksud yang sebenarnya yang terkandung dalam teks berita. Judul tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan opini di kalangan pengurus partai dan masyarakat secara umum. Cermati judul dalam penampang berikut.

**Penampang 21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Anas Tak Disebut | *Kirim SMS dari Makkah, Anas Tak Disebut* | Eufemisme |
| Anas Diabaikan | *Kirim SMS dari Makkah, Anas Diabaikan* | Netral |

Mencermati kedua kalimat judul tersebut merperlihatkan perbedaan yang mendasar. Kalimat judul yang menggunakan kata eufemisme “*tak disebut”* memberikan peluang kepada pembaca untuk beropini sendiri tentang maksud yang sebenarnya dari judul tersebut. Sedangkan kalimat judul tanpa eufemisme “diabaikan” mengandung makna yang sangat lugas bahwa Anas sudah benar-benar dianggap sudah lagi menjadi Ketua Umum PD.

Dengan demikian, media terlihat tidak memberikan informasi yang jelas. Media cendrung berpihak pada Anas, dibuktikan dengan kalimat judul dalam sambungan teks berita. Judul tersebut berbunyi “ Anas Punya Hak untuk Bertahan”.

......................................................................................

Terpisah, pengamat komunikasi politik, Effendy Ghazali berpendapat kalau PD saat menjadi tersangka, Anas punya hak untuk bertahan,” tutrnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika kondisi PKS bisa terus membaik, maka kubuu yang kontra dengan Anas, akan terus menyerang. Dia yakin kalau konndisi PKS tidak akan jauh berbeda dengan PD sebenanrnya jika Lutfi Hasan ngotot mempertahankan jabatannya. Menjadi semacam tamparan bagi PD ketika Lutfi mundur, dan Demokrat ingin menyelesaikan masalah internalnya seperti PKS.

............................................................................................................

Kalimat judul tersebut diambil dari pernyataan pengamat politik Efendi Gazal. Jadi *makna yang dapat diungkapkan dari judul tersebut bahwa media memiliki sikap berpihak pada Annas*. Menyayangkan sikap SBY yang mengambil keputusan secara tersirat dengan tidak mengirimi Annas SMS.

**Analisis Makna Teks 22**

**Rubrik Politik, Edisi:***,***Edisi: 18-02-2013**

**Judul :** *Masyarakat Jadi Pemilih yang Kritis*

Kalimat judul pada teks 22 menggunakan kata yang mengandung makna eufemisme. Dilihat dari bntuk eufemisme, kata  *kritis* dilihat dari BE1 berbentuk *stilistik* dan dilihat dari BE2 berbentuk *satu kata menggantikan kata yang lain.* Kata *kritis*, tidak dapat dipahami secara langsung masyarakat awam. Bila dilihat sisi kelugasan makna yang dikandung oleh kata *kritis* yaitu cerewet, dan teliti. Bila kita mendasarkan pemahaman kita pada makna tersebut maka penggunaan kata kritis lebih mengarah pada upaya untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan calon tertentu, belum mengungkapkan maksud teks secara keseluruhan. Media terlalu percaya pada istilah yang berasal dari asing, walau sudah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang lebih tepat untuk mengungkapkan maknna teks secara keseluruhan adalah kata *bijaksana.* Berikut penggalan teks yang ada pada teks 22.

..............................................................................................

“Kita harus memperhatikan kinerja mereka selama ini, dan apakah memiliki konsep yang jelas atau tidak,” katanya.

Dalam proses demokrasi yang akan terjadi saat ini, menurutnya masyarakat tidak hanya peka terhadap masalah politik, namun juga peka terhadap masalah sosial. Jangan sampai karena hiruk pikuk pemilukada membuat masyrakat lupa akan masalah-masalah sosial yang seharusnya segera diselesaikan. Seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga masalah konflik sosial yang kerap meledak di tengah masyarakat. Semua permsalahan tersebut harus menjadi perhatian masayrakat untuk memiliki pemimpin.

.................................................................................................

**Penampang 22**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Kritis | *Masyarakat Diharap Jadi Pemilih yang Kritis* | Eufemisme |
| Tidak mudah dipngaruhi | *Msyarakat Diharap Jadi Pemilih yang rasional* | Netral |

Menanggapi judul diatas, media beranggapan bahwa masyarakat dalam menentukan pilihannya masih bersifat emoional. Pertimbangannya didasarkan pada sesuatu yang bersifat simbolis. Di samping itu, kadang pilihannya didasarkan atas rasa suka dan tidak suka. Terkait dengan maksud media tersebut, dapat dikemukakan pilihan kata yang lebih memadai, yaitu kata *rasional*. Sebagai pemilih yang rasional, tentunya pilihan didasarkan pada fakta yang ada. Bila seorang calon memilki kriteria seorang pemimpin, maka harus dipilih. Tanpa melihat golongan dan suku.

Maksud yang ingin disampaikan oleh media pada judul tersebut adalah seorang pemilih harus dapat melihat kinerja calon selama ini. Bila perlu pemilih harus mengkritisi kebijakan-kebijakan dan programnya selama ini. Mengingat hanya calon tertentu yang sudah menunjukkan kinerjanya, dapat disimpulkan *bahwa makna ufemisme yang terdapat pada judul teks, media memberikan sebuah imbauan kepada pemilih agar lebih kritis dalam memilih.*

**Analisis Makna Teks 23**

**Rubrik: Politik, Edisi: 28-02-2013**

**Judul:** *Indeks IPM Naik, Posisi belum Terkerek*

Kalimat judul di atas menggunakan eufemisme berupa frase *indeks IPM naik.* Dilihar dari bentuk BE1, frase berbentuk *semantik* dan dilihat dari BE2, frase berbentuk *makna di luar pernyataan*. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, eufemisme yang digunakan oleh media mengandung makna bahwa ada maksud tertentu yang ingin dikemukakan oleh media. Mencermati isi teks secara keseluruhan bahwa sumber daya manusia dan tingkat kesejahtraan masyarakat Provinsi NTB sudah baik. Akan tetapi, tidak berpengaruh pada perbaikan peringkat secara nasional. Daerah kita tetap berada pada posisi kedua dari bawah. Hal ini mengungkapkan bahwa daerah lain jauh lebih baik dari NTB.

Mengingat teks media HLP ini diterbitkan pada saat menjelang pilkada, maka kondisi IPM yang merupakan tolok ukur kemajuan satu daerah dijadikan sebagai objek yang menarik untuk menyerang calon inkamben. Hal ini terlihat pada penggalan teks berikut.

.................................................................................................................

POSISI IPM NTB telah menjelma menjadi senjata. Namun, ia dikokang pihak lawan, belakngan ini IPM NTB memang kerap diungkit-ungkit. Banyak pihak mengaitkan, kondisi IPM NTB itu cerminan pemerintahan belum maksimal bekerja.

Lontaran tentu tak melulu dating dari lawan politik. Mereka yang tak memiiki afilisi sekalipun memang kerap gerah, jika melihat posisi IPM NTB yang betah di nomor buncit. Ini juga dirasakan aktivis Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO), Nurjannah

Inilah potret pesta demokrasi kita yang selalu menyerang pihak lawan yang sedang berkuasa dengan keurangan dan kelemahan yang selalu dicari-cari. Sebenarnya, mengkritisi itu penting dilakukan sebagai sebuah kontrol agar pihak yang berkuasa tidak terlena dengan jabatannya. Namun demikian penyampaian kritik dilakukan dengan santun dan proporsional.

Kritikus juga harus berjiwa besar, mau mengakui secara terbuka kemajuan yang telah dicapai oleh calon yang sedang berkuasa. Bagaimanapun juga, dalam kepemimpinan yang dilakoni, pasti ada sisi positif (kemajuan) yang telah dicapai dan juga ada bagian yang belum bisa dicapai. Hal ini harus bisa dipahami oleh siapa saja, selama prosentase ketidakberhasilannya kecil. Bila tingkat kegagalannya berada di atas batas toleransi, maka kepemimpinannya harus dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan.

Kembali pada masalah judul, bahwa penggunaan eufemisme tersebut tidak serta- merta dapat dipahami oleh pembaca. Perlu dicarikan padanan kata yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat pembaca. Dengan demikian, informasi yang tidak mubazir (sia-sia). Cermati judul dalam penampang berikut ini

**Penampang 23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Indeks IPM | *Indeks IPM Naik, Posisi Belum Terkerek* | Eufemisme |
| Indek Pembangunan Manusia (tingkat kesehatan dan pendidikan) | *Tingkat kesehatan dan pendidikan Manusia sudah bagus, tapi masih kalah dari daerah lain* | Netral / lugas |

Kalimat judul yang bermakna netral/lugas lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Pembaca tidak akan menemukan kata yang bermakna bias atau konotatif. Sedangkan makna eufemisme yang ingin disampaikan media pada sebuah judul teks berita memerlukan pemahaman yang mendalam. Berkaitan dengan makna bentuk eufemisme pada judul, dapat dikatakan bahwa *media HLP menyampaikan maksud yang sebenarnya bahwa upaya Pemda NTB belum maksimal dalam menaikan IPM NTB.*

**Analisis Makna Teks 24**

**Rubrik: Politik, Edisi: 27-03-2013**

**Judul :** *Bawaslu Diminta Bekerja Profesional*

Media HLP dalam teks berita rubrik politik, edisi 27 - 03 – 2013, kalimat judulnya menggunakan frasa bermakna eufemisme. Frasa yang dimaksud mengandung eufemisme tesebut adalah *diminta bekerja profesional.* Dilihat dari BE1, frsa tersebut berbentuk *semantik,* dan dilihat dari BE2, prasa tersebut berbentuk *makna di luar pernyataan*. Media HLP menyampaikan maksud dalm teks berita yang tergambar dalam judul secara tidak transparan. Masyarakat pembaca tidak dapat memahami secara langsung hal yang ingin disampaikan oleh media dalam teks berita. Bila dibandingkan dengan setelah kita membaca teks berita secara keseluruhan. Barulah pembaca mengetahu dengan pasti hal yang dimaksudkan dalam judul teks berita tersebut.

Dilihat dari aspek ideologis, media HLP sangat berhati-hati dalam menggunakan pilihan kata. Penggunaan eufemisme tersebut merupakan salah satu bentuk kehati-hatian media HLP. Dapat dimengerti bahwa aktor yang dimaksud dalam judul adalah sebuah lembaga yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Bahkan hal ini mungkin juga merupakan satu upaya yang dilakukan media untuk melindungi diri dan lembaganya dari pihak lain. Fakta ini merupakan satu bentuk ketidakbebasan media dalam memberitakan sebuah kasus. Media akan selalu merasa tersandra oleh kepentingan dan keingin pihak-pihak lain. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah pembaca dari kalangan awam. Mereka tidak dapat memahami informasi secara langsung dan jelas.

Aktor yang dimaksud dalam teks (Bawaslu) dianggap memiliki pengaruh yang kuat bagi media. Media berupaya mencari pilihan kata yang tepat, yang tidak memojokkan sang aktor. Penggunaan kata tertentu oleh media dapat membentuk opini publik sehingga pemahaman masyarakat sesuai dengan keinginan media. Dengan demikian pembaca turut membenarkan hal yang disampaian oleh media pada judul teks berita.

Mencermati penggunaan kata pada frasa dalam judul *diminta bekerja profesional* , media cendrung lemah dalam mengkritisi gaya Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Bila kita pahami isi teks berikut

.................................................................................................................

Ketua KAMMI daerah NTB Ahmad Dahlan mengatakan Bahaslu NTB harus konsisten dengan komitmennya sebagai pengawas pemilu. Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh empat pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU NTB harus ditindak seadil-adilnya. “Bawaslu harus tegas terhadap keputusannya. Jangan pilih kasih terhadap salah satu pasangan calon,” kata Dahlan saat berorasi di depan Kantor Bawaslu, kemarin

................................................................................................................

Penggalan teks berita di atas, pembaca dapat memahami bahwa Banwaslu dalam menjalankan tugasnya masih terkesan tidak konsisten. Eksennya di lapangan belum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi-nya). Sikap tebang pilih terhadap salah satu pasangan calon masih mewarnai prilaku lembaga tersebut. dalam hal ini media HLP harus tegas dalam menulis judul berita yang diterbitkan.

Cermati judul teks berita pada penampang berikut ini.

**Penampang 24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Diminta bekerja profesional | *Bawaslu Diminta Bekerja Profesional* | Eufemisme |
| Tidak profesional | *Bawaslu Bekerja Tidak profesional* | Netral / lugas |

Membandingkan kedua kalimat judul di atas, tentunya kita dapat menentukan kalimat judul yang mengungkapkan fakta yang terdapat dalam teks berita. Pada kalimat judul yang mengandung eufemisme, media terkesan lemah. Tidak konsistennya Banwaslu dengan komitmen yang telah dibuat sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal sikap tidak konsisten itu dapat berakibat fatal dalam pelaksanaan pemilu. Bisa memicu terjadinya tindakan anarkis dari kelompok tertentu yang merasa tidak pas dengan kinerja Banwaslu. Dalam hal ini, media terlihat tidak tegas dalam mengkritisi kinerja Banwaslu. Boleh jadi media membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh calon tertentu dalam berkampanye. Dalam hal ini media tidak netral dan berpihak pada salah satu calon.

Sementara itu, dalam kalimat judul yang netral dan menggunakan kata yang lugas, pembaca dapat memahai dengan jelas maksud kalimat judul tersebut. Kata *tidak* yang digunakan pada kalimat judul dapat mengungkapkan isi teks pada media HLP sesuai fakta yang ada. Pembaca tidak dibodohi dengan kata-kata dalam judul karena terlihat sinkronisasi antara judul dengan isi teks. Dalam hal ini tidak telihat adanya ideologi tertentu yang akan membentuk opini publik. Netralitas kata dalam judul sangat mutlak diperlukan agar informasi yang ada tidak menjadi bias. Pembaca satu dengan yang lainnnya memiliki pemahaman yang sama tentang sebuah berita. Tidak ada pihak yang merasa mendominasi dan yang didominasi.

Dengan demikian dapat diungkapkan makna eufemisme yang terdapat dalam bentuk eufemisme pada judul teks berita. *Media HLP berupaya menyembunyikan sikap keberpihakannya pada salah satu pasangan calon dalam pilkada NTB. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata yang bersifat melemahkan suatu tindakan pelanggaran oleh calon tertentu. Media mengkritisi konsistensi Banwaslu dengan kata yang tidak lugas.*

**Analisis Makna Teks 25**

**Rubrik: Politik, Edisi: 08-04-2013**

**Judul:** *TGB: Jangan Gunakan Politik Gaya Infotainment*

Media HLP dalam teks berita rubrik politik, edisi 08-04-2013 tersebut menulis berita dengan judul yang mengandung *eufemisme.* Kata yang dianggap mengandung eufemisme adalah frasa *gaya infotainment*. Dilihat dari segi bentuk eufemisme BE1, frse eufemisme berbentuk *retoris* dan dilihat dari BE2, frase eufemisme tersebut berbentuk *ekspresi figuratif.*

Dilihat dari aspek ideologis, media menggunakan pilihan kata yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Gaya infotainment dimaksudkan adalah sebagai satu mata acara yang didalamnya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang bersifat pribadi (aib seseorang) yang dialamai para artis atau pejabat publik. Tayangan yang bernuansa *gosip* ini biasa dikonsumsi oleh mereka yang tidak memiliki aktifitas di luar rumah (umumnya ibu rumah tangga). Judul yang ditulis oleh media HLP terkait dengan ucapan yang disampaikan oleh salah satu kandidat cagub pada pemilu 2013.

...........................................................................................................

“Pemilukada ini merupakan ajang mencari pemimpin. Jadi pola-pola yang harus ditawarkan oleh semua adalah pola-pola politik berbudaya, jangan menggunakan pola infotainment,” ujar TGB kepada wartawan, usai jalan sehat yang digelar KPU NTB kemarin

................................................................................................................

Penggunaan kata tertentu dalam penulisan judul seperti di atas sangat beralasan karena salah satu kandidat cagub sedang tersangkut masalah rumah tangga. Media ingin membentuk opini publik bahwa berkampanye dengan mengkritisi kandidat lain dengan mengungkap masalah rumah tangga merupakan cara yang tidak baik dan tidak berbudaya. Media berupaya menggiring opini publik kepada salah satu pasangan. Media sudah memperlihatkan keberpihakannya pada salah satu calon. Segala pernyataan yang dikemukakan oleh psangan tertentu dianggap sebagai sesuatu yang sudah benar, tanpa perlu dikritisi. Dalam hal ini media sudah dijadikan sebagai alat berkampanye salah satu pasangan calon.

Media melihat, salah satu calon merupakan aktor yang dihormati dan disegani maka ditempatkan pada posisi di atas. Segala pernyataannya dianggap sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh pembaca. Hal ini terlihat pada penggalan teks berikut.

TGB kemudian mendorong seluruh elemen masyarakat menerapkan pola politik berbudaya demi kemajuan NTB. Lebih lanjut TGB, menegaskan, masyarakat sebaiknya menjauhi perilkau politik yang tidak baik. Sehingga dapat menciptakan degradasi sosial atau kondisi yang terpecah, hingga menciptakan ketegangan di tingkat masyarakat bawah. “Jadi perilaku yang tidak baik itu sangat tidak perlu dan jangan dilakukan,” tandasnya

...............................................................................................................

Pernyataan di atas merupakan sebagian dari pernyaan calon inkamben yang dikutip langsung oleh media. Calon inkamben terkesan sangat khwatir, jika kandidat lain mengangkat isu masalah rumah tangga dijadikan sebagai bahan kampanye. Hal tersebut terlihat pada penggalan teks berita berikut ini.

............................................................................................................

Bagi Gubernur, seluruh pasagan calon dan semua masyarakat NTB meiliki kewajiban moral untuk melakukan sosialisasi serta kampanye sesuai dengan aturan formal. Tidak hanya itu, TGB berharap agar koten kampanye berkaitan dengan visi-misi untuk membangun NTB ke depan.

.........................................................................................................

Rupanya, kekhawatiran calon inkamben terhadap pasangan lain yang akan mengungkit masalah pribadi dipahami oleh media. Media seolah-olah mengamini semua perkataan dari calon tersebut. Sekali lagi, media terlihat tidak dapat menunjukkan netralitasnya dalam memberitakan masalah pemilukada. Secara tidak lagsung, media HLP sudah mengklaim diri sebagai tim pemenangan salah satu calon.

Kembali pada masalah judul teks berita, penggunaan eufemisme pada judul teks berita di atas tidak dapat dipahami secara lugas oleh pembaca awam. Pembaca awam tidak akan dapat memberikan respon secara langsung mengenai kalimat judul tersebut. Sebab, memang kalimat judul itu hanya ditujukan kepada kandidat lain dan para anggota tim pemenangan mereka yang tergolong kelompok intelek. Namun demikian, sebuah media massa harus bijak dalam menggunakan pilihan kata. Sebaiknya menggunakan pilihan kata yang lebih lugas sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman di kalangan pembaca. Ingat, bahwa media massa bila sudah dipublikasikan maka itu merupakan milik masyarakat yang harus diperhitungkan keberadaannya. Tanpa masyarakat, sebuah media tidak memiliki arti apa-apa. Berikut ini dapat dilihat judul dalam penampang berikut ini.

**Penampang 25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Gaya infotainment | *TGB: Jangan Gunakan Politik Gaya Innfotainment* | Eufemisme |
| Masalah pribadi | *TGB: Dalam Berkampanye Jangan Menyinggung masalah Pribadi Calon Lain* | Netral / lugas |

Mencermati kedua judul di atas, kita dapat menentukan bahwa media tidak secara transparan mengatakan bahwa calon lain dalam melakukan kampanye, mengangkat isu masalah keretakan rumah tangga salah satu calon. Hal ini terlihat pada penggunaan eufemisme pada judul. Bandingkan dengan judul yang bermakna netral/lugas. Judul tersebut secara transparan mengungkapkan hal yang tertuang dalam isi teks berita. Makan eufemisme yang terdapat pada judul teks berita rubrik politik tersebut, *media mengatakan bahwa calon lain dalam berkampanye tidak menyampaikan program (visi-misinya), tetapi malah menjelekkan calon inkamben dengan mengungkap masalah keretakan rumah tangga yang dialami calon inkamben.*

**Analisis Makna Teks 26**

**Rubrik: Politik, Edisi: 18-04-2013**

**Judul:** *Harus Dewasa Dalam Berpolitik*

Kalimat judul teks berita di atas menggunakan kata *eufemisme* (memperhalus makna). Kata *dewasa*, pada kalimat judul di atas, mengandung makna yang lebih halus dalam menggambarkan situasi politik (para calon dan tim pemenangan) saat itu. Bentuk eufemisme yang digunakan dilihat dari BE1, berbentuk *semantik* dan dilihat dari BE2, berbentuk *makna di luar pernyataan.*

Dilihat dari aspek ideologis, media menggunakan pilihan kata meperhalus makna sebagai upaya untuk membentuk pendapat umum. Media berupaya untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca turut membenarkan pendapat KPU sebagai sebuah lembaga pemilu. KPU menilai bahwa para cagub dan tim pemenangannya belum dewasa dalam berpolitik. Hal ini terlihat pada penggalan teks berikut.

................................................................................................................

Calon pemimpin juga diharapkan dapat bersikap dewasa dalam berpolitik. Tidak melontarkan pendapat yang cenderung membingungkan atau menjadi konroversi di tengah masayrakat. Calon pemimpin juga berupaya menunjukkan sikap kesatria yakni jujur dalam menyikapi problem masyarakat. Tidak mencari-cari pembenaran hanya karena menginginkan simpati masyarakat.

.......................................................................................................

Penggalan teks berita di atas jelas memperlihatkan bahwa para calon hanya melakukan pencitraan. Pernyataan yang dilontarkan harus mempertimbangan realitas kehidupan sosial masyarakat dan tidak membingungkan. Media terkesan mendukung penilaian yang dikemukakan oleh KPU tersebut. dukungan tersebut terlihat dari judul teks yang diangkat media.

Dilihat dari sisi aktor dalam teks tersebut, media menilai KPU adalah aktor yang dianggap sebagai lembaga yang memiliki kedewasaan dan kejujura. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan KPU dianggap mengandung nilai kebenaran. Setiap pasangan calon dan seluruh tim pemenangannya harus mematuhi semua ketentuan dan imbauan yang telah disampaiakn KPU. Memposisikan KPU sebagai lembaga yang panutan, media dalam judul teks menggunakan kata dewasa. Penggunaan kata *dewasa* sebagai bentuk penghalusan pengucapan/ perkataan justru terlihat tidak tegas dalam mengungkapkan isi teks secara keseluruhan. Kata dewasa hanya mengngkapkann sebigan saja dari isi teks. Cermati kalimat dalam penampang berikut ini.

**Penampang 26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Dewasa | *Harus Dewasa dalam Berpolitik* | Eufemisme |
| Bijaksana | *Harus Bijaksana dalam Berpolitik* | Netral / lugas |

Mencermati kalimat judul di atas, dapat dikatakan bahwa kalimat judul yang bermakna lugas/ netral dapat mengungkapkan secara tegas hal yang menjadi isi teks berita. Keseluruhan isi teks tergambar pada kalimat judul yang netral/lugas tersebut. Media dalam hal ini tidak secara terbuka mengungkapkan maksud teks. Dapat dikatakan bahwa ada hal yang luput dari pantauan media mengenai prilaku para calon dan tim pemenangannya. *Adapun makna eufemisme yang dapat diungkapkan pada bentuk eufemisme dalam kalimat judul di atas adalah bahwa media menilai prilaku para calon dan tim pemenangannya menjelang pemilu, sering melontarkan pernyataan kontroversial (mengandung pertentangan) yang dapat membingungkan masyarakat, dan belum mengungkapkan permasalahan* yang ada dalam masyarakat.

**Analisis Makna Teks 27**

**Rubrik: Politik, Edisi: 26-04-2013**

**Judul:** *Dahlan Bisa Aangkat Elektabilitas Demokrat*

Kalimmat judul pada teks 27 yang terdapat dalam rubrik politik edisi 26-04-2013 tersebut menggunakan kata mengandung *eufemisme*. Dilihat dari BE1, eufemisme berbentuk *semantik,* dan dilihat dari BE2, eufemisme berbentuk *sirkumlokusi.* Penggunaan kata *elektabilitas,* pada judul di atas diambil dari istilah asing. Kata tersebut tidak dapat dipahami secara langsung oleh pembaca awam. Medi tentunya memilih kata tersebut didasarkan pada sebuah pertimbangan yang matang.

Dilihat dari sudut aspek ideologis, bahwa penggunaan *eufemisme* pada teks tersebut adalah untuk maksud tertentu. Hal itu merupakan satu upaya yang dilakukan oleh media untuk membentuk sebuah opini pembaca. Media berupaya membenarkan hal yang dilakukan oleh satu pihak (LSJ) kepada pihak yang lain (Dahlan Iskan disingkat DI). Pandangan media tentang fakta yang ada diupayakan untuk ditularkan kepada pembaca aagar pembaca turut membenarkan hal yang diungkapkan oleh pihak LSJ. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media memperlihatkan keberpihakannya pada DI dengan mendukung pendapat LSJ. Hal ini dapat dilihat pada penggalan teks berikut ini.

..............................................................................................................

JAKARTA-Lembaga Survey Jakarta (LSJ) menilai, jika mau ikut, Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berpeluang menang dalam konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Salah satu alsannya, Dahla sangat popular dan memiliki dukungan grass root yang sangat bagus.

“Dahlan Iskan memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Elektabilitas Partai Demokrat juga akan merangkak naik. Sebab, Dahlan Iskan ini masuk dalam criteria pemimpin yang disukai rakyat,” kata Direktur LSJ Rendi Kurnia di Jakarta, kemarin.

Merujuk pada hasil Survei LSJ Maret lalu, jika Dahlan memenangi konvensi capres Partai Demokrat, elektabilitas Partai Demokrat berpeluang naik. Akhir Maret lalu, LSJ merilis hasil survey capres alternative pilihan publik yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Survey dilaksanakan pada periode Maret 2013 dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin error 2,8 persen.

.................................................................................................................

Dilihat dari aspek aktor dalam teks yang diungkapkan media pada judul dengan menggunakan kata-kata *eufemisme*. Aktor DI dalam teks diposisikan sebagai aktor yang superior. Hal ini didasarkan pada penggunaan frasa *bisa* *angkat elektabilitas Demokrat* pada judul teks. Keberadaan aktor DI sangat mempengaruhi elektabilitas Demokrat. Semenntara itu, media mengabaikan keberadaan tooh lain yang ada pada Partai Demokrat.. Dengan demikian, *makna bentuk eufemisme yang dapat diungkapkan pada judul teks tersebut adalah bahwa keberadaan sebuah partai (Partai Demokrat) sangat ditentukan oleh figur seorang tokoh (DI), bukan oleh sistem yang dibangun oleh partai tersebut. Partai- partai yang seperti itu tidak akan pernah tumbuh menjadi patrtai yang besar, tetapi partai tersebut akanmudah rapuh.*

Kembali pada judul teks, perhatikan judul yang terdapat pada penampag berikut ini.

**Penampang 27**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| elektabilitas | *Dahlan Bisa Angkat Elektabilitas Demokrat.* | Eufemisme |
| Indek Pembangunan Manusia (tingkat kesehatan dan pendidikan) | *Dahlan Bisa meningkatkan jumlah pemilih Demokrat* | Netral / lugas |

Kalimat judul yang menggunakan kata yang bermakna eufemisme sulit dipahami oleh pembaca awam. Sedangkan kalimat judul yang bermakna netral/ lugas sangat mudah dipahami oleh pembaca awam. Di samping itu, judul yang bermakna lugas dapat mengungkapkan hal yang sebenarnya mengenai isi teks secara keseluruhan.

**Analisis Makna Teks 28**

**Rubrik: Politik, Edisi: 03-05-2013**

**Judul:** *Anggaran 15 Kementerian Bemasalah: Mayoritas Diisi Orang Parpol*

Analisis terhadap judul teks rubrik politik, edisi 03-05-2013 difokuskan pada penggunaan kata yang mengandung eufemisme. Kata yang dianggap menggunakan eufemisme pada judul teks adalah kata *bermasalah*. Dilihat dari BE1, eufemisme berbentuk *stilistik,* dan bila dilihat dari BE2, eufemisme berbentuk *flipansi.* Kata *bermasalah* tidak dapat dipahami secara langsung, karena kata yang digunakan tidak mengungkapkan hal yang sebenarnya secara lugas. Perhatikan judul berikut yang terdapat dalam penampang berikut ini.

**Penampang 28**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kosa Kata Pilihan** | **Kalimat Judul** | **Makna** |
| Bermasalah | *Angggaran 15 Kementrian Bermasalah: Mayoritas Diisi Oarang Parpol* | Eufemisme |
| Merugikan keuangan negara | *Anggaran 15 Kementrian merugikan Keuangan Negara: Mayorita Diisi Orang Parpol* | Netral / lugas |

Media HLP menulis judul yang mengandung makna *eufemisme*, bukan secara kebetulan. Hal tersebut tentunya sudah melalui proses pertimbangan yang sangat matang. Dari aspek ideologis, media sengaja menggunakan kata tersebut karena meliki maksud

**Lampiran 4**

**Tabel 5**

# SILABUS PEMBELAJARAN

***Sekolah : SMP Negeri 1 Narmada***

***Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia***

***Kelas/Semester : IX (Sembilan) / 2 (Dua)***

Standar Kompetensi : **Membaca**

**11. Memahami ragam wacana tulis engan membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca cepat**

| **Kompetensi**  **Dasar** | **Materi**  **Pembelajaran** | **Kegiatan Pembelajaran** | **Indikator Pencapaian Kompetensi** | **Penilaian** | | | **Alokasi**  **Waktu** | **Sumber**  **Belajar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teknik Penilaian** | **Bentuk**  **Instrumen** | **Contoh**  **Instrumen** |
| 11.1 Menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku melalui kegiatan membaca ekstensif | Cara menemukan gagasan dalam bacaan dan implementasi- nya | * Membaca artikel dan buku untuk menemukan berbagai gagasan yang terdapat di dalamnya. * Membaca artikel dan/atau buku dengan cara mengutip pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalamnya dan memanfaatkannya dalam penulisan karya tulis | * Menemukan gagasan dari artikel * Menemukan gagasan dari buku * Mengutip pernyataan dari arikel atau buku sebagai referensi dalam penulisan karya tulis | Tes tulis  Tes tulis | Uraian  Uraian | * Tunjukkan gagasan penulis yang terdapat di dalam suatu artikel/buku! * Tulislah sebuah paragraf mengenai ... yang berisi kutipan/pendapat dari seorang ahli! | 2 X 40’ | Teks artikel dan/atau buku  Buku teks |
| * **Karakter siswa yang diharapkan :** Dapat dipercaya ( Trustworthines)   Rasa hormat dan perhatian ( *respect* )  Tekun ( *diligence* )  Tanggung jawab ( *responsibility* )  Berani ( *courage* ) | | | |  |  |  |  |  |

**Tabel 6**

# SILABUS PEMBELAJARAN

***Sekolah : ..................................***

***Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia***

***Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (Dua)***

Standar Kompetensi: **Membaca**

**11. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring**

| **Kompetensi**  **Dasar** | **Materi**  **Pembelajaran** | **Kegiatan Pembelajaran** | **Indikator Pencapaian Kompetensi** | **Penilaian** | | | **Alokasi**  **Waktu** | **Sumber**  **Belajar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teknik Penilaian** | **Bentuk**  **Instrumen** | **Contoh**  **Instrumen** |
| 11. 1 Menemu­kan masalah utama dari berbagai beri­ta yang ber­topik sama melalui mem­baca eks­ten­sif | Cara menemukan masalah utama dan implementasi- nya | * Membaca beberapa berita untuk bertanya jawab mengenai perma­salahan yang ada dalam tiap-tiap berita * Bertanya jawab mengenai masa­lah utama pada setiap berita * Bertanya jawab untuk menyimpul­kan kesamaan masalah dalam beberapa berita | * Mampu mendata masalah-masalah dari tiap-tiap berita * Mampu menentukan masalah utama dari tiap-tiap berita * Mampu menyimpulkan kesamaan masalah melalui kegiatan membandingkan beberapa berita | Tes tulis  Tes tulis  Tes tulis | Uraian  Uraian  Uraian | * Tulislah permasalahan-permasa­lahan yang terdapat pada tiga teks berita! * Tulislah masalah utama yang ter­da­pat pada tiga teks berita! * Tulislah kesamaan masalah yang terdapat di ketiga berita yang kamu baca! | 4 X 40’ | Media cetak |
| * **Karakter siswa yang diharapkan :** Dapat dipercaya ( Trustworthines)   Rasa hormat dan perhatian ( *respect* )  Tekun ( diligence ) | | | |  |  |  |  |  |

**Lampiran 5**

1. **Data Teks Berita Media Harian *Lombok Post***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **1** | ***Lombok Post*** | **12 Januari 2013** | **Hukum dan Kriminal** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Mobil Hibah PT NNT Bermasalah?**  **Taliwang-** Pemenang lelang mobil Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang berasal dari hibah PT Neomont Nusa Tenggara (PT NNT) harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, mobil yang dilelang tersebut bermasalah secara fisik maupun dokumen kendaraanya.  Sadiksyah, Direktur Perusahaahn Daerah (Perusda) KSB, kemarin mengaku terpaksa berurusan dengan polisi menyusul tidak jelasnya surat dan fisik kendaraan. Nomor mesin dan rangka kendaraan roda empat itu tidak memiliki kesamaan.  “Polisi tidak memperbolehkan kendaraan itu beroprasi karena tidak ada kejelasan surat,” katanya.  Mobil jenis kijang kapsul warna biru dilelang pemda setempat, setelah menerima hibah sekitar tahun 2010 silam dari PT NNT. Ia berharap PT NNT bertanggungjawab atas ketidakjelasan identitas kendaraan tersebut. Kata dia, mesin-mesin yang dirakit pada bengkel PT NNT dikanibal, hingga ada mobil yang mesinnya tidak sesuai dengan rangka dan surat-surat kendaraan.  “Mereka seharusnya taat aturan. Hibah  yang diberikan harus memperhatikan kelengkapan dokumen yang sah “ terangnya.  Tidak hanya dirinya, kendaraan lain yang dketahui dihibahkan PT NNT juga tak kunjung dapat dioprasikan. Polisi menganggap kendaraan itu bermasalah secara hukum.  “Setiap razia mobil kami selalu ditahan,” tandasnya.  Untuk itu Sadiksyah mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pemalsuan identitas kendaraan. PT NNT lain yang status surat-suratnya bermasalah.  PT NNT sekitar tahun 2010 lalu telah menghibahkan puluhan unit kendaraan bekas oprasi karyawan mereka kepada Pemda bahkan kepada kepolisian. Masalah ketidakjelasan surat kendaraan hibah itu sudah berlangsung lama. Hanya saja, belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.  Manager hubungan public PT NNT Rubi Purnomo, belum dapat dikonfirmasi. Wartawan yang mencoba menghubungi nomor handphonenya hanya mendengar nada sambung tapi tidak diangkat. Sedangkan konfirmasi melalui Short Massage Service (SMS) tidak dibalas.  Kapolres Sumbawa Barat AKBP Muh Suryo Saputro juga belum dapat berkomentar terkait masalah ini. Kapores terkesan menghindari wartawan. **(er-ndy)** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| 2 | *Lombok Post* | 30-01-2013 | Hukum dan Kriminal |
| **Teks Berita** | | | |
| **Batu Guring Bakal Ditertibkan**  Taliwang-Masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berlaku adil terkait proses penertiban dan pembongkaran sejumlah tempat hiburan malam.  Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP berencana melakukan penertiban tempat hiburan di kawasan Sumbawa dengan Sumbawa Barat.  Kasat Pol PP NTB Ibnu Salim yang dikonfirmasi via ponsel kemarin tidak membantah bakal melakukan penertiban kawasan hiburan tersebut.  “Kita akan tetap melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada tempat hiburan malam di wilayah batu Gong-Sumbawa,” janjinya. Diakuinya, penertiban tempat hiburan malam di wilayah perbatasan merupakan kewenangan provinsi. Namun sebelumnya, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Pol PP setempat. Koordinasi dilakukan, sehingga pada saat proses penertiban berlangsung, Pol PP NTB mendapat dukungan dari dua daerah tadi. “Kalau dengan “Kasat Pol PP KSB saya sudah melakukan koordinasi, meskipun baru sebatas pembicaraan via ponsel. Koordinasi ini juga akandilakukan dengan Sumbawa,” imbuhhnya.  Ibnu Salim menjelaskan, waktu penertiban belum bisa dipastikan. Setelah koordinasi dengan kedua daerah ini dilakukan, pikahknya akan langsung melakukan penertiban. Terpisah, Kasat Pol PP KSB Agus Hadnan menjelaskan, jajarannya mendukung rencana penertiban yang akan dilakukan Pol PP NTB.  “kami sangat mendukung. Tapi karena wilayah yang akan ditertibkan itu masuk perbatasan yang sampai saat ini masih disengketakan, kita tinggal menunggu perintah dari provinsi,” terangnya.  Mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) ini mengakui dirinya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Pol PP NTB terkait rencana penertiban tersebut. (**far)** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **3** | ***Lombok Post*** | **01-02-2013** | **Hukum dan Kriminal** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Puluhan Oknum Dewan Diduga Terima Percikan**  **Kasus Korupsi Bansos Lobar 2009**  **Mataram-Dinas bantuan sosial (bansos) Lombok Barat tahun 2009 yang dicairkan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diduga mengalir ke sejumlah dana yang mengalir ke sejumlah oknum anggota dewan. Jumlah dana yang mengalir ke kantong pribadi para oknum wakil rakyat itu belum dilirik pihak kejaksaan.**  Informasi yang dihimpun Koran ini menyebutkan, besaran dana yang diterima 21 oknum anggota dewan itu bervariasi. Ada yang menerima Rp 20 juta, ada juga yang menerima Rp 30 juta. Dana tersebut dikucurkan dari pengeluaran yang ditandatangani terdakwa H. Ranu melalui tujuh SK dengan total dana sebesar Rp 4 miliar lebih.  Kasi Penkkum dan Humas I Made Sutapa yang dikonfirmasi soal penyelidikan aliran dana ke sejumlah oknum dewan, mengatakan, pihaknya masih focus untuk menyelesaikan perkara tiga terdakwa yang sedang disidangkan. “Kita tuntaskan dulu yang tiga orang ini (H. Ranu, Akhmad Solikhan, dan Juandi Setiawan),” katanya, kemarin.  “Setelah perkara tiga terdakwa selesai, kemungkinan akan dikembangkan lagi,” ujarnya.  Dalam persidangan, Selasa (29/1) lalu, H Ranu menyampaikan pertanggungjawaban pencairan pengeluaran dana bansos sebesar Rp 4.307.554.000 tersebut sesuai mekanisme.  Diduga dana yang dicairkan itu sebagian mengalir ke sejumlah anggota dewan. Bahkan, sejumlah nama oknum dewan tercantum dalam draf penerimaan bansos. “Kalau ada perkembangan tetap kita telusuri,”pungkas Sutapa. (**mis**) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| 4 | *Lombok Post* | 20-02-2013 | Hukum dan Kriminal |
| **Teks Berita** | | | |
| **SPPD FIKTIF**  **Kasus Loteng Menghilang**  MATARAM. Kasus dugaan SPPD fiktif yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Lombok Tengah menghilang. Padahal, pengusutan kasus tersebut telah menetapkan 21 oknum anggota dewan setempat sebagai tersangka.  Anehnya, kasus tersebut hilang tanpa ada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Kasus yang diusut sejak tahun 2009 itu. Lenyap tanpa jejak. Bahkan, berkas penyidikannya tidak lagi tersimpan di Polres Loteng.  “Polres Loteng tidak menangani kasus SPPD fiktif. Sudah dicek, tapi tidak ada,” kata Kabidhumas Polda NTB AKBP Sukarman Husein usai menghubungi pihak Polres Loteng kemarin.  Kasus dugaan SPPD fiktif tersebut ditangani pada masa Kapolres AKBP Suryanto dan Kasatreskrim AKP Ferdian Fahmi. Perkembangan terakhir saat itu, penyidik melakukan koordinasi dengan Polda NTB. Namun, sejak itu kasus tersebut belum ada perkembangan hingga saat ini.  “Sudah saya cek di Ditresskrimsus dan Polres Loteng, Mereka tidak menangani kasus SPPD fiktif oknum dewan Loteng,” jelasnya.  Kasus ini ditangani Polres Lombok Tengah sejak Maret 2009 silam. Saat itu sebanyak 45 anggoa dewan dijadwalkan mengikuti bintek ke Jakarta. Namun, tidak semua anggota dewan berangkat bintek.  Namun, anggaran perjalanan dinas bagi oknum dewan yang tidak ikut berangkat bintek anggarannya dicairkan. “Tidak ada SP3 juga” kata Sukarman. | | | |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **5** | ***Lombok Post*** | ***23-02-2013*** | ***Hukum dan Kriminal*** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Ketika Pengusutan Kasus SPPD Fiktif Meredup**  **Independensi Penegak Hukum Diragukan**  **Penghentian penyelidikan kasus SPPD fiktif Lombok Timur (Lotim), serta hilangnya penanganan kasus SPPD fiktif Lombok Tengah (Loteng) menjadi sorotan. Pihak kepolisian pun didesak untuk memberikan penjelasan kepada publik.**  **M Islamuddin – Mataram**  Sejak tahun 2006, baru satu perkara dugaan korupsi SPPD fiktif yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Mataram. Kasus yang melibatkan mantan angota dewan Lobar itu telah diputus. Namun, dalam putusan, majelis hakim menyatakan hukuman percobaan.  Fakta itu mengundang banyak pertanyaan publik, serta kebingungan atas independensi penegakan hukum terutama soal dugaan penyalahgunaan SPPD fiktif. Apalagi, pihak penegak hukum sering beralasan penghentian kasus ditengarai karena pengembalian kerugian keuangan negara.  Kasus SPPD fiktif sejumlah oknum anggota dewan Lombok Timur telah dihentikan. Penyidik Polres Lombok Timur yang menangani kasus itu, tidak menemukan unsur kerugian Negara.  Nah, setelah diaudit BPKP, tiga penjabat yang menggantikan tiga anggota dewan itu mengembalikan uang SPPD itu. Karena telah dikembalikan, maka unsur kerugian negara tidak didukung bukti keberangkatan mereka berupa boarding pass, dan daftar manifest penumpang pesawat.  Ketua Pos Koordinasi (Posko) Pemantauan Peradilan NTB Ahyar Supriadi menyoroti kasus dugaan korupsi SPPD fiktif itu. Menurutnya, alasan penghentian kasus tersebut berbenturan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 4, tentang pengembalian kerugian keuangan negara. “ Pengembalian itu tidak menghapus pidananya, kata Ahyar. Dikatakan, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian itu salah satu faktor yang meringankan terpidana. “Ini cukup membingungkan,” cetusnya.  Selain itu, ia menyinggung soal hilangnya kasus dugaan korupsi SPPPD Fiktif Loteng tahun 2009. Ia cukup kaget mendengar, bahwa Polres Lombok Tengah dan Polda NTB tidak menanganinya. Padahal, kasus tersebut telah menetapkan tersangka. “Profesionalisme dan independensi penegak hukum sangat kering. Masa ada kasus yang hilang,” katanya.  Terkait kasus tersebut, lanjut hari. Namun, faktanya ada sekitar lima belasan anggota DPRD Lombok tengah tidak melaksanakan kunjungan kerja. “Polres Lombok tengah pun telah melakukan Pemeriksaan saksi, yakni sekretaris dan Bendahara DPRD Loteng,” ujarnya.  Ahyar mengungkapkan, dalam keterangannya, Kapolres Loteng AKBP Suryanto, melalui Kasat reskrim Polres Loteng ferdian Indra fahmi menyatakan, tertanggal 16 Maret lalu Dewan Loteng mengagendakan bintek ke Jakarta terkait teknis pelaksanaan pemilu selama empat hari kerja.  Dari jadwal yang ada, seluruh anggota dewan Loteng sebanyak 45 orang akan berangkat. Namun pada kenyataannya, hanya lima belas orang saja yang jadi berangkat. Sementara sisanya membatalkan keikutsertaannya dengan alasan berbenturan dengan jadwal kampanye. “Namun, seluruh anggota dewan menerima dana bintek. Itu dibuktikan dengan keluarnya SPPD bagi semua anggota dewan Loteng,” sebutnya.  Untuk itu, ia meminta Polda NTB dan Polres Loteng professional dan independen melakukan proses penegakan hukum, terutama soal kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di DPRD Loteng.  Ia mendesak Polda melakukan evaluasi secara menyeluruh, terkait penanganan kasus SPPD fiktif. Memberikan penjelasan kepada publik secara rinci, soal mandeknya penganan kasus korupsi dugaan SPPD fiktif oleh Polda NTB dan Polres se-Ntb. “Kita siap memberikan data elektronik terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif, jika Polda NTB membutuhkan tambahan data,” tandasnya.  Kabidhumas Polda Ntb AKB sukarman Husein mengatakan, telah meminta klarifikasi kepada Kasatreskrim Polres Lombok timur, AKP Yuyan Priatmaja. Ia diminta untuk mengklarifikasi alasan dihentikannya peneyelidikan kasus tersebut. “Kasus itu menangani dewan yang terindikasi tidak melakukan perjalanan dinas tersebut, tidak terbukti. Sehingga, kasus dihentikan pada tingkat penyelidikan. “Tiga oknum dewan tidak berangkat ke lokasi kunker, Banjarmasin Kalimantan selatan. Mereka diwakili oleh pejabat lain,” katanya.  Tiga oknum anggota dewan yang tidak berangkat kunker ada yang menerima uang SPPD sebesar Rp 8,5 juta, dan dua lainnya masing-masing menerima sebesar 7,9 juta. “Tiga oknum dewan diwakilkan, karena mereka berhalangan. Namun, uang SPPD-nya tetap dicairkan,” jelasnya.  Namun, setelah diaudit BPKP, tiga pejabat yang menggantikan tiga anggota dewan itu mengembalikan uang SPPD itu. Karena telah dikembalikan, maka unsur kerugian Negara tidak ditemukan. “tiga orang yang berangkat itu rugi, mereka mengeluarkan dana lagi untuk menggantikan SPPD dewan yang tidak berangkat,” ujar sukarman.  ‘Sementara, menaggapi hilangnya kasus dugaan SPPD fiktif Loteeng, Sukarman. Mengatakan, setelah dicek di Polres Loteng dan Dtreskrimsus, kasus tersebut tidak ada yang menangani.  “Polres Loteng tidak pernah menangani kasus SPPD fiktif. Sudah dicek, tapi tidak ada. Sudah saya cek di Ditreskrimsus dan Polres Loteng. Mereka tidak menangani kasus SPPD fiktif Loteng,” jelasnya.  Kasus ini ditangani Plres Lombok Tengah sejak Maret 2009 silam. Saat ini sebanyak 45 anggota dawn dijadwalkan mengikuti bintek ke Jakarta. Tidak semua anggota dewan berangkat bintek. Namun, anggaran perjalanan dinas bagi oknum dewan yang ditunjuk tetap diberikan. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***6*** | ***Lombok Post*** | ***19-03-2013*** | **Hukum dan Kriminal** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Telusuri Aktor Intelektual**  MATARAM-Penyidik Polres Mataram terus mengembangkan kasus pmalsuan tanda tangan Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, Kini, penyidik menelusuri actor intelektual di belakang pelaku bernama Sahabuddin, yang sudah ditahan.  Kasubaghumas Polres mataram AKP Arief Yuswanto mengatakan, pelaku belum mengakui siapa yang menyuruhnya melakukan tindak penipuan itu. Meski begitu, pihaknya masih terus menyelidiki kasus itu. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi.  Sahabudin ditangkap polisi saat akan mengambil dana dari Kantor PDAMGiri Menang di Mataram. Dana tersebut merupakan dana yang hendak dicairkan dari hasil pengajuan proposal kegiatan yang diajukan. Pihak PDAM yang curiga dengan gelagat Sahabuddin langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Mataram. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***7*** | ***Lombok Post*** | **27-03-2013** | **Hukum dan Kriminal** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Kinerja KPU dan Panwaslu Disorot**  **Atribut Calon Belum Ditertibkan**  SELONG-Kinerja penyelenggara pemilu, KPU dan Panwaslu Lombok Timur mendapatkan sorotan dari tim sukses calon bupati/wakil bupati. Salah satunya terkait atribut kampanye calon yang masih terpasang di tempat umum. “Kalau atribut kami suah tertib semua, kecuali yang di pos pemenangan,” kata Ketua tim sukses alkhaer Sukardi Malik.  Sukardi menjelaskan, sebagai penyelenggara pemilu kedua lembaga itu sebenarnya independen. Namun dengan melihat kondisi saat ini, penyelenggara pemilu dinilai belum bekerja maksimal.  “Kalau sudah menjadi kesepakatan dan aturan, maka KPU dan Panwaslu harus tegas,” ujarnya.  Menurutnya dengan ketegasan itu maka dia berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua tim Sukses pasangan Mafan, Asyatul Anwar. Ketua PKPI Loti mini berharap KPU dan Panwaslu bersikap adil dan tegas. “Tidak hanya baliho, di media massa juga harus dihentikan sementara sampai massa kampanye tiba,” tegasnya.  Pasalnya, ketetapan ini berdsarkan hasil pertemuan antara timses, KPU, Panwaslu, FKPD, dan SKPD terkait beberapa waktu lalu. Setiap pasangan calon diberikan waktu tiga hari untuk menurunkan atribut kampanye. “Kami juga sudah lakukan penertiban, kecuali yang di pos pemenangan dengan radius 100 meter,” ungkapnya.  Terpisah, Ketua Panwaslu Lotim Joyo supeno, mengatakan, penertiban atribut kampanye itu adalah wewenang KPU. Walau demikian pihaknya sudah menyebar Panwascam untuk lakukan pemantauan. “Kalau ditemukan akan kami laporkan ke KPU. Ini sudah kami lakukan,” tandasnya.  Terkait dengan independensi Panwaslu, Joyo menegaskan pihaknya dalam posisi yang netral. Artinya, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Kami terus melakukan penyisiran,” papar mantan wartawan itu.  Untuk atribut kampanye ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan mengingatkan KPU. Termasuk kampanye yang dilakukan media massa. “Kecuali pos pemenangan, di tempat lain tidak boleh,” pungkasnya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***8*** | ***Lombok Post*** | ***27-04-2013*** | ***Hukumdan Kriminal*** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Wartawan Dianiaya Preman**  **Diduga Terkait Pemberitaan Kasus Korupsi**  Mataram-Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Pimpinan media cetak stabilitas, Rafidin menjadi korbannya. Pria 36 tahun itu dianiaya preman di taman Ria Kota Bima, Kamis lalu (25/4). Akibatnya, korban mengalaimi luka bengkak di bagian pipi dan benjol di bagian kepala. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres bima Kota.  Menurut rafidin, sebelum kejadian, dirinya sedang duduk bersama beberapa teman wartawan lainnya. Tiba-tiba dating sekelompok orang menghampirinya. Salah seorang yang diketahui bernama Sudirman alias Topan mengancamnya. Ia meminta dirinya untuk tidak mengganggu salah seorang pejabat di Dinas Dikpora Kabupaten Bima. “Saya tidak tahu permasalahannya, kemudian saya tanya maksudnya,” katanya.  “Dia (Topan,Red) bilang jangan ganggun ayahanda Zubaer salah satu calon bupati kuat bima tahun 2015 yang wajib kami jaga,” sambungnya mengutip ucapan Topan. Selain itu, Topan sempat melontarkan perkataan yang diarahkan kepada korban. “Kamu boleh juga, kita buktikan mana yang kuat. Setelah itu saya tanya balik ke dia,” ujarnya.  Setelah menanyakan hal itu, Topan melayangkan pukulan mengenai bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri dan membuat korban terjatuh. “Baju saya sobek. Saya juga kehilangan HP,” ungkapnya.  Ia menduga, penganiayaan yang dialami terkait pemberitaan dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat di dinas dikpora Kabupaten Bima. “Saya memang tulis berita dugaan korupsi. Tapi, kami telah ajukan hak jawab dan klarifikasi jika ada yang dianggap belum berimbang,” ujarnya.  Dalam pemberitaan itu, oknum pejabat dikpora diduga melakukan pemotongan dengan dalih fee 10 persen. Oknum pejabat itu meminta fee kepada 73 sekolah yang tersebar di Kabupaten Bima. Kasus dugaan korupsi itu sedang ditangani penyidik Polres Bima Zubaer HAR dan Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) H Dahlan.  Kapolres Bima AKBP Kumbul KS yang dihubungi membenarkan adanya laporan itu. Ia mengatakan laporan keduanya telah masuk. “kami masih selidiki,” katanya saat dihubungi kemarin. Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Cabang NTB Nasrudin Zein menyangkan dugaan penganiayaan terhadap wartawan. Ia mengatakan jika ada karya jurnalis yang tidak berimbang seharusnya diklarfikasi. ‘Media akan memberikan hak jawab jika ada ketidakberimbangan dalam pemberitaan. Kami sangat sayangkan dugaan penganiayaan itu” tandasnya.  Jika kebenaran, lanjutnya, pihak yang tidak puas dapat melayangkan laporan ke Dewan Pers. Karena cara kekerasan tidak perlu dilakukan. “Kami harapkan aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **9** | **Lombok Post** | **06-05-2013** | **Hukum dan Kriminal** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Kalah Tender, Kontraktor Tuding Ada Permainan**  MATARAM-Tender proyek pengadaan biogas di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB dituding sarat permainan. Tudingan itu dilontarkan kontraktor peserta tender yang kalah dalam tender.  “Kami telah dinyatakan tidak lolos dalam tahap kualifikasi. Namun, dalam tahap pembuktian penawaran, kami akhirnya lolos,” kata Direktur CV Palapa Abdullah Wildan kepada *Lombok Post*, kemarin.  Dijelaskan, pada tahap kualfikasi, pihaknya dinyatakan gugur dengan alasan perusahaan yang dipimpin tidak memiliki bengkel las. Diduga proses pelelangan ini telah diatur sebelumnya untuk memenangkan perusahaan tertentu.  Kata Abdullah, pelelangan proyek ini cenderung dipaksakan agar tidak terjadi gagal tender. Sehingga panitia memasukkan tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yakni cV Palapa, CV Karya Pejeruk, dan Anggrek. Meskipun dari awal perusahaan yang mendaftarkan diri sebanyak 13 perusahaan. “Jika hanya dua perusahaan yang lolos tahap pembuktian, proses lelang dinyatakan gagal,”bebernya.  “CV Anggrek kok bisa lolos di tahap kualfikasi. Padahal, tidak lengkap dokumen dan tidak memiliki penawaran. Kentara sekali permainan,” bebernya. Sekadar diketahui, proses pelelangan proyek pengadaan biogas ini memiliki pagu dana Rp 1,3 miliar lebih.  Sementara itu Kepala distamben NTB M Husni yang dikonfirmasi *Lombok Post* mengaku tidak merasa ada kecurangan dan permainan dalam proses tender ini. Bahkan, pihaknya tidak pernah berpikir untuk mengatur proses lelang.  Sementara pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Biogas, Abidin mengaku tidak tahu menahu soal tender proyek tersebut. Pelelangan tersebut ditangani langsung di LPSE. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***10*** | ***Lombok Post*** | ***08-01-2013*** | ***Ekonomi Bisnis*** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Dua Ritel Asing Siap Dibuka**  JAKARTA-Pengusaha ritel dalam negeri harus bersiap menghadapi persaingan yang makin ketat. Tahun ini dipastikan bakal ada dua rite lasing yang masuk di Indonesia yaitu Ikea dan Ministop dari Jepang.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Pujianto mengatakan, tahun ini ada beberapa rite lasing bakal meramikan sector ritel nasional. Dua diantaranyayang sudah pasti yaitu perusahaan dari Swedia, Ikea dan Ministop dari Jepang. Sementara itu, sekitar akhir tahun lalu perusahaan ritel asal Jepang, Family Mart telah mereaslisaikan investasinya. “Gerai Family Mart dibangun di Cibubur,” terangnya pada JPNN, kemarin.  Selain dua perusahaan yang sudah pasti dibangun tersebut, Pujianto mengungkapkan ada dua perusahaan yang sedang dalam penjajakan. Ia berkata, pasar Indonesia yang besar masih menjadi magnet bagi rite lasing. Untuk, itu ritel local harus segera berbenah untuk bisa bersaing.  Tahun ini, lanjut udjianto, bakal menjadi tahun yang berat bagi ritel local. Di tengah regulasi yang ada dan gempuran perusahaan rite lasing, ritel local terus terhimpit. Iamemastikan tahun ini, ekspansi ritel local tak akan segencar tahun lalu. Dan itu berbanding terbalik dengan ekspansi yang dilakukan oleh rite lasing.  “Rite lasing punya kekuatan lebih baik dari segi teknologi maupun permodalan. Meskipun iklim industry Indonesia kurang saat ini kurang mendukung, rite lasing siap menghadapi. Bahkan dari segi permodalan mereka siap rugi 10 tahun,” ujarnya.  Seperti yang diketahuim pemerintah menetapkan sector ritel masuk dalam upah minimum sektoral. Upah tersebut lebih tinggi lima persen disbanding upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, saat ini harga sewa prroperti naik belum lagi kenaikan Tarif Dasar Listrik. Regulasi tersebut membangkitkan biaya operasional. “Biasa operasional untuk tiga komponen tersebut 60-70 persennya. Itu yang membuat pengusaha pusing mencari akal,” ujarnya.  Semntara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Aprindo Satria Hamid dalam aturan terpisah menyatakan hal yang sama. Dengan iklim usaha yang kurang mendukung sector ritel ia menyebutkan pertumbuhan *fast moving consumer good* tak akan melebihi tahun lalu. Pada 2012, pertumbuhannya mencapai 10 persen, tahun ini mungkin kurang dari itu.  Sementara itu, ia menyebutkan di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan di Pulau Jawa terutama Jabodetabek sudah tak mungkin lagi. Ia juga tidak menutup kemungkinan di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan di Pulau Jawa terutama Jabodetabek sudah tak mungkin lagi. Ia juga tidak menutup kemungkinan ada ritel local yang berekspansi ke luar negeri, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. “Ada bagusnya juga ritel local mengembangkan bisnis ke luar negeri biar tidak dianggap jago kandang, tapi yang lebih miris lagi kalau alasan mereka karena iklim usaha yang tidak mendukung.” ucapnya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **11** | ***Lombok Post*** | **31-01-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Survey Daerah Rawan Pangan**  SUMBAWA-Secara umum, Kabupaen Sumbawa memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Namun ironisnya, setiap tahun masih ditemuikan daerah-daerah yang masuk kategori rawan pangan. Tahun lalu misalnya, data di Kantor Ketahanan Pangan Sumbawa ada dua desa yang masuk kategori rawan pangan. Yakni desa pamulung Kecamartan Unter Iews dan Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat.  Kepala Kantor Ketahanan Pangan Sumbawa Ir Edi Isnaini, M.Si mengatakan, sampai sat ini pihaknya masih melakukan survey. Tim dari kantor ketahan pangan masih menyesuaikan data penduduk yang diterima dari kantor pusat statistic dengan kondisi di lapangan.  “Sekarang tim sedang melakkukan survey di semua desa yang ada di wilayah Kabupaten,” katanya, kemarin.  Menurutnya, hasil survey yang dilakukan, diperikrakan rampung pada Juli mendatang. Ahsil dari survey lapangan itu akan menjadi dasar pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat atau keluarga miskin dan masuk kategori rawan pangan.  Meskipun belum ada kepastian, dia yakin tahun ini pemerintah Kaupaten Sumbawa melalui Kantor Ketahan Pangan tetap akan mendapat bantuan Penangnanan daerah Rawan Pangan (PDRP) daripemerintah pusat. “Setiap tahun kita selalu dapat. Saya yakin tahun ini kita juga tetap dapat,” ujarnya.  Dipaparkan tahun 2012 lalu Kantor Ketahanan Pangan mendapat bantuan Rp 37 juta dari pemerintah pusat untuk PDRP. Anggaran itu kemudian digunakan untuk menanggulangi rawan pangan di Desa Gontar Baru dan Pamulung.  Bantuan yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan Sembilan bahan pokok. Seperti beras, susu dan beberapa kebutuhan lainnya.  “Setiap tahun jumlah bantuan selalu meningkat. Tahun 2011 rp 25 juta. Tahun lalu meningkat menjadi 37 juta. Mudah-mudahan tahun ini kami dapat dan meningkat,” katanya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***12*** | ***Lombok Post*** | **02-02-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Defisit 2012 Terburuk Sepanjang Sejarah RI**  JAKARTA-Alarm bahaya sector perdagangan internasional mulai menyala. Lonjakan imor dan susutnya ekspor menorahkan catatan deficit perdangan terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia.  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, kinerja ekspor sepanjang Januari – Desember 2012 lalu tercatat sebesar USD 190,04 miliar, turun 6,61 persen dibandingkan realisasi 2011 yang mencapai USD 203,49 miliar. Ada pun impor pada 2012 mencapai USD 191,67 miliar, naik 8,02 persen disbanding realisasi 2011 yang sebesar USD 177,43 miliar.  “Sehingga, neraca perdagangan mencatat defisit USD 1,63 miliar,” ujarnya kemarin.  Dalam sejarah Indonesia, deficit neraca perdagangan terakhir terjadi pada 1961, namun nilainya relative jauh lebih kecil dibandingkan deficit tahun lalu. Setelah 1961, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus. Bahkan, pada 2006 lalu surplus perdagangan mencetak rekor terbesar hingga USD 39,73 miliar.  Meski secara total deficit, Suryamin mengatakan masih ada sisi positif dari kinerja perdagangan internasional, yakni surplus di neraca dagang nonmigas. Data BPS menunjukkan, ekspor nonmigas pada 2012 lalu mencapai USD 153,07 miliar, sedangkan impor sebesar USD 149,10 miliar, sehingga, khusus nonmigas, kita masih surplus USD 3,97 miliar,” katanya.  Jika dicermati, biang kerok atas deficit neraca perdagangan memang disebabkan oleh sector migas, khususnya perdagangan hasil minyak atau bahan bakar minyak (BBM). Sepanjang 2012, nilai ekspor hasil minyak Indonesia hanya sebesar USD 4,15 miliar, sedangkan impornya membengkak hingga UsD 28,68 miliar. Artinya, deficit perdagangan hasil minyak mencapai USD 24,53 miliar. “Penyebabnya jelas, konsumsi BBM kita sanggat tinggi, sedangkan produksi BBM di dalam negeri kurang, jadi harus impor besar-besaran untuk mencukupi konsumsi dalam negeri.  Satu hal positif lain yang masih bisa dilihat dari kinerja impor adalah kenaikan signifikan yang terjadi pada impor golongan barang modal dan bahan baku/penolong, sedangkan barang konsumsi hanya naik 0,17 persen. “Ini artinya, kenaikan impor lebih mengarah pada kegiatan produktif,” ucapnya.  Bagaimana dengan kinerja perdagangan internasional di 2013? Menurut wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, secara global, kondisi perekonomian tidak akan mengalami banyak perubahan. Karena itu, demand atau permintaan pasar internasional diproyeksi masih lemah, sehingga harga komoditas pun belum akan membaik signifikan. Di sisi lain, konsumsi domestic masih akan tinggi sehingga impor pun diproyeksi akan naik. “Artinya, neraca dagang kita masih terancam deficit tahun ini. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **13** | ***Lombok Post*** | **22-02-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Pengerajin Tahu-Tempe Minta Disubsidi**  MATARAM-Harga kedelai yang tidak beranjak turun masih memusingkan para pengrajin tahu-tempe di Mataram. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup.  Agar tidak terlalu terbebani dengan tingginya harga bahan baku, pengerajin tempe meminta pemerintah kembali mengucurkan dana subsidi pembelian kedelai. Siti Munawarah, dalah satu pengerajin tempe di Kelurahan Kekalik Jaya. Mataram, mengatakan bahwa harga kedelai saat ini sekitar Rp 7,800 per kg dan diperkirakan akan terus naik.  “Harga ini tergolong tinggi dan tidak pernah turuh. Sementara harga tempe susah dinaikkan. Makanya, keuntungan cukup buat sekedar bisa makan sehari-hari saja,” tuturnya.  Menurut dia, agar bisa memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan kerja keras, harga kedelai idealnya Rp 5.000/kg. Namun hingga sat ini harapan pengerajin masih khayalan saja.  Ditambahkan, pengerajin tempe yang bisa bertahan di tengah kondisi harga bahan baku yang terbilang mahal, hanya yang skalanya sedikit lebih besar. Tapi yang berproduksi harga bahan baku yang terbilang mahal, hanya yang terbilang mahal, hanya yang skalanya sedikit lebih besar. Tapi yang berproduksi skala kecil, bisa mengalami kerugian.  Hal itu disebabkan biaya produksi yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Terlebih, di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung.  “Rata-rata pengerajin tempe di daerah ini tidak ada yang berani menggunakan tenaga kerja. Semua kerja sendiri dibantu anggota keluarga. Kalau pakai tenaga kerja bisa rugi,” jelasnya.  Keluhan senada juga diutarakan Haerani. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak menghadapi tingginya harga kedelai. Ia tidak mengetahui pasti penyebab harga kedelai mahal. Namun yang pasti kenaikan itu membuat keuntungan usaha yang digelutinya selama belasan tahun. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **14** | ***Lombok Post*** | **25-02-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Seribu Investor Jepang Incar Relokasi ke Indonesia**  JAKARTA-Indonesia bagai magnet yang terus menarik minat para investor asing. Kali ini, sekitar 1000 investor Jepang menyatakan minat untuk merelokasi pabriknya di berbagai Negara ke Indonesia.  Direktur Utama Pt bank Negara Indonesia (BNI) Gatot M. Suwondo mengatakan, minat para investor Jepang tersebut disampaikan dalam pertemuan BNI dengan para pelakku usaha di Osaka, Jepang, dalam rangkaian acara Pembukaan Secara Resmi kantor Cabang BNI di Osaka.  Menurur Gatot, sebagai tindak lanjut atas minat para investor Jepang tersebut, BNI kini tengah menyiapkan pengembangan sebuah kawasan industry khusus atau Industrial Estate dengan luas hingga 1.000 hektar di Karawang, Jawa Barat. “Kawasan industry ini disiapkan untuk para pebisnis Jepang yang ingin merelokasi usahanya ke Indonesia,” katanya melalui keterangan resmi kemarin (24/2).  Gatot menyebut, Industrial Estate yang disiapkan BNI ini memiliki berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh investor asal Jepang. Kawasan ini akan terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai akses ke pelabuhan dan ketersediaan tenaga kerja.  Sebagaimana diketahui, rencana relokasi pabrik-pabrik milik investor Jepang makin kuat seiring sengketa kepulauan antara pemerintah Jepang dan Tiongkok ke beberapa Negara lain yang dianggap potensial. Salah satunya adalaha Indonesia.  Gatgot menambahkan, dalam rencana relokasi tersebut, BNI berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk menyediakan pusat layanan terpadau investasi dari pengusaha-pengusaha Jepang ini.  Menurut Gatot, BNI juga telah menyiapkan sebuah unit khusus, yaitu disebut Japan desk, yang dapat melayani niat relokasi bisnis mereka sekaligus membantu pengurusan perizinan investasinya di Indonesia.  “Model pengembangan bisnis yang diterapkan Japan desk ni akan kami gunakan juga untuk wilayah lain, termasuk di timur Tengah,” terangnya.  Gatot mengatakan, keberadaan Japan desk diharapkan bisa mempercepat peningkatan hubungan bisnis BNI di Jepang. Sebagai gambaran, saat ini sudah ada 46 bank regional di Jepang (JRB) yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BNI. “Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan JBIC (Japan Bank for Internasional Corporation),” ujarnya.  Gatot menebut, upaya BNI menjaga nasabah JRB yang ada di Indonesia ini penting agar tidak perbindah ke bank-bank besar Jepang yang sudah ada di Indonesia. “Saat ada sekitar 100 – 150 nasabah bank-bank regional Jepang yang ada di Indonesia, dan sudah menamnamkan modal setidaknhya USD 75 juta,”sebutnya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***15*** | ***Lombok Post*** | **05-03-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Remitansi Turun Akibat Moratorium**  MATARAM-Remitansi atau kiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi sejak 2011.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H. Mokhlis mengatakn, kiriman uang dari TKI yang bekerja di Arab Saudipaling besar dibandingkan dengan TKI yang bekerja di Negara lainnya. “Moratorium adalah salah satu penyebab menurunnya kiriman uang para TKI yang bekerja di luar negeri. Terutama yang bekerja di Arab Saudi,” terangnya.  Data Badan Pusat Statistik Ntb mencatat total remitansi TKI pada tahun 2012 sebesar Rp 1,104 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.409 triliun. Kiriman terbesar dari TKI yang bekerja di Arab Saudi, yaknileih dari Rp 271 miliar.  Data kiriman yang dari para pahlawan devisa itu diperoleh BPS NTB dari PT Kantor Pos Indonesia Cabang Mataram dan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB. Sementara dari Kantor Pos Cabang Lombok Timur dan di Pulau Sumbawa, kantor pegadaian serta pasar modern yang elayani kiriman uang luar negeri belum terdata.  Dengan adanya kesepahaman bersama antara Indonesia dengan Negara tujua penempatan, diharapkan penempaan para TKI di bidan piñata laksana rumah tangga (PLRT) lebih jelas sesuai dengan kompetensinya.  Dalam MoU itu juga, kedua belah pihak mendorong kepastian perlindungan bagi TKI. Tidak itu saja, masalah gaji, metode pembayaran gaji dan hak libur khususnya bagi PLRT juga diatur. Agar kesepahaman bersama itu terwujud, lanjut Mokhlis, tentu pemerintah harus menyiapkan calon-calon TKI yang kompeten. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga harus ikut berperan.  “Peran lebih dari pemda memang sangat dibutuhkan untuk menyiapkan calon TKI yang akan diberangkatkan adalah membenahi calon TKI yang akan diberangkatkan, makanya, langkah yang perlu dilakukan adalah membenahi BLK yang ada,” terangnya.  Sementara itu,, Kepala BPS NTB H. Soegarenda mengatakan, kiriman uang dari TKI sangat membantu ekonomi keluarga mereka, terutama yang menjadi petani. Pasalnya, dengan uang tesebut keluarga TKI bisa mencukupi kebutuhan di saat harga hasil produksinya kurang bagus. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **16** | ***Lombok Post*** | **25-03-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **MUI: Masyarakat Perlu Waspadai Setiap Produk**  MATARAM-Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar waspada terhadap setiap produk, baik produksi local maupun barang impor: Pasalnya tidak menutup kemungkinan bahan campurannya mengandung zat yang diharamkan Islam.  “Perlu ada keraguan atau was-was terhadap setiap produk olahan. Apalagi banyak yang dating dari Cina. Kami tidak mengatakan haram, tapi patut diragukan kehalalannya,” kata Ketua MUI NTB Prof Syaiful Muslim.  Dikatakan, berbagai produk berbahan baku pangan local, seperti singkong ketika sudah masuk industry olahan pasti dicampur dengan bahan lain yang masih diragukan kehalalnnya. Bahan pencampur makanan bisa saja mengandung bagian dari babi yang diharamkan dalam Islam. Bahkan rambut dari hewan itu bisa digunakan untuk kuas.  Selain itu, carbon penjernih air yang dating dari luar negeri tidak menutup kemungkinan juga mengandung bahan babi. Fakta ini belum diketahui secara luas oleh umat muslim.  MUI NTB lanjutnya, bukan berdiam diri melihat berbagai produk pangan olahan yang mengandung berbagai bahan campuran beredar di pasaran. Pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh produsen local untuk membuat sertifikat halal.  Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait dalam rangka membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memperoleh sertifikat halal, seperti Kantor Wilayah Kementrian Agama NTB, Kanor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) NTB.  Upaya sosialisasi kepada masyarakt luas juga tetap dilakukan setiap tahun kegiatan ini juga dilakukan bekerja sama dengan lembaga terkait sebagai penyandang dana.  “MUI tidak memiliki dana untuk membantu para pelakku UMKM mendapatkan sertifikat halal. Makanya kami menjalin kerja sama dengan dinas terkait. Begitu juga untuk dana edukasi ke masyarakat tentang kehalalan suatu produk,” jelasnya.  MUI NTB, kata Syaiful, juga mendorong agar instansi yang terkait pengawasan produk, dalam hal ini Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Disperindag untuk lebih mengintensifkan pengawasan produk terutama yang didatangkan dari luar negeri.  Pihaknya juga mendorong agar para pengelola hotel di NTB untuk segera mengajukan permbohonan kehalaln ke pengunjung dan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis makanan.  “Saya juga sudah menyarankan kepada sejumlah pengelola hotel untuk menggunakan bahan pencampur makanan produk local yang sejenis dengan produk dari luar,” terangnya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| ***17*** | ***Lombok Post*** | **11-04-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Kartel Rugikan Konsumen Rp 5T**  JAKARTA-Lonjakan harga bawah putih dan daging sapi tidak hanya menghantam angka inflasi namun juga menggerus kantorng konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya hitungan menarik mengenai seberapa besar kerugian yang harus ditanggung masyarakat akibat lonjakan harga yang diduga berbau *kartel* ini.  konsumen harus membayar kkomoditas bawang putih dan daging sapi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga normal. Estimasi kerugian konsumen sepanjang Januari-Maret 2013 mencapai Rp 4,4 hingga 5,8 triliun,” ujarnya di Komisi VI DPR kemarin.  Nawir pun mebeber kalkulasinya. Untuk bawang putih, konsumsi per tahun diperikarakan sebesar 330 juta kilogram (kg) atau 330 ribu ton. Adapun konsumsi periode Januari-Maret 2013 diproyeksi sekitar 82,5 juta kg.  Selain itu, harga normal bawang putih ada di kisaran 12-14 ribu per kg, sedangkan pada Januari Maret harga naik hingga kisaran rata-rata Rp 25 – 35 per kg. sehingga ada selisih harga Rp 1,07-1,7 triliun. “Nah, inilah estimasi kerugian akibat kenaikan, harga bawang putih,” sebutnya.  Untuk daging sapi, lanjut Nawir, asumsi konsumsi per tahun sebanyak 549 juga kg, sehingga konsumsi Januari-Maret sekitar 137,25 juta kg. pada saat normal, harga daging sapi sebesar Rp 60-70 ribu per kg namun beberapa waktu lalu harga sempat naik ke kisaran Rp 85-100 ribu per kg, sehingga ada selisih rp25-30 ribu per kg. “dari selisih itu, kerugian konsumen mencapai Rp 3,4 – 4,3 triliun,” ucapnya.  Dengan berbagai fakta tersebut, kata Nawir, KPPU memiliki dugaan kuat bahwa importasi bawang putih dan daging sapi memang diwarnai praktie kartel oleh pelaku usaha tertentu yang ingin mengeruk keuntungan lebih banyak. “Hal seperti ini harus diberantas karena merugikan masyarakat secara langsung,” ujarnya.  Karena itu, KPPU dalam waktu dikatakan segera melakukan gelar perkara terkait dugaan kartel tersebut. Apalagi, lanjut dia, KPPU juga memiliki bukti kuat. Misalnya, fakta bahwa ratusan container, termasuk 512 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebenarnya sudah mendapatkan clearance (izin beres) namun tidak segera dikeluarkan untuk didistribusikan ke pasar. “Nah, pemilik barang itu sengaja menahan stok untuk menggerakkan harga naik. Ini *nggak bener*,” katanya.  Ketua Komisi VI DPR Arilangga Hartarto mengatakan, DPR mendukung penuh upaya pengusutan dugaan kartel oleh KPPU. Sebab, praktek semacam ini sudah disinyalir berlangsung lama. “Ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau harus menjadi prioritas ucapnya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **18** | ***Lombok Post*** | **25-04-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Monitoring Utang Swasta Diperketat**  **Gunakan Instrumen Pajak**  JAKARTA-Tren pertumbuhan utang luar negeri pihak swasta atau korporasi membuat pemerintah mengernyitkan dahi. Untuk meredam imbas negatifnya, pemerintah siap memperketat monitoring utang swasta.  Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, mitigasi risiko utang swasta merupaan faktor penting dalam stabilitas keuangan Indonesia. “Kajian dan masukan sudah banyak, tinggal kita seriusi,” ujarnya kemarin (24/4).  Menurut Mahendra, pesatnya kenaikan utang luar negeri swasta dipicu oleh perekonomian Indonesia yang terus tumbuh. Hal itu mendorong perusahaan swasta untuk berekspansi mengembangkan bisnisnya. “Di sisi lain, pasokan kredit dari luar negeri juga tinggi,” katanya.  Selanjutnya diketahui, pemerintah harus memonitor utang swasta karena penuntasannya dapat menimbulkan berbagai risiko dan memicu krisis. Misalnya, salah satu penyebab parahnya imbas krisis moneter 1997 adalah banyaknya perusahan yang memiliki utang dala denominasi USD, namun pendapatnya kebanyakan dlam denomisai Rupiah. Akhirnya, ketika nilai tukar Rupiah Akibatnya, ketika nilai tukar Rupiah anjlok, perusahaan koaps karena tidak sanggup membayar utang.  Data menunjukkan, rasio utang swasta terhadap produk domestic bruto (PDB) yang mencapai kisaran 30 persen, kini memang sudah melampaui rasio utang pemerintah terhadap PDB yang di kisaran 23 persen.  Dari sisi nilai, pada akhir 2011, utang luar negeri swasta masih di kisaran USD 106,73 miliar, tapi per Januari 2013 sudah meningkat menjadi USD 125,05 miliar. Sedangkan utang luar negeri pemerntah yang pada 2011 sebesar USD 123,13 miliar, pada akhir 2012 hanya naik tipis menjadi USD 126,11 miliar.  *Lantas apa yang akan dilakukan pemerintah?*  Mahendra mengatakan, saat ini Kementrian Keuangan tengah memfinalisasi system monitor utang swasta melalui instrument aturan pajak. “Ini untuk transparansi. Kalau ada utang (luar negeri) harus jelas asal dan peruntukannya,” upaya.  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan pemerintah akan, menetapkan batas rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity, rato (DER) untuk kalkulasi pajak. “Kan banyak perusahaan yang utangnya jor-joran, tapi kami belum bisa buka berapa besaran rasionya,” ujarnya.  Fuad mengakui, dalam beberapa kali forum konsultasi publik termasuk dengan pengusaha, kebanyakan pengusaha menolak rencana pemerintah itu. Namun pemerintah tidak akan menolak, tapi kita diskusi saja besar rasionya,” katanya.  Mahendra menambahkan, instrument aturan pajak terkait utang perusahaan itu memiliki dua manfaat. Pertama, untuk memonitor, dua mengerem niat perusahaan yang ingin jor-joran dalam berutang. Kedua, untuk meningkatkan pajak, “Yang penting jangan sampai tidak ada kendali sama sekali karena risikonya bagi sector keuangan cukup besar,” jelasnya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **19** | ***Lombok Post*** | **08-05-2013** | **Ekonomi Bisnis** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Apjati Angkat Martabat Pahlawan Devisa**  GIRI MENANG-Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB berkomitmen mengangkat harkat dan martabat para TKI. Pasalnya mereka pahlawan penyumbang devisa melalui kiriman uang hasil kerja kerasnya di luar negeri.  Hal itu dikatakan Ketua DPd Apjati NTB H Huhammadun, usai dilantik menjadi ketua baru periode 2013-2017, kemarin. Dia menggantikan H Muazzim Akbar yang menjabat selama 12 tahun. Pelantikan dilakukan oleh Ketua dewan Pengurus Pusat (DPP) Apjati Abyub Basalamah.  Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan bimbingan teknis untuk petugas rekrtu calon TKI (PRCTKI). Kegiatan ini dibuka sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov NTB H Muhammad Nur. Hadir juga Deputi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Agustin.  Muhammadun mengatakan, para pengurus baru sudah menyiapkan berbagai program dalam rangka meningkatkan martabat para TKI. Pertama program jangka pendek. Para pengurus yang terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) Apjati, akan melakukan rekonsolidasi dengan seluruh anggota. Pasalnya, ada beberapa dari mereka yang perlu berencana keluar dari asosiasi.  “Kami akan konsolidasi dengan beberapa rekan dalam rangka mengangkat kualitas pengiriman TKI NTB,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah membentuk dewan Pengurus Cabang (DPC) Apjati, di beberapa kabupaten/kota. Hal itu bertujuan untuk mempermudah komunikasi dengan para anggota Apjati di masing-masing daerah.  Dalam kepengurusan yang baru, juga sudah dibentuk semacam divisi. Misalnya Divisi Pemerintah Timur Tengah. Divisi ini nantinya focus terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan TKI yang ditempatkan di Negara-negara kawasan Timur Tengah. Ada juga Divisi Penempatan TKI di kawasan Asia Pasifik.  Apjati NTB juga sudah mewacanakan membentuk kantor perwakilan di Negara-negara penempatan. Pembentukan ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan para divisi penempatan TKI yang ada di Apjati NTB. “Kantor perwakilan ini juga nantinya bisa membantu mempermudah dan memperlancar keluarga TKI, seperti pemulangan jenazah,” terangnya.  Ketua DPP Apjati ayub basalamah, berharap agar DPD Apjati NTB bisa menjadi pelopor Apjati lainnya. Terlebih Gubernur NTB telah memberikan perhatian besar melalui berbagai programnya. “Saya juga minta Ntb ikut mensukseskan program penempatan satu juta TKI formal,” harapnya.  Sekda Pemprov NTB H. Muhammad Nur, mengatakan NTB sudah saatnya menguasai dan menduduki. Namun, pilihannya ada dua. Pertama harus memiliki capital yang mampu menghadirkan industry sehingga menyerap tenaga kerja. Kedua, jika tidak ada capital, masyarakat NTB yang harus mendatangi dimana industry itu berada, termasuk ke luar negeri. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **20** | ***Lombok Post*** | **10-01-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **TGB: Cawagub Masih di Lauhul Mahfuz**  MATARAM-Para Kandidat calon wakil gubernur yang ingin dilamar kandidat petahana Dr. TGH M Zainul Majdi sebagai pendamping masih layak berharap untuk digandeng. Pasalnya, TGB masih benar-benar “ masih “jomblo”. “Soal siapa yang akan menjadi cawagub itu masih ada di lauhul mafuz,” ungkap TGB di depan puluhan anggota dan pengurus Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah (FKAT) NTB saat silaturrahmi, kemarin.  Dalam pertemuan ini, TGB juga memberikan penjelasan terkait adanhya tudingan dari salah satu parpol, yang mengatakan, dukungan yang diberikan ditolak TGB. Ditegaskan TGB, dirinya tidak pernah menolak dukungan dari parpol manapun, sebagai bagian dari dukungan yang diberikan. Namun TGB tidak menyebutkan secara detail mengenai parpol yang mengajukan syarat yang diajukan.  Berbagai alsan mendasar yang menguatkan niat untuk kembali maju dalam pemilukada, juga disampaikan TGB, yang juga salah satu alumni Timur Tengah. Salah satunya terkait maslahul ummah, alias persoalan keumatan yang mengharuskan untuk ikut mengabdikan diri dalam pembangunan masyarakat. Terlebih lagi, NTB merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Indonesia. “setahun saya meneguhkan hati dan menimbang, apakah maju kembali atau tidak” bebernya.  Bahkan, TGB mengaku sampai mencari figure, yang mungkin lebih tepat dan bisa membawa percepatan pembangunan yang lebih luar biasa. Namun, dengan kerendahan hati, kandidat-kandidat yang muncul masih belum cukup meyakinkan.  Dan dengan kerendahan hati, kata TGB, saya meminta tolong kepada semua rekan-rekan alumni, untuk ikut membantu, pada Pemilukada 2013. Hanya saja, TGB juga meminta menggariskan bahwa, semua pihak yang akan membantu, juga harus tetap pada cara-cara yang baik. Sebab, pemilukada bukanlah perang yang bisa menghalalkan semua cara. Tetapi, merupakan kompetisi untuk menawarkan ide, visi, misi untuk membangun daerah. “Tetapi ada artinya menang, kalau justru dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan tujuan kebaikan yang ingin dicapai,” tegas Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW Pancor ini. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **21** | ***Lombok Post*** | **070-02-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Kirim SMS dari Makkah, Anas Tak Disebut**  JAKARTA-Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke tanah air sedang ditunggu-tunggu kalangan Partai demokrat. Sejumlah tokoh sumber partai yang beberapa hari terakhir menggulirkan pelengseran anas Urbaningrum dari posisi ketua umum siap langsung menjemput ketua Dewan Pembina PD itu.  “Kita serahkan saja pada SBY, beliau pasti tahu apa yang perlu dialkukan,” kata anggota Dewan Pembina Syarief Hasan di Komplek parlemen Jakarta kemarin dia dating ke gedung.  ***Anas Puny Hak untuk Bertahan***  DPR dalam kapasitas sebagai menetri koperasi dan UKM terkait agenda rapat kerja dengan komisi VI.  Saat disinggung respon Anas Urbaningrum yang terkesan santai menanggapi desakan pelengseran dirinya, sekretaris Setgab Koalisisi Pemerintah itu enggan menanggapi. “Saya hanya dalam posisi meminta SBY turun tangan mengangkat elektabilitas partai. Saya percaya SBY punya pengalaman untuk itu. Kita tunggu saja besok sore (hari ini, Red), “tandas Syarief.  Kemarin, tepat sehari sebelum kepulangan, SBY berkirim pesan pendek dari Makkah ke sejumlah petinggi partai. Di antara isinya, SBY terus memohon petunjuk dari pertolongan Allah SWT selama berada di tanah suci. Yaitu, agar Demokrat segera dibebaskan dari berbagai cobaan berat yang dihadapi saat ini. Namun, dari pesan pendek yang kemudian menyebar luas itu, ada hal yang ganjil. Ketua umum DPP PD Anas Urbaningrum tidak disebut secara eksplisit sebagai pihak yang diituju untuk SMS itu. Malah, sekjen Edhie Baskoro Yudoyono (Ibas) justru yang disebut. Bahkan, bersama sekretaris dewan pembina, sekretaris dewan kehormatan, dan ketua fraksi PD DPR, sekjen juga termasuk yang diminta untuk menyebarluaskan SMS itu ke semua kader di seluruh tanah air. “ Iya itu SMS-nya Pak SBY, saya juga terima,” kata Syarief saat dikonfirmasi.  Menurut rencana, SBY akan tiba di Jakarta hari ini dia akan bertolak dari Kairo menuju Jakarta sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Sehingga diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta siang ini pk 13.40 WIB. Kemungkinan besar, SBY akan langsung menggelar konfrensi pers tekait upaya dalam penyelamatan Partai Demokrat.  Terpisah, Wakil Ketu Dewan Pembina PD Marzuki Alie menyarankan agar Anas sebagai ketua umum berinisiatif mengumpulkan para petinggai parati untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Demokrat terkini. Terutama, terkait merosotnya suara partai dalam sejumlah survei terakhir.  Bersama beberapa pengurus DPP, dan meminta agar Anas mengunndang Dewan Pembina, Majelis Tinggi, dan Dewan Kehormatann uuntuk duduk bersama. “*Insya Allah* nanti ada soslusinya. Itu saja yang saya imbau pada Mas Anas, agar jangan seolag-olah ada perpecahan antara wanbin, wanhor, dengan DPP PD. Sesegera mungkinlah kalau bisa,” katanya.  Menurut dia, pertemuan petinggi partai diperlukan untuk membahas kosolidasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi “Memang sejak pemilu yang lalu elekttabilitas PD terus turun. Ini yang terus dicari solusinya. Nah, solusinya bermacam-macam,” kata Ketua DPR tersebut.  Lantas, seperti apa solusinya? Marzuki enggan mengungkap secara gamblang pandangannya. “Yang penting menurut saya, mari kita cari bersama-sama jalan keluarnya,” ucapnya.  Terpisah, pengamat komunikasi politik, Effendy Ghazali berpendapat kalau PD saat menjadi tersangka, Anas punya hak untuk bertahan,” tutrnya.  Lebih lanjut dia menjelaskan, jika kondisi PKS bisa terus membaik, maka kubuu yang kontra dengan Anas, akan terus menyerang. Dia yakin kalau konndisi PKS tidak akan jauh berbeda dengan PD sebenanrnya jika Lutfi Hasan ngotot mempertahankan jabatannya. Menjadi semacam tamparan bagi PD ketika Lutfi mundur, dan Demokrat ingin menyelesaikan masalah internalnya seperti PKS.  Namun, menurut Efendi itu tidak mudah. Sebab, bola saat ini bukan ada di tangan partai yang identik dengan warna biru itu, melainkan, melainkan ada di tangan KPK. “Bayangkan PD, kalau ketuanya mundur, masalah internal akan selesai. Tinggal membenahi elektabilitas yang disebut survei yang hanya 8,3 persen, “ terangnya.  Nah, sadar bahwa bola ada di tangan KPK, Presiden SBY dalam pidatonya meminta agar lembaga itu bisa seggera menyelesaikan kasus yang meyeret kader Demokrat. Meski sebagian masyarakat permintaan itu dianggap mengintervensi KPK, Effendy menilai begitulah kenyataannya.  Posisi Demokrat disebutnya makin sulit jika hingga akhir tahun KPK belum juga mennentukan nasib Anas. “Seperti kita tahu, KPK bisa cepat menentukan tersangka kalau ada oprasi tangkap tangan. Nah, masalah Anas jauh dari oprasi itu, jadi tidak bisa cepat,” tandasnya. Pengambilan kesimpulan rapat kerja antar Komisi Hukum DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin sempat berlarut-larut. Ini karena ketua Komisi III Gede Pasek Suardike bersikeras memasukkan klausul agar KPK segera menghentikan suatu penyeledikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup.  Sementara itu, dalam salah satu kesimpulan rapat, disebutkan bahwa KPK diminta untuk tidak tebang pilih dan menuntaskan penyidikan. Pasek yang merupakan legislator dari Partai Demokkrat ingin memasukkan tambahan klausul dengan alasan agar KPK tidak menggantung sebuah kasus. “Kepastian hukum ini penting. Jangan lembaga ini menyanndera orang secara psikologis,” kata Pasek.  Tak jelas apakah Pasek menyebut penyanderaan tersebut terkait dengan sosok tertentu. Namun sejumlah anggota DPR yang mengikuti rapat langsung berceletuk pelan bahwa itu pesanan terkait kasus yang tengah dihadapi Anas Urbaningrum. Hingga kini, kasus dugaan aliran dana terkait pembangunan pusat olahraga Hambalang, memang masih dalam proses penyelidikan.  Sejumlah fraksi lain menentang usul Partai Demokrat tersebut. mereka yyang menentang mmenganggap klausul itu tidak perlu karena sudah termuat dalam undang-undang yang mengatur tentang KPK. “Itu tidak perlu dimasukkan,” kata legislator dari Partai Golkar Nudirman Munir.  Ketua KPK Abraham Samad juga tegas menentang usulan itu. ”Kesimpula itu sebaiknya didrop. KPK tidak pernah gantung-menggantung perkara. Saya atas nama pimpinan KPK tidak sepakat dengan poin itu,” katanya.  Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy yang memimpin rapat itu lantas mengambil jalan tengah. Usulan Partai Demokrat itu hanya dimasukkan sebagai catatan rapat. Usai rapat, Samad mensinyalir usulan itu adalah pesanan dari pihak tertentu. “Saya mensinyalir kesimpulan itu kesimpulan pesanan, karena itu saya tolak mentah-mentah adakah pihak tertentu yang ......agar bisa nanti tenang tidurnya,” kata Samad. (**dyn/ken/dim/sof/nw)** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **22** | ***Lombok Post*** | **18-02-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Masyarakat Diharap Jadi Pemilih yang Kritis**  MATARAM- Pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan segera dimulai. Figure calon pemimpin sudah menyatakan diri siap membawa perubahan untuk perbaikan nasib masayrakat NTB. Namun sebagai pemilih, masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang kritis dan mampu melihat dengan rasional figure yang akan dipilih beserta programnya.  Hal itu terungkap dalam Seminar Pemilukada Ntb yang diadakan KAMMI NTB beserta Nusra Institute, Sabtu lalu. Ketua bidang Sosial Politik, Hukum dan Ham KNPI NTB, Irfan Wahid, mengatakan, sebelum menentukan pilihan sebaiknya masyarakat melihat bagaiman kinerja dari calon pemimpin, pa yang telah mereka lakukan untuk pembangunan masyarakat selama ini. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsep pembangunan yang akan dilakukan.  “Kita harus memperhatikan kinerja mereka selama ini, dan apakah memiliki konsep yang jelas atau tidak,” katanya.  Dalam proses demokrasi yang akan terjadi saat ini, menurutnya masyarakat tidak hanya peka terhadap masalah politik, namun juga peka terhadap masalah sosial. Jangan sampai karena hiruk pikuk pemilukada membuat masyrakat lupa akan masalah-masalah sosial yang seharusnya segera diselesaikan. Seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga masalah konflik sosial yang kerap meledak di tengah masyarakat. Semua permsalahan tersebut harus menjadi perhatian masayrakat untuk memiliki pemimpin.  “Di samping kita memiliki kepekaan politik, kepekaan sosial juga harus ditingkatkan,” katanya. Dalam konteks peran media massa, Humas Lombok Post Group, H rudi Hidayat mengatakan, media massa sangat beperan di dalam proses demokrasi dan pencerahan masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi. Menurutnya, media massa tidak bisa dalam posisi netral, karena media harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Media bisa mengangkat masalah-masalah sosial yang menjadi permasalahan pokok, di antaranya pengangguran yang cukup parah, di mana sebagian besar pengangguran merupakan kalangan muda yang masih produktif.  Dalam konteks itulah media harus berperan untuk menyuarakan aspirasi dan permasalahan pokok yang ada di masyarkat sehingga para calon pemimpin memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  “Media harus berperan dan tidak netral, tapi berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.  Sementara Ketua Bawasda NTB, Khuwailid, mengatakan, peran pemuda sangat dibutuhkan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebagai kalangan intelektual mestinya pemuda mampu berperan lebih maksimal dalam mendorong politik NTB. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **23** | ***Lombok Post*** | **28-02-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Indeks IPM Naik, Posisi Belum Terkerek**  **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang betah di posisi 32 dari 33 provinsi kerap dieksploitasi. Tak terkecuali menjelang Pemilukada NTB 2013 ini. Banyak yang tak mengetahui, kalau indeks IPM NTB dalam empat tahun terakhir, sebetulnya naik pesat.**  **KUSMAYADI,** Mataram  POSISI IPM NTB telah menjelma menjadi senjata. Namun, ia dikokang pihak lawan, belakngan ini IPM NTB memang kerap diungkit-ungkit. Banyak pihak mengaitkan, kondisi IPM NTB itu cerminan pemerintahan belum maksimal bekerja.  Lontaran tentu tak melulu dating dari lawan politik. Mereka yang tak memiiki afilisi sekalipun memang kerap gerah, jika melihat posisi IPM NTB yang betah di nomor buncit. Ini juga dirasakan aktivis Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO), Nurjannah.  “Kenapa tidak bergeser-geser ya. Saya rasa lima tahun waktu yang cukup panjang untuk mengerek IPM NTB,” kata Nurjannah menggugat.  Dia mengatakan, posisi IPM itu adalah “tolok ukur keberhasilan. Menurut dia, kondisi IPM ini menjadi hal pokok yang penting dirumuskan dalam bentuk program dan kebijakan yang lebih jitu. “Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi siapa saja yang terpilih dalam Pemilukada tahun ini,” katanya. Tentu saja tak ada yang hendak ditutup-tutupi. Kenyataannya memang begitu. Dan harus diakui, berada pada posisi belakang, memang tak ada yang sudi.  Ini pula yang ada dalam benak TGH Mahally Fikri, Ketua Tim Pemenangan kandidat petahana TGH M. Zainul Majdi dan Muhammad Amin. Namun ia menolak jika disebut pemerintahan TGB tak bekerja mengerek IPM NTB.  “Kenapa kita tidak bisa menggeser NTB. Padahal lihat kota kabupatennya jauh lebih baik Narmada (Kota Kecamatan di Lombok Barat). Tapi secara IPM, rangkingnya lebih baik dari NTB. Kenapa? Karena secara fiskal NTT lebih baik,” kata Mahally.  Mantan Ketua KPU NTB ini benar tentu saja. Tahun ini saja, NTT memperoleh dana dari pemerintah pusat dalam DIPA mencapai Rp 23 triliun. Pada saat yang sama, NTB hanya menerima DIPA Rp 15,7 triliun. “NTT itu mendapat alokasi dana besar, karena daerah perbatasan kata Mahally.  Hal yang sama juga berlaku bagi Provinsi Papua. Provinsi ini memiliki posisi IPM lebih baik, karena menerima gelontoran dana otonomi khusus yang besar. Tahun ini Papua memperoleh dana atsus sebesar Rp 4,3 triliun. Mereka juga masih menerima DIPA tahun 2013 sebesar Rp 39 triliun.  Mahally juga menyodorkan fakta lain. Ia menyebut Jogjakarta sebagai provinsi dengan IPM terbaik di Indonesia. “IPM Jogjakarta itu paling tinggi. Padahal kalau masuk ke Keraton, banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi indicator pendidikan, tinggi di Jogja. Bukan orang Jogja yang sekolah. Tapi orang Lombok dan Sumbawa,” kata Mahally.  Doctor Ekonomi Universitas Mataram Iwan Harsono, tak menampik pernyataan Mahally. Menurut dia, kondisi IPM NTB memang boleh dikritik. Namun kata dia, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013, tidak satupun yang menyebut posisi IPM NTB ditarget naik dalam posisi tertentu. “Yang berkembang memang menyebut papan tengah. Tapi tidak ada dokkumen tertulis soal itu,” katanya.  Dia menegaskan, IPM itu komponennya terkait usia lama sekolah. Di Jawa Barat, saat ini, lama sekolah kata Iwan sama dengan NTB yakni 6,8 tahun. Namun IPM Jawa Barat lebih baik posisinya. “yang ingin saya tekankan, sekarang ini ada peningkatan indeks penentuan IPM NTB Indeks IPM nya meningkat, karena orang sudah sekolah lebih tinggi, orang lebih sehat, dan angka harapan hidup lebih tinggi. Jadi bagi saya, pemerintah sudah bekerja. Masalahnya provinsi lain juga bekerja,” katanya. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **24** | ***Lombok Post*** | **27-03-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Bawaslu Diminta Bekerja Profesional**  MATARAM-Aktivitas mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB untuk professional dalam mengawasi pemilukada.  Bawaslu harus serius mengawasi netralitas PNS dalam pemillukada. Selain itu, juga harus memperketat pengawasnnya terhadap penggunaan fasilitas Negara oleh calon gubernur.  Ketua KAMMI daerah NTB Ahmad Dahlan mengatakan Bahaslu NTB harus konsisten dengan komitmennya sebagai pengawas pemilu. Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh empat pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU NTB harus ditindak seadil-adilnya. “Bawaslu harus tegas terhadap keputusannya. Jangan pilih kasih terhadap salah satu pasangan calon,” kata Dahlan saat berorasi di depan Kantor Bawaslu, kemarin.  KPU NTB telah menetapkan empat pasangan calon gubernur dan wagub. Keempat calon itu yakni pasangan Dr. TGH M Zainul Majdi, MA dan H Muhammad Amin, H. Harun Al-Rasyid dan HL Abdul Muhyi Abidin; Dr KH Zulkifli Muhadli dan Prof Dr HM Ichsan; dan Suryadi Jaya Prnama dan Johan Rosihan.  Selain PNS dan penggunaan fasilitas Negara, KAMMI NTB juga akan ikut mengkritisi pasangan calon yang memanfaatkan struktur birokrasi dalam suksesi pemilukada. Terkait dengan itu, KAMMI juga mengimbau seluruh aparatur pemerintah baik jajaran pemerintah daerah NTB hingga tingkat lingkungan untuk mengedepankan nilai profesionalisme. “Untuk mewujdukan politik yang bersih dan memberikan pendidikan politik pada generasi muda,” ujarnya.  Semua pasangan calon juga diimbau untuk mampu mengendalikan masa pendukungnya agar tidak berlaku anarkis. Artinya seluruh pasangan calon bersedia menandatangani kesepakatan siap menang dan siap kalah sehingga semua permasalahan yang muncul bisa teratasi dengan baik tanpa melawan hukum.  Sebelumnya, Bawaslu NTB mengancam akan melaporkan PNS yang terlibat politik praktis dalam pemilukada. Pengawasan terhadap ketertiban PNS dalam politik itu akan diperketat setelah KPU NTB menentapkan pasangan calon.  Ketua Bawaslu NtB M Khuwailid mengatakan akan lebih focus pada keterlibatan PNS fterutama yang terlibat kampanye. Menurut dia, sejahu ini Bawaslu masih kesulitan untuk menentukan sikap terkait dugaan keterlibatan PNS. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| *25* | *Lombok Post* | *08-04-2013* | *Politik* |
| **Teks Berita** | | | |
| **TGB: Jangan Gunakan Politik Gaya *Infotainment***  MATARAM-Gubernur NTB TGB Dr. HM. Zainul Majdi mengimbau kepada seluruh pasangan cagub/Cawagub dan tim pemenangannya untuk tidak menggunakan gaya infotainment dalam berpolitik. Yakni, mengeksploitasi isu-isu yang justru tidak terkait dengan visi-misi membangun NTB.  “Pemilukada ini merupakan ajang mencari pemimpin. Jadi pola-pola yang harus ditawarkan oleh semua adalah pola-pola politik berbudaya, jangan menggunakan pola infotainment,” ujar TGB kepada wartawan, usai jalan sehat yang digelar KPU NTB kemarin.  TGB kemudian mendorong seluruh elemen masyarakat menerapkan pola politik berbudaya demi kemajuan NTB. Lebih lanjut TGB, menegaskan, masyarakat sebaiknya menjauhi perilkau politik yang tidak baik. Sehingga dapat menciptakan degradasi sosial atau kondisi yang terpecah, hingga menciptakan ketegangan di tingkat masyarakat bawah. “Jadi perilaku yang tidak baik itu sangat tidak perlu dan jangan dilakukan,” tandasnya.  KPU NTB menggelar gerak jalan sehat untuk mensosialisasikan pemilukada, sekaligus media menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait pemilukada damai. Jalan sehat ini di gelar serempak ditingkat nasional di seluruh Indonesia.  Bagi Gubernur, seluruh pasagan calon dan semua masyarakat NTB meiliki kewajiban moral untuk melakukan sosialisasi serta kampanye sesuai dengan aturan formal. Tidak hanya itu, TGB berharap agar koten kampanye berkaitan dengan visi-misi untuk membangun NTB ke depan.  Sementara itu Ketua KPU NTB Fauzan Khalid menjelaskan, pihaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan jalan sehat. Dengan begitu dia berharap seluruh masyarakat dapat terlibat aktif baik pada pemilukada Gubernur maupun pada pemilu legislative. Dan dalam gerak jalan itu seluruh pasangan calon diundang, termasuk didampingi 50 orang pendukungnya masing-masing. “Kita mengharapkan masyarakat kita berharap semua terlibat dalam proses pemilukada maupun pemilu legislatif. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **26** | ***Lombok Post*** | **18-04-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Harus Dewasa Dalam Berpolitik**  PARA calon yang saat ini bertarung termasuk para tim pemenangan masing-masing pasangan juga wajib member contoh bagi masyarakat. Terutama dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan prinsip politik yang bersih. Tidak hanya menuntut masyarakat bersikap jujur dan menjaga ketertiban umum.  Calon pemimpin juga diharapkan dapat bersikap dewasa dalam berpolitik. Tidak melontarkan pendapat yang cenderung membingungkan atau menjadi konroversi di tengah masayrakat. Calon pemimpin juga berupaya menunjukkan sikap kesatria yakni jujur dalam menyikapi problem masyarakat. Tidak mencari-cari pembenaran hanya karena menginginkan simpati masyarakat.  Menunjukkan sikap jumawa seoalah-olah sudah berhasil atas segala-galanya terkadang dapat menuai pendapat beragam dari masayrakat. Bahkan cenderung membangkitkan emosi sehingga dapat menimbulkan kekacauan. Nah, maka itu selaku pemilih yang menjunjung tinggi nillai kejujuran, maka seyogyanya dapat mencontoh hal yang pisitif dari para calon pemimpinnya.  Mari kita pilih pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana. Mengerti apa yang terlintas dalam benak, jiwa masyarakat NTB tercinta. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **27** | ***Lombok Post*** | **26-04-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Dahlan Bisa Angkat Elektabilitas Demokrat**  JAKARTA-Lembaga Survey Jakarta (LSJ) menilai, jika mau ikut, Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berpeluang menang dalam konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Salah satu alsannya, Dahla sangat popular dan memiliki dukungan grass root yang sangat bagus.  “Dahlan Iskan memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Elektabilitas Partai Demokrat juga akan merangkak naik. Sebab, Dahlan Iskan ini masuk dalam criteria pemimpin yang disukai rakyat,” kata Direktur LSJ Rendi Kurnia di Jakarta, kemarin.  Merujuk pada hasil Survei LSJ Maret lalu, jika Dahlan memenangi konvensi capres Partai Demokrat, elektabilitas Partai Demokrat berpeluang naik. Akhir Maret lalu, LSJ merilis hasil survey capres alternative pilihan publik yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Survey dilaksanakan pada periode Maret 2013 dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin error 2,8 persen.  Dalam suervei itu, sebanyak 44,2 persen responden yang disurvei menyatakan menyukai Dahlan. Persisi di bawah Dahlan ada Mahfudz MD dengan tingkat kesukaan 42,8 persen. Baru kemudian di urutan selanjutnya muncul nama Rhoma Irama. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Media** | **Edisi** | **Jenis Rubrik** |
| **28** | ***Lombok Post*** | **03-05-2013** | **Politik** |
| **Teks Berita** | | | |
| **Anggaran 15 Kementerian bermasalah**  ***Mayoritas Diisi Orang Parpol***  JAKARTA-Rapor anggaran 15 kementerian yang diisi tokoh parpol memiliki hasil audit bermasalah. Secretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan 15 “kementerian parpol” yang anggarannya terindikasi merugikan Negara sebesar Rp 8,3 triliun.  “Menteri-menteri dari partai politik sangat jelek dan amburadul dalam pengelolaan anggaran. Sehingga ditemukan indikasi kerugian Negara,” ujar Uchok Sky Khadafi, coordinator investigasi dan monitoring Seknas Fitra, di Jakarta, kemarin.  Uchok menyatakan, secara riil, indikasi kerugian Negara itu untuk 1.950 kasus di 15 lembaga/kementerian. Data itu didapat berdasr hasil audit badan pemeriksa keuangan pada semester II tahun 2012.  Indikasi kerugian Negara tersebut bisa dikategorikan dalam dua bagian. Uchok menyatakan, bisa jadi kementerian sudah memberikan laporan keuangan, namun belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Yang kedua, pemerintah sama sekali belum mendapatkan hasil audit Negara. “Itu berarti, pemerintah belum mengembalikan uang Negara”, ujarnya.  Diantara 15 lembaga yang menjadi sorotan, Kementerian Kehutanan terindikasi kerugian Negara paling besar. Berdasarkan catatan fitra, auditor bPK mencatat Rp 7,1 triliun ditambah dengan 278 kasus di lebaga yang dipimpin Zulkifli Hasan (Politikus Partai…) | | | |